



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI CHINA TERHADAP KONFLIK
DARFUR, SUDAN
PERIODE 2004-2007**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (MSi) dalam
Hubungan Internasional

Ratna Septianauli D.
0606153405

T
25099

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
JAKARTA
DESEMBER 2008



PERNYATAAN ORISINALITAS

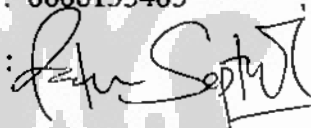
Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang

dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

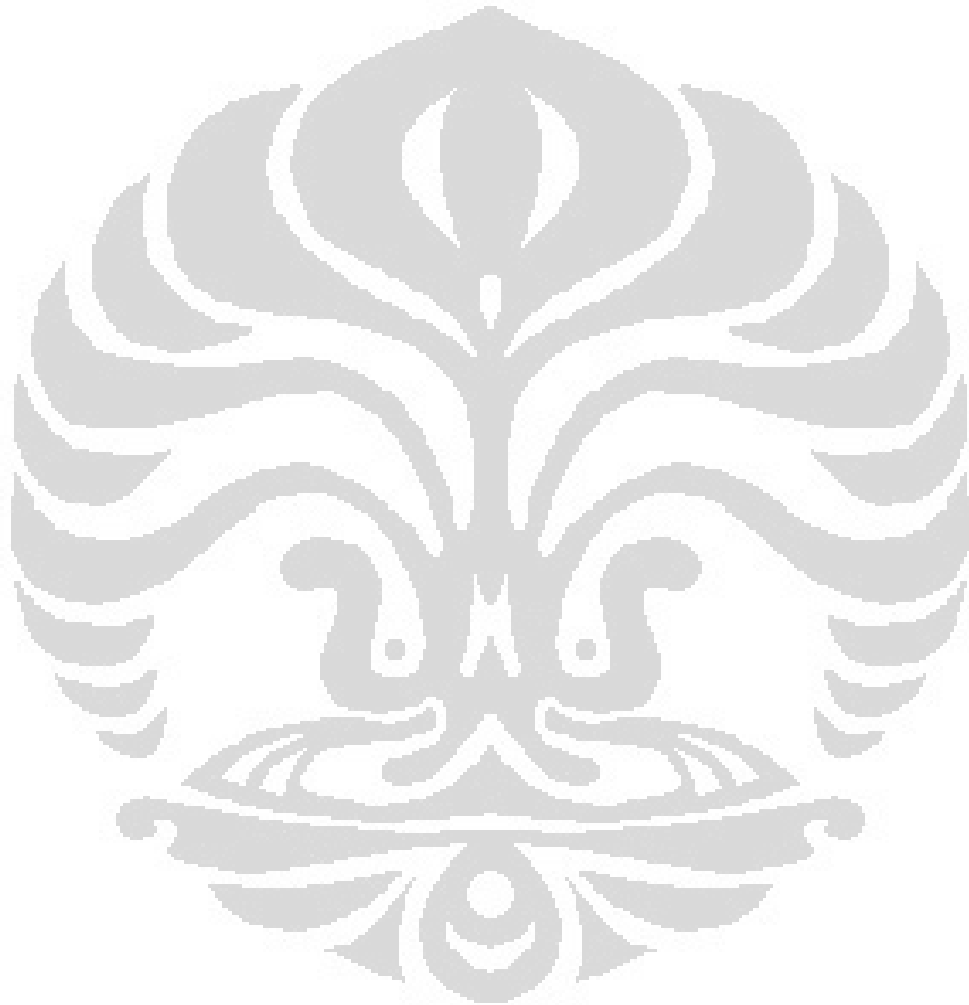
Nama : Ratna Septianauli D.

NPM : 0606153405

Tanda Tangan



Tanggal : 17 Desember 2008







HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

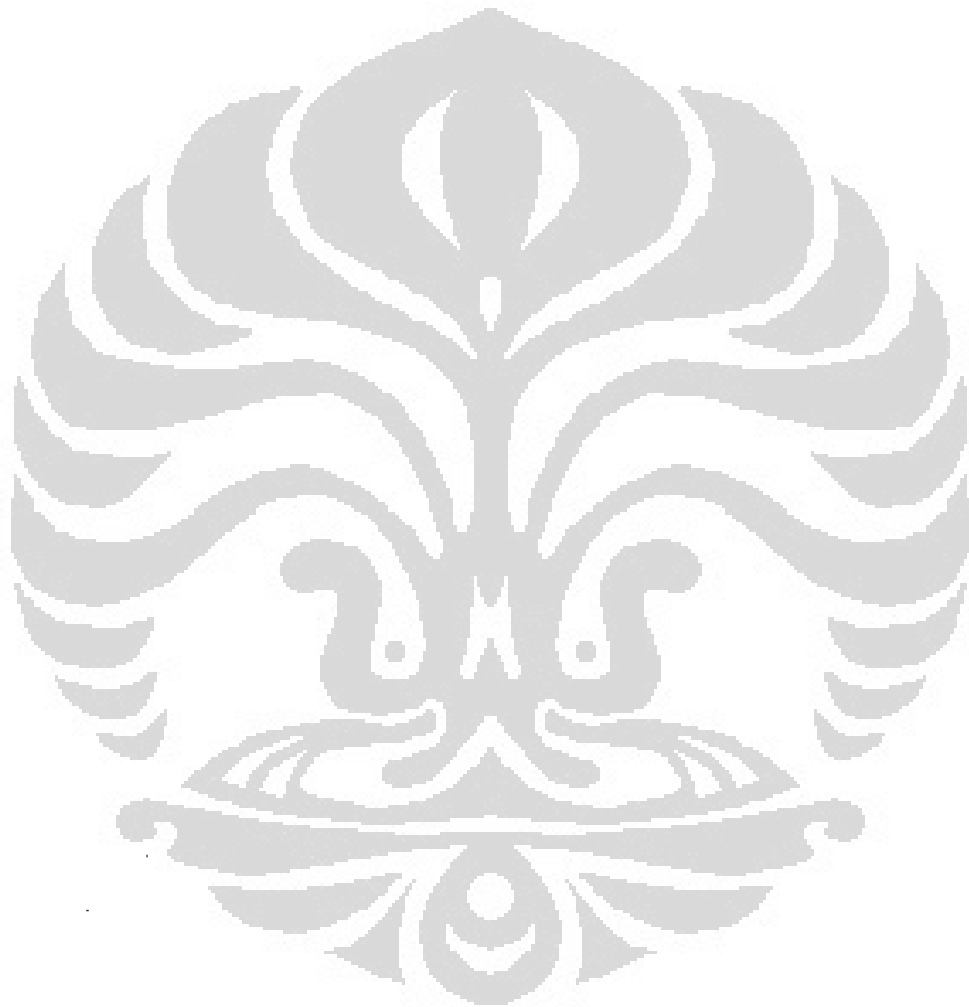
Nama : Ratna Septianauli D.
NPM : 0606153405
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Tesis : Kebijakan Luar Negeri China Terhadap Konflik Darfur,
Sudan, Periode 2004-2007

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.) pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Dewan Penguji

Pembimbing Tesis : Dr. Syamsul Hadi ()
Penguji Ahli : Zainuddin Djafar, Ph. D ()
Ketua Sidang : Dr. Makmur Keliat ()
Sekretaris Sidang : Drs. Fredy BL. Tobing, M.Si ()

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 17 Desember 2008



KATA PENGANTAR

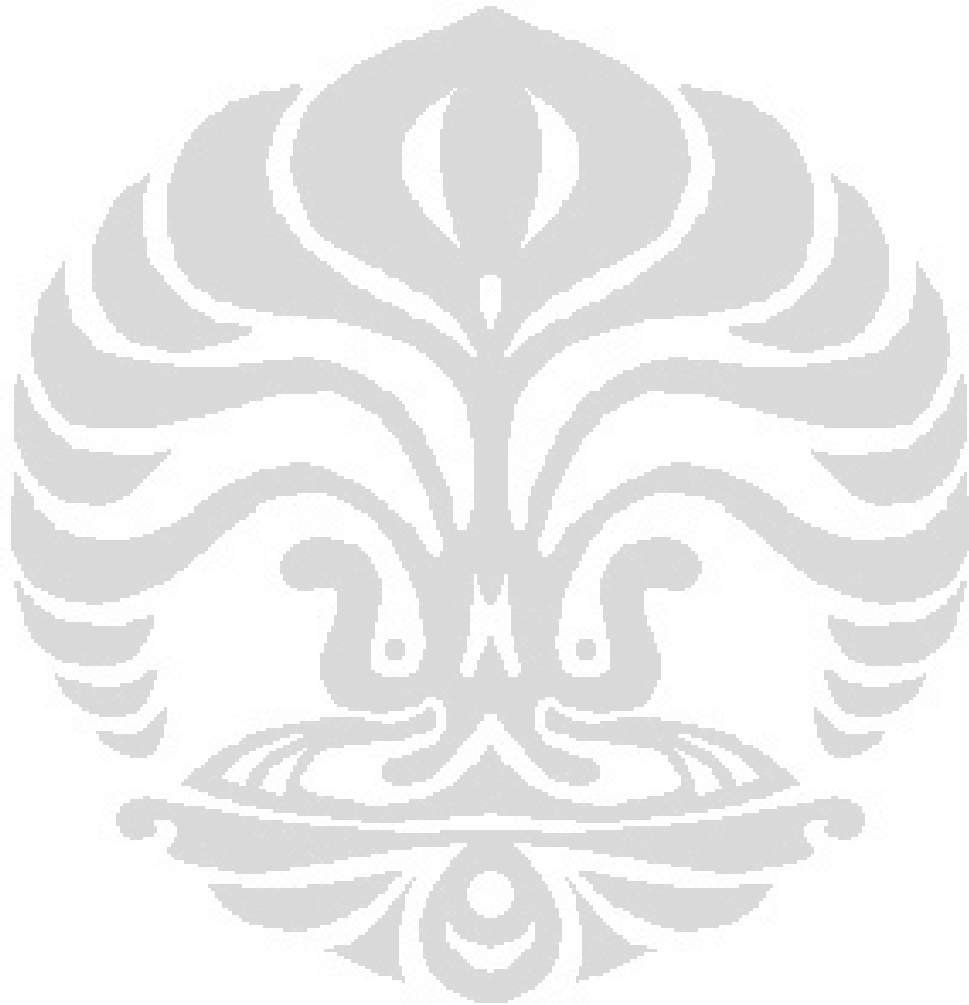
Puji syukur Allah SWT yang telah memberikan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul Kebijakan Luar Negeri China Terhadap Konflik Darfur dengan periode pengamatan 2004-2007.

Konsep Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai merupakan pilar dari kebijakan luar negeri China sejak tahun 1950an. Prinsip ini terutama menekankan pada pentingnya menghormati kedaulatan sebuah negara dan *non interference* terhadap urusan domestik dari suatu negara. Ketika konflik Darfur, Sudan, meletus pada tahun 2003 China yang merupakan salah satu anggota Dewan Keamanan PBB selalu menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dari Sudan dan menjunjung tinggi prinsip *non interference* terhadap masalah Darfur yang dianggap oleh China sebagai masalah domestik Sudan. Namun Amerika Serikat dan Uni Eropa memandang berbeda dengan China mengenai konflik Darfur ini. Konflik Darfur yang semula adalah masalah konflik dalam negeri Sudan menjadi suatu konflik yang tidak hanya sekedar itu. China juga jadi dihubungkan dengan konflik ini. Dinamika yang terdapat dalam konflik Darfur membuat penulis tertarik untuk mengambil kasus ini sebagai bahan penelitian dalam mengkaji kebijakan luar negeri China.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan tesis, terutama kepada Bapak Dr. Syamsul Hadi atas kesediaan waktunya memberikan bimbingan dan pengertiannya yang luar biasa, Bapak Zainuddin Djafar, Ph.D selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia dan Penguji Ahli, Bapak Dr. Makmur Keliat selaku Ketua Sidang dan Bapak Drs. Fredy Tobing, M.Si selaku Sekretaris Sidang atas semua masukan dari Bapak-bapak sekalian.

Terima kasih juga saya ucapkan terutama kepada orang tua yang selalu memperhatikan saya sehingga saya bisa mendapatkan gelar S2. Tesis ini saya persembahkan untuk mereka. Tak terlupakan seluruh teman-teman saya yang selalu mendoakan agar saya lulus pada waktunya.

(Jakarta 2008)



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Septianauli D.
NPM : 0606153405
Program Studi : Hubungan Internasional
Departemen : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Kebijakan Luar Negeri China terhadap Konflik Darfur, Sudan, Periode 2004-2007

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

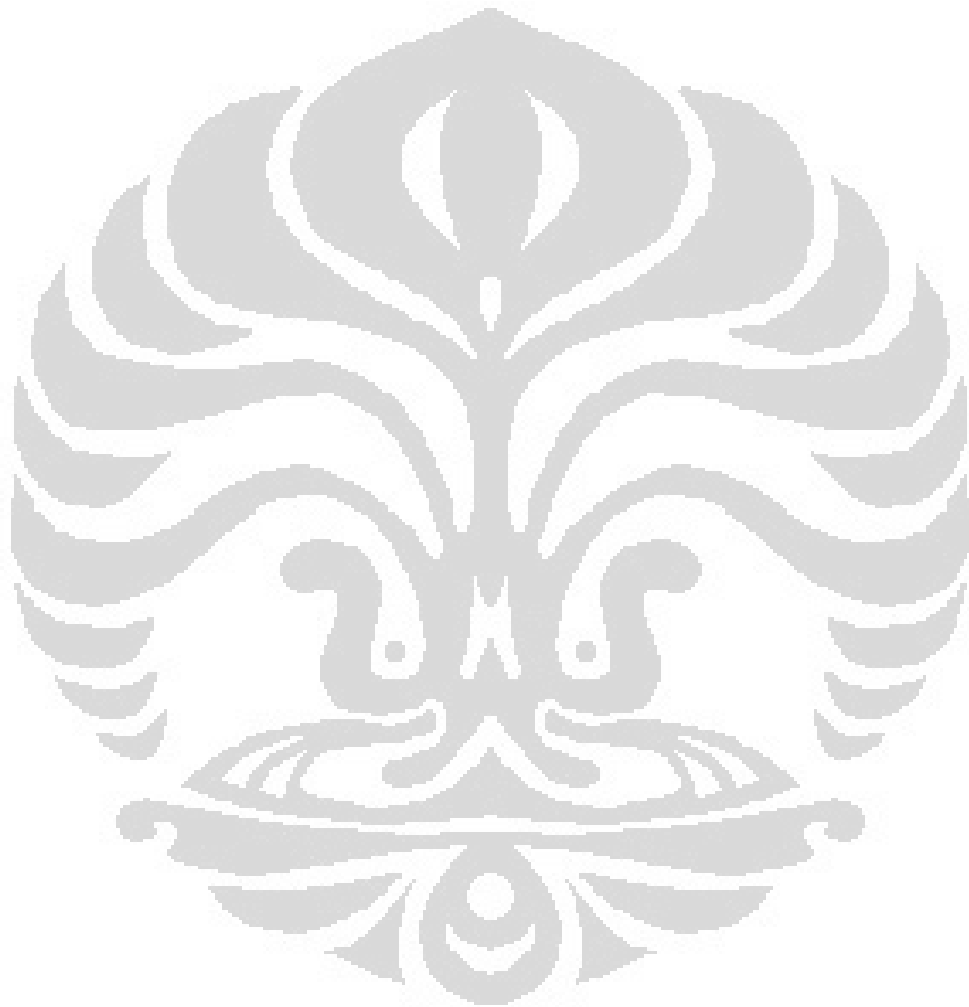
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Desember 2008

Yang Menyatakan



(Ratna Septianauli D.)



ABSTRAK

Nama : Ratna Septianauli D.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Departemen Ilmu Hubungan Internasional
Program Pasca Sarjana
Judul : Kebijakan Luar Negeri China terhadap Konflik Darfur, Sudan

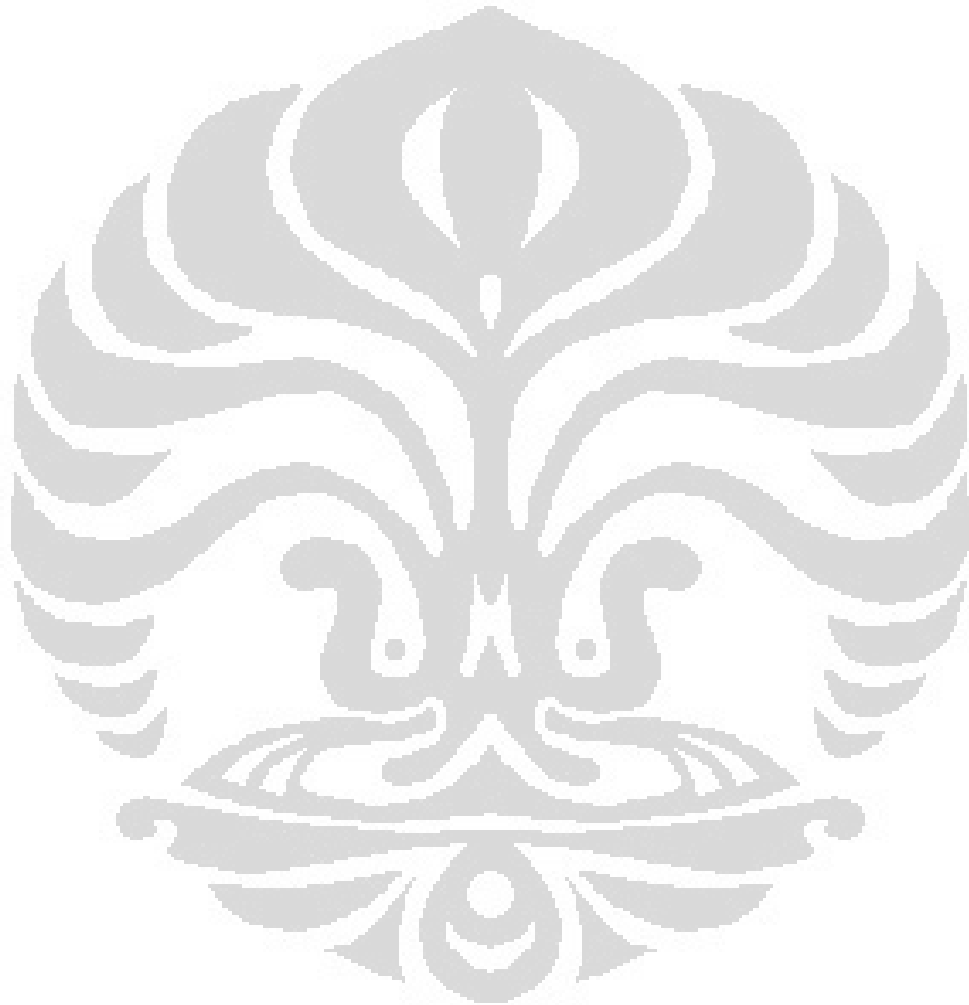
Konflik Darfur berawal ketika pada bulan Februari 2003, gerakan pemberontak menyerang pasukan militer Sudan dan fasilitasnya di sebuah kota kecil di Darfur, Sudan. Pemerintah Sudan memutuskan untuk mengambil langkah operasi militer ke Darfur dalam rangka menghancurkan para pemberontak tersebut. Sejak itu konflik meletus dan peperangan terus berlanjut antara pihak pemberontak, Pemerintah Sudan dan sekelompok militan yang bernama Janjaweed yang berada pada pihak pemerintah.

Dampak dari konflik ini menimbulkan krisis kemanusiaan sehingga dunia internasional mengecam Pemerintah Sudan yang tidak mampu mengatasi krisis. Di sisi lain, China yang merupakan investor terbesar di Sudan dituntut untuk bersikap keras terhadap Pemerintah Sudan. Tapi China menerapkan kebijakan *non interference* dalam kasus ini. Sementara itu, situasi di Darfur semakin memburuk sehingga dunia internasional harus melakukan intervensi dalam krisis ini termasuk China melalui kebijakan luar negerinya.

Kebijakan Luar Negeri China terhadap konflik Darfur dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu prinsip *non interference* dan kepentingan ekonomi yaitu minyak di Sudan. Sedangkan faktor eksternal adalah respon dari Amerika Serikat, Uni Eropa, PBB, Uni Afrika dan media massa internasional terhadap konflik Darfur dan China sebagai investor terbesar di Sudan. Selain itu, hubungan China Afrika juga menjadi pertimbangan dalam Kebijakan Luar Negeri China. Tesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana Kebijakan Luar Negeri China terhadap konflik Darfur.

Kata Kunci:

Kebijakan Luar Negeri China, Konflik Darfur, Sudan



ABSTRACT

Name : Ratna Septianauli D.
Faculty of Social and Political Science
Departement of International Relations
Post Graduate Program
Title : Chinese Foreign Policy toward Darfur' s Conflict, Sudan

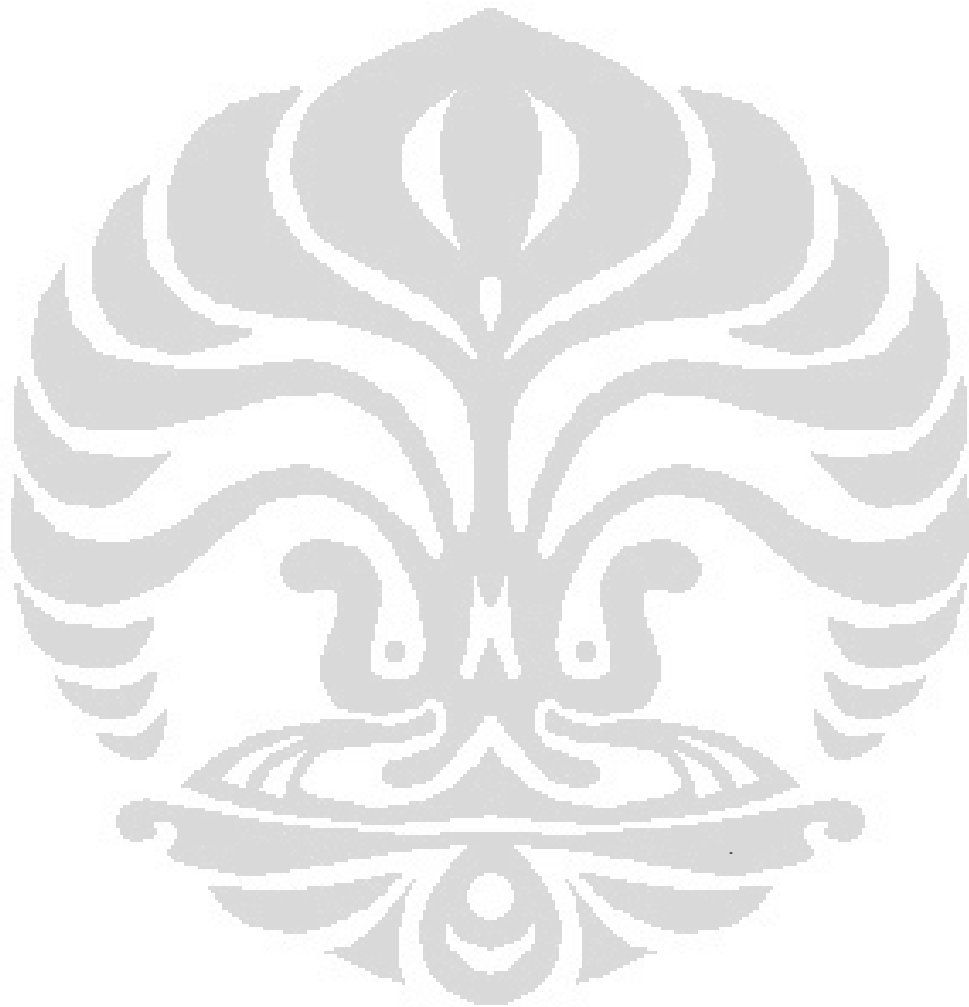
Conflict over Darfur began to take place in February 2003, when an armed rebellion attacked Sudanese army and military facilities in Darfur, Sudan. In response to the attack, Sudanese government decided to launch military operation to Darfur. Since then, the conflict broke and war continued between the rebellion, the government of Sudan and a group of militia, called Janjaweed, who were on the government side.

Implication of this conflict brought humanitarian crisis so that the world condemn the government of Sudan for not able to reduce the crisis. On the other side, China, the largest investor in Sudan, is being pressure by the world to suppress the government of Sudan. But China saw this matter as a domestic matter of Sudan and adopted the principle of non interference. Meanwhile, the situation in Darfur deteriorated and so the world must take any necessary and proactive measure as soon as possible, including China through his foreign policy.

Chinese foreign policy toward Darfur's conflict is affected by many internal and external factors. Internal factors are characterized by national principle, non interference, and economy factor which is oil in Sudan. While the external factors are the respon from the US, European Union, UN, AU about the conflict and about China itself. The partnership relation between China and Africa will also be considere as external factor. This thesis will analyze how the Chinese foreign policies toward Darfur's conflict.

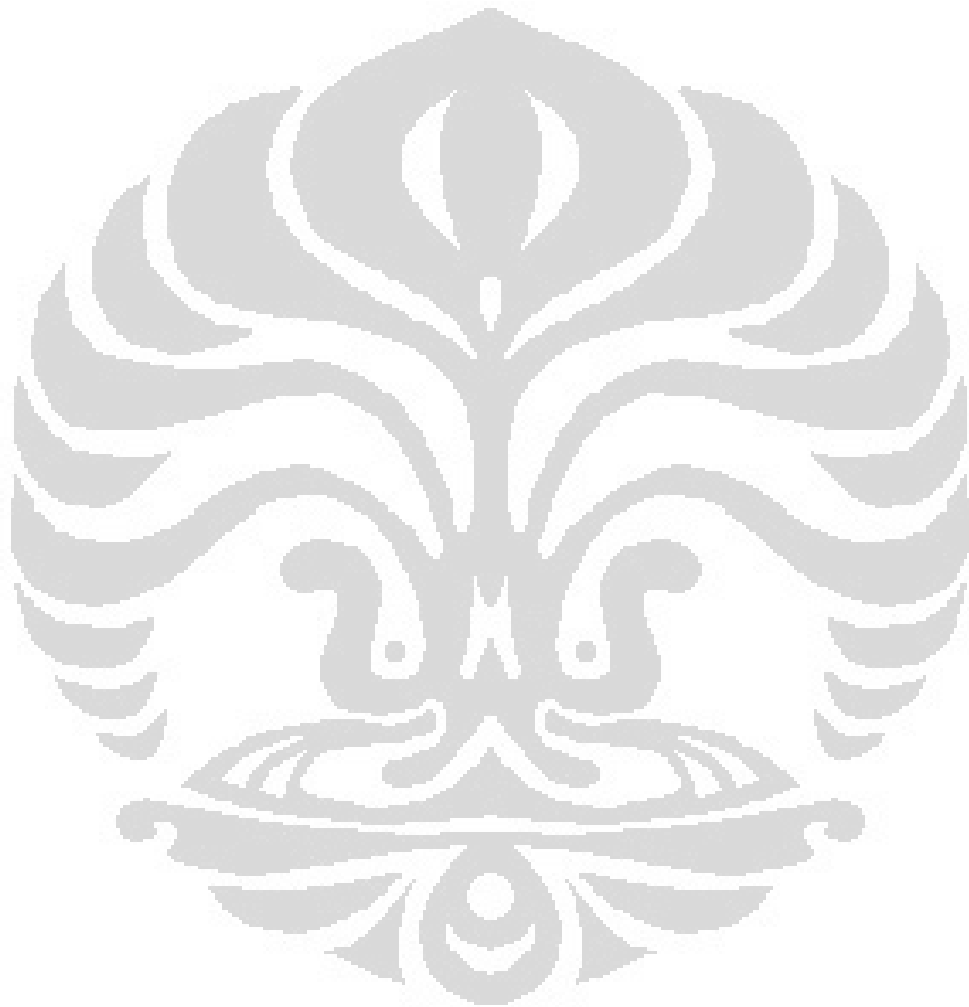
Key Words:

Chinese Foreign Policy, Conflict Darfur, Sudan

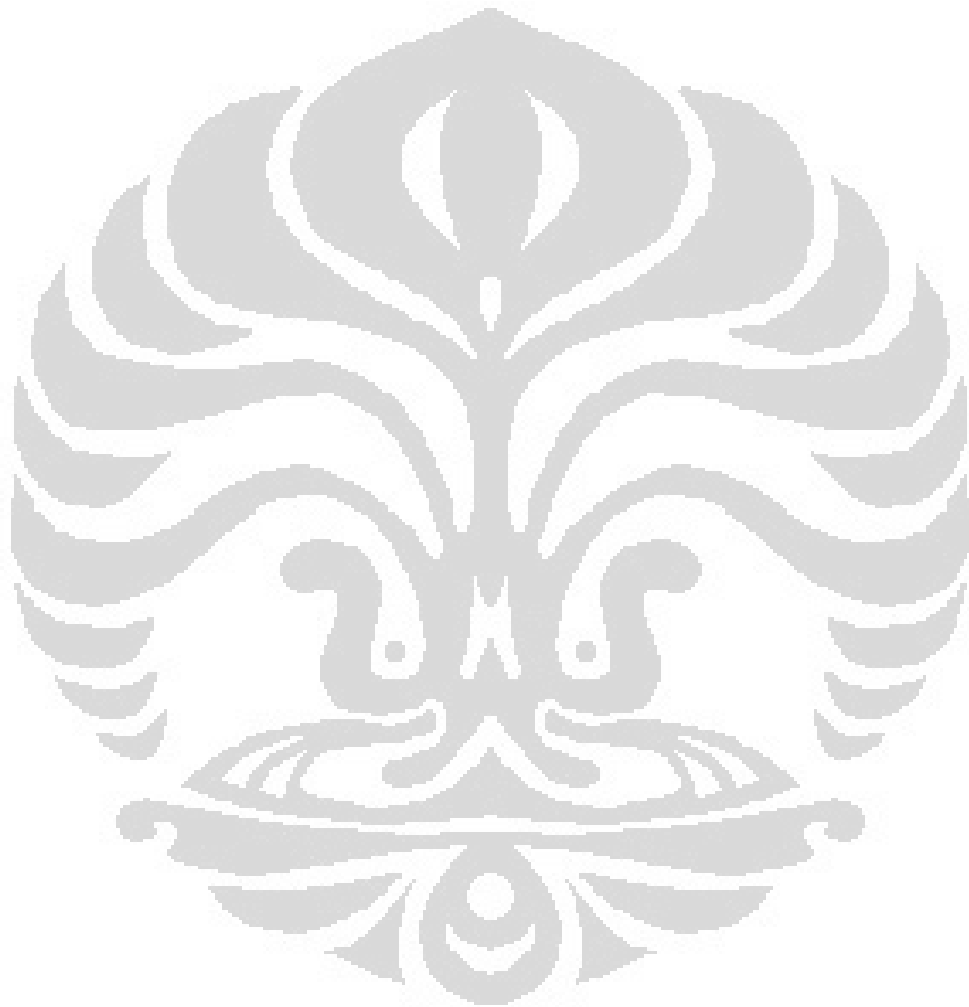


DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	x
BAB 1: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pokok Permasalahan	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Kerangka Pemikiran.....	14
1.5.1 Tinjauan Pustaka	14
1.5.2 Kebijakan Luar Negeri.....	15
1.5.3 Keamanan Energi.....	19
1.5.4 Definisi Konsep	22
1.5.4.1 Non Interference	22
1.5.4.4 Keamanan Energi	23
1.6 Model Analisis	24
1.7 Asumsi	25
1.8 Hipotesa	26
1.9 Metodologi.....	26
1.10 Sistematika Pembabakan.....	27
BAB 2: SUDAN DAN KONFLIK DARFUR.....	28
2.1 Gambaran Sudan Secara Umum	28
2.1.1 Ekonomi Sudan Secara Umum	29
2.1.2 Pemerintahan Omar Al Bashir	31
2.1.3 Perang Utara Selatan.....	33
2.2 Darfur.....	36
2.2.1 Arab vs Afrika.....	39
2.2.2 Pusat vs Pusat.....	40
2.2.3 Konflik Darfur	42
2.2.4 Operasi Militer Darfur	44
2.2.5 Kelompok-kelompok dalam Konflik Darfur.....	45
2.2.6 Darfur Peace Agreement.....	51
2.2.7 Krisis Kemanusiaan	54
2.3 Resolusi DK PBB tentang Konflik Darfur.....	55



BAB 3: KERJASAMA CHINA AFRIKA.....	60
3.1 Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai	60
3.2 Kerjasama China Afrika.....	62
3.3 Kerjasama China Sudan	68
BAB 4: KEBIJAKAN LUAR NEGERI CHINA TERHADAP KONFLIK DARFUR.....	74
4.1 Faktor Internal.....	74
4.1.1 Non Interference	74
4.1.2 Keamanan Energi China di Sudan	76
4.2 Faktor Eksternal	80
4.2.1.1 Media Massa Internasional	81
4.2.1.2 Amerika Serikat	84
4.2.1.3 Uni Eropa	86
4.2.1.4 PBB	87
4.2.1.5 Uni Afrika	88
4.2.2 Hubungan China Afrika	93
4.3 Kebijakan Luar Negeri China terhadap Konflik Darfur	96
4.4 Signifikansi Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal dalam Kebijakan Luar Negeri China terhadap Konflik Darfur	102
BAB 5: PENUTUP	108
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



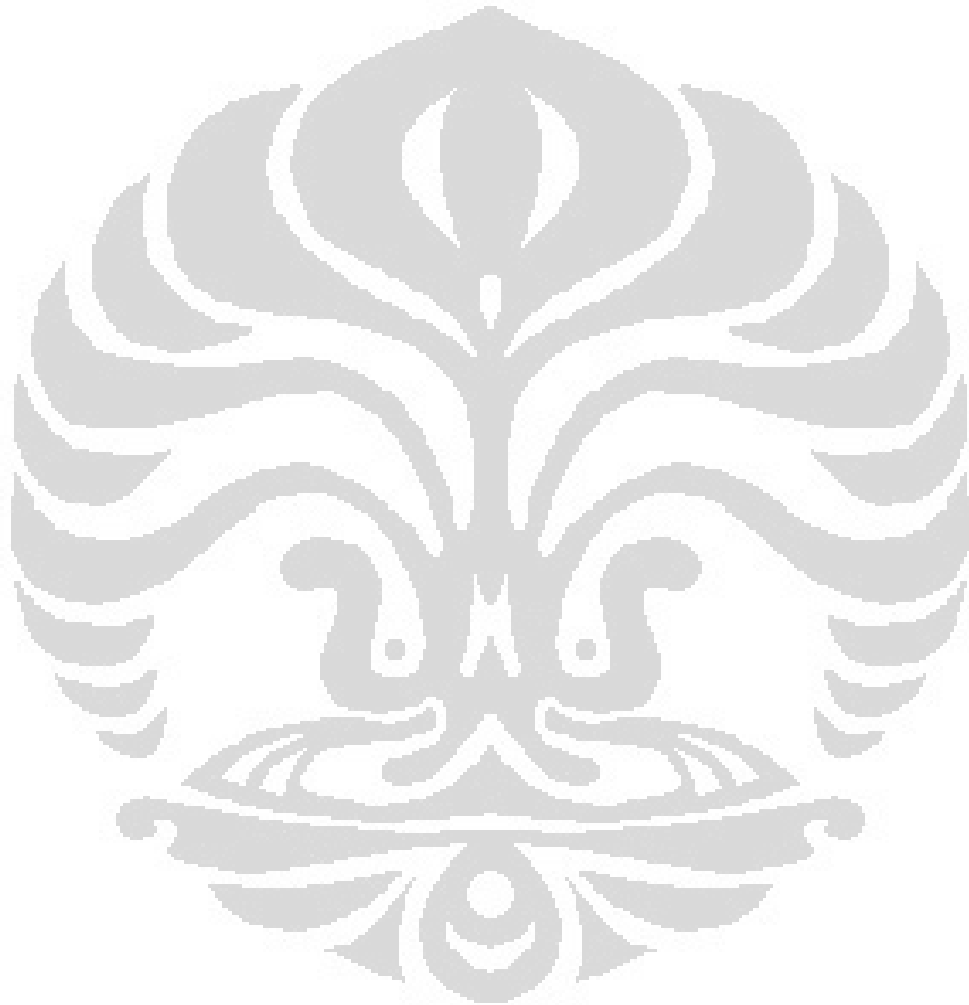
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel

Tabel 1.1 Negara Konsumen Minyak Terbesar Dunia.....	8
Tabel 1.2 Negara Importir Minyak China.....	9
Tabel Negara Afrika Impor Minyak ke China	67
Tabel Eksplorasi dan Produksi Asset CNPC di Sudan	79

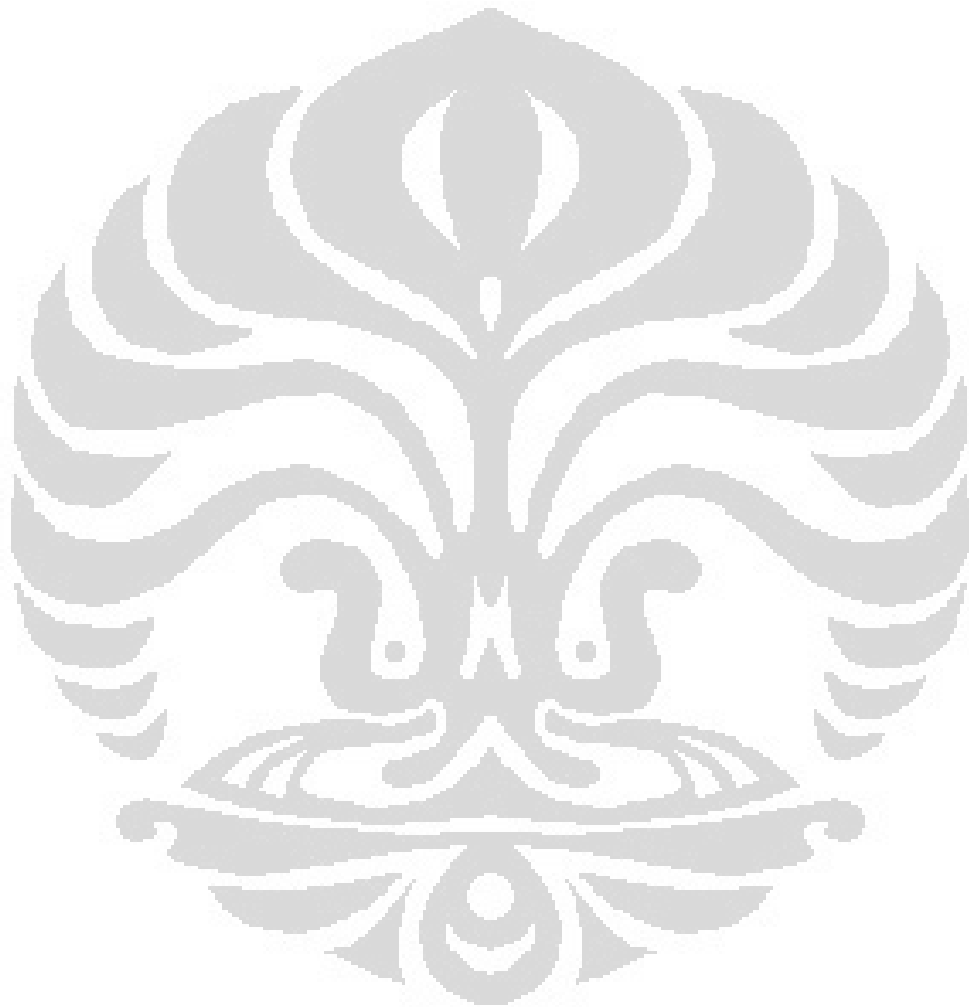
Gambar

Gambar Peta Darfur	36
Gambar Diagram 3.1 Negara Afrika Impor ke China.....	65
Gambar Diagram 3.2 Impor Afrika ke China	66
Gambar Diagram 3.3 Ekspor Minyak Sudan ke China.....	69
Gambar Peta Blok Ladang Minyak di Sudan.....	78



DAFTAR SINGKATAN

- CPA** : Comprehensive Peace Agreement, perjanjian perdamaian Utara-Selatan
- DIA** : Defense Intelligence Agency
- DPA** : Darfur Peace Agreement, perjanjian perdamaian Darfur
- DLF** : Darfur Liberation Front, awal nama kelompok dari SLM/A
- ICC** : International Criminal Court
- JEM** : Justice and Equality Movement, kelompok pemberontak Darfur
- NIF** : National Islamic Front, partai politik Sudan
- PDF** : Popular Defence Force, pasukan militer nasional Sudan
- SLM/A** : Sudan Liberation Movement/Army, kelompok pemberontak Darfur
- SPLM/A** : Sudan People's Liberation Movement/Army, kelompok pemberontak dari Sudan Selatan
- UA** : Uni Afrika
- UE** : Uni Eropa
- UNHCR** : United Nations High Commission for Refugees
- WFP** : World Food Program of the UN
- WHO** : World Health Organization



Bab 1

Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Pada bulan Agustus 2008, China untuk pertama kalinya menjadi penyelenggara olahraga Olimpiade musim panas. Bagi China, kesempatan untuk menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional ini dapat menjadi kesempatan untuk China menunjukkan perkembangan dan kehebatan China di hadapan dunia. Namun di sisi lain, kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh beberapa negara dan organisasi-organisasi internasional untuk mengangkat isu-isu kemanusiaan yang terkait dengan China, salah satunya adalah konflik Darfur yang terjadi di Sudan pada tahun 2003.

Konflik Darfur dikaitkan dengan China, hal ini tak terlepas dengan keberhasilan China menjalin hubungan perdagangan dengan banyak negara di kawasan Afrika dan khususnya di Sudan. Sehingga China dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang mana China diharapkan dapat memainkan pengaruhnya dalam persoalan-persoalan itu.

Benua Afrika merupakan salah satu kawasan yang paling sering dilanda konflik dan peperangan. Sebagian besar konflik yang terjadi di Afrika merupakan konflik internal dalam wilayah suatu negara. Faktor-faktor penyebab dan dinamika konflik di Afrika sangat beragam dan kompleks. Dalam kasus Sudan, secara umum faktor penyebab terjadinya konflik adalah gagalnya proses integrasi dalam pembentukan negara bangsa.

Sudan yang terletak di kawasan Tanduk Afrika sejak merdeka pada tanggal 1 Januari 1956 hingga abad 21, sering dilanda konflik-konflik internal yang berkepanjangan. Konflik-konflik kecil sampai perang Saudara telah dialami Sudan. Salah satu contoh konflik internal yang sudah berlangsung lama adalah konflik di Sudan Selatan yang muncul pada tahun 1955. Konflik-konflik yang

terjadi, terutama disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan yaitu kebijakan pemisahan oleh pemerintahan kolonial, diskriminasi politik, kesenjangan ekonomi dan perebutan sumber daya serta penerapan syariat Islam. Konflik di Darfur baru bereskalasi pada tahun 2003, namun faktor-faktor penyebab konflik berupa diskriminasi ekonomi dan politik telah lama berlangsung.

Ketika proses perundingan damai Utara Selatan sedang mencapai momentumnya, konflik justru berkembang di Darfur yang terletak di bagian barat Sudan.¹ Dimensi kemanusiaan yang terjadi dalam konflik ini menjadikan Darfur pusat perhatian dunia internasional.

Secara historis, Darfur dikuasai oleh suku Arab di bagian Utara Darfur dan di Selatan Darfur dikuasai oleh suku Afrika. Konflik-konflik sering terjadi di masa lalu dan pada umumnya merupakan konflik akan perebutan air, tanah dan sumber-sumber alam lainnya. Pada tahun 1980an, Pemerintah Sudan membentuk pemerintahan lokal di kawasan itu untuk menyelesaikan masalah konflik yang sering terjadi dan mempersenjatai suku-suku yang menunjukkan kesetiiaannya terutama suku-suku Arab, terhadap pemerintah pusat di Khartoum.² Tapi pada akhirnya, pemerintahan lokal tidak dapat membantu rakyat Darfur untuk mencegah terjadinya konflik.

Pada bulan Februari 2003 keadaan di Darfur kembali memburuk dengan munculnya kelompok-kelompok pemberontak anti pemerintahan Sudan yang melakukan aksi militer. Para pemberontak bersenjata itu terorganisir dalam Sudan Liberation Movement/Amy dan Justice and Quality Movement (JEM). Mereka melakukan penyerangan ke markas-markas tentara pemerintah. Tuntutan mereka adalah agar pemerintah pusat memperbaiki perekonomian Darfur, menentang

¹ *Investing in Tragedy: China's Money, Arms, and Politics in Sudan*, <http://www.humanrightsfirst.info/pdf/080311-cah-investing-in-tragedy-report.pdf> , diakses pada tanggal 9 Juli 2008

² *Ibid.*

adanya keberpihakan pemerintah terhadap suku-suku Arab dan menolak perjanjian Utara Selatan.³

Pemerintah Sudan memberikan reaksi dengan melakukan serangan balasan terhadap para pemberontak. Dalam memberantas gerakan pemberontakan ini, pemerintah Sudan kembali mempersenjatai suku-suku Arab yang setia terhadap pemerintah. Suku Arab yang telah dipersenjatai ini disebut dengan Janjaweed. Janjaweed bertugas untuk melakukan penyerangan melalui jalur darat sedangkan militer Sudan menyerang dari udara terhadap desa-desa di Darfur yang diduga terdapat para anggota pemberontak.⁴

Peperangan antara pemberontak dengan milisi Janjaweed serta tentara pemerintah menimbulkan krisis yang sangat memprihatinkan. Milisi Janjaweed melakukan penyerangan bukan saja kepada para pemberontak tapi juga kepada penduduk sipil yang dituduh sebagai simpatisan atau melindungi pemberontak. Mereka melakukan pembunuhan, pemerkosaan, penganiyaan serta pembakaran pemukiman penduduk sipil.⁵

Konflik Darfur menjadi pusat perhatian dunia internasional terutama karena dampak yang ditimbulkan terhadap rakyat Darfur. Ratusan ribu penduduk sipil meninggal, diperkosa, rumah-rumah dibakar dan menjadi pengungsi akibat konflik sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan krisis kemanusiaan. Hingga pertengahan Oktober 2004 diperkirakan sekitar 1,8 juta penduduk harus meninggalkan tempat tinggalnya akibat konflik.⁶ Sekitar 1,6 juta dari mereka berpindah ke wilayah-wilayah lain di Sudan, sementara sekitar 200.000 warga sipil mengungsi ke negara tetangga terdekat, Chad. Pada bulan Oktober 2004,

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Sudan Darfur in Flames: Atrocities in Western Sudan*, <http://www.hrw.org>, diakses pada tanggal 29 Juli 2008

⁶ Ted Dagne, *Sudan: Humanitarian Crisis, Peace Talks, Terrorism and US Policy*, <http://www.fas.org/man/crs/IB98043>, diakses pada tanggal 18 November 2008

WHO memperkirakan sekitar 70.000 dari para pengungsi meninggal dalam enam bulan terakhir akibat kekurangan gizi dan wabah penyakit.⁷

Dunia internasional mengutuk keras konflik ini dan menekan pemerintah Sudan agar melakukan perundingan damai dengan pemberontak dan melucuti persenjataan milisi Janjaweed. Tapi Pemerintah Sudan dianggap oleh dunia internasional terutama yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, gagal dalam mengatasi konflik ini karena penindasan terhadap rakyat Darfur masih berlangsung. Sehingga China pun diharapkan oleh dunia internasional agar dapat berperan lebih aktif untuk mempengaruhi Pemerintah Sudan dalam mengatasi konflik ini.

Namun China melihat konflik di Darfur sebagai masalah internal dari suatu negara dan menerapkan kebijakan luar negeri *non interference* yang merupakan salah satu dari lima prinsip hidup berdampingan dengan secara damai yang menjadi pilar dari Kebijakan Luar Negeri China. Sedangkan sebagian besar negara-negara lain dan organisasi-organisasi kemanusiaan menilai bahwa kebijakan *non interference* hanya digunakan sebagai pelindung untuk menjaga kepentingan China di Sudan, yaitu energi, khususnya minyak.⁸

Sanksi internasional kemudian dinilai kurang efektif dapat menekan Pemerintah Sudan bila ada faktor China yang dianggap melindungi Pemerintah Sudan.⁹ Sehingga komunitas internasional bereaksi kritis terhadap China dengan menekan China melalui media massa internasional dengan menghubungkan minyak Sudan yang diimport ke China sebagai pertukaran dengan senjata *made in* China yang digunakan oleh milisi *Janjaweed* untuk membunuh rakyat Darfur, dan mengajak para pemimpin dunia untuk memboikot Olimpiade Beijing sebagai reaksi atas ketidakmauan China bersikap keras terhadap Pemerintah Sudan.

⁷ Scott Strauss, "Darfur and the Genocide Debate", *Foreign Affairs*, Vol. 8 Januari/Februari 2005, hal. 42

⁸ Yitzhak Shichor, *Sudan: China's Outpost in Africa*, <http://www.asianresearch.org/articles/2754.html>, diakses pada tanggal 2 Juli 2008

⁹ *Ibid.*

Sejak Cina mulai mereformasi perekonomiannya, negara itu telah tumbuh dengan angka berkisar 9,5%. Bukan merupakan hal yang tidak wajar bila suatu negara pada tahap-tahap awal reformasi perekonomiannya sering kali naik cepat, tetapi Cina berbeda. Negara ini berhasil dalam waktu tiga puluh tahun meningkatkan perekonomiannya menjadi berkali lipat, hampir tiga kali lebih. Sehingga pertumbuhan ekonomi Cina dianggap sebagai fenomena karena kenaikan angka pertumbuhan itu tidak ada duanya dalam sejarah modern.¹⁰

Fenomena kemajuan ekonomi Cina ditanggapi secara berbeda-beda oleh dunia internasional. Sebagian ada yang memandang fenomena ini sebagai hal yang positif karena kebangkitan Cina (*the Rise of China*) diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara di sekitarnya dan negara lain yang menjalin hubungan kerjasama ekonomi dengan Cina. Kebangkitan ini juga diharapkan agar Cina dapat menjadi kekuatan penyeimbang terhadap dominasi Amerika Serikat di kawasan Asia. Di lain pihak banyak juga yang memandang kebangkitan ini sebagai ancaman. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran bahwa dengan meningkatnya perekonomian Cina maka pangsa pasar dikuasai oleh Cina sehingga justru kebangkitan Cina ini merugikan pertumbuhan ekonomi bagi negara lain. Dalam segi militer, ada juga timbul kekhawatiran bahwa Cina akan menjadi ancaman bagi negara-negara sekitarnya, mengingat menguatnya kekuatan militer bersamaan dengan kebangkitan ekonomi Cina itu. Selain kekhawatiran ancaman ekonomi dan militer, budaya China juga dianggap oleh beberapa negara sebagai suatu yang mengancam. Sejarah mencatat bahwa penyebaran budaya merefleksikan penyebaran kekuasaan di dunia,¹¹ dan budaya China telah mudah menyebar di beberapa negara dan kawasan bersamaan dengan masuknya imigran China yang datang ke negara atau kawasan itu.

¹⁰ Ted C. Fishman, *China Inc: Bagaimana Kedigdayaan China Menantang Amerika dan Dunia*, Alih bahasa: Mariantono, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hal xxii

¹¹ Samuel Huntington, *The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order*, (New York: Simon&Schuster, 1996), hal. 141

Menyikapi isu yang terkait dengan ancaman, China bereaksi melalui kebijakan luar negerinya dengan menampilkan bahwa kebangkitan China memiliki tujuan damai dan menjadi prioritas utama bagi China saat ini. Pada tahun 2005, Presiden China, Hu Jintao memperkenalkan konsep *Harmonious World (hexie shijie)* yang kemudian dijadikan sebagai *cornerstone* Kebijakan Luar Negeri China. Inti dari konsep itu adalah: Pertama, mempererat kemitraan dengan negara-negara maju. Kedua, membangun kerjasama multilateral dan regional yang kuat dan efektif serta terlibat aktif di dalamnya. Ketiga, mengembangkan kesejahteraan untuk semua pihak melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Keempat, toleransi dan meningkatkan dialog antar beragam masyarakat dunia.¹² Dengan adanya konsep *Harmonious World*, maka China ingin menggarisbawahi bahwa China bukan merupakan ancaman dan tidak mencari hegemoni melainkan kesejahteraan yang saling menguntungkan.

Konsep tersebut sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip Kebijakan Luar Negeri China yang dicetuskan lima puluh tahun yang lalu, namun sampai saat ini masih menjadi pilar bagi Kebijakan Luar Negeri China yaitu lima prinsip hidup berdampingan dengan secara damai (*five principles of peaceful coexistence*). Kebijakan Luar Negeri China terhadap Afrika berlandaskan juga pada prinsip ini.

Prinsip hidup berdampingan dengan secara damai pertama kali digunakan untuk membangun hubungan antara China dan India pada tahun 1954. Kemudian lima prinsip ini diadaptasi oleh negara-negara Asia Afrika di Konferensi Bandung 1955. Konferensi Bandung Asia Afrika merupakan suatu peristiwa sejarah yang sangat penting karena tidak hanya konferensi ini telah menjadi fondasi terbentuknya hubungan China dan negara-negara Afrika, juga konferensi ini telah menjadi tempat di mana negara-negara dapat mempromosikan anti imperialisme dan antikolonialisme. Sehingga keterlibatan China di Afrika pada masa itu, berdasarkan karena adanya persamaan prinsip dengan negara-negara Afrika yang dimulai dari Konferensi Bandung. China mulai membangun hubungan dan

¹²Ingrid d'Hooghe, *The Rise of China's Public Diplomacy*, http://www.clingendael.nl/publications/2007/20070700_cdsp_paper_hooghe.pdf, diakses pada tanggal 28 Agustus 2008

menawarkan bantuan ekonomi, teknis dan militer untuk membantu negara-negara Afrika membangun negeri dan lepas dari imperialisme dan kolonialisme.¹³

Bersamaan dengan kemajuan ekonomi China, hubungan perdagangan antara China dan negara-negara Afrika juga meningkat. China merupakan mitra dagang Afrika yang ketiga terbesar setelah Amerika Serikat (AS) dan Perancis. Pada tahun 1999, nilai perdagangan China Afrika adalah sebesar \$2 Milyar, tahun 2004 meningkat menjadi \$29,6 Milyar dan pada tahun 2005, angka itu naik menjadi \$39,7 Milyar.¹⁴ Salah satu faktor yang menjadi pendorong China meningkatkan ekspansi ke Afrika adalah keinginan untuk mendapatkan sumber-sumber daya alam dan energi yang dapat menunjang pertumbuhannya.¹⁵ Keberhasilan China membangun kerjasama ekonomi di banyak negara di benua Afrika juga menjadi perhatian negara-negara lain, khususnya Amerika Serikat. Namun kepentingan energi China di Afrika, khususnya minyak, yang pada umumnya lebih menjadi sorotan bagi negara-negara Barat.

China merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap energi. China telah menjadi negara pengonsumsi minyak kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat (AS), yaitu dengan menghabiskan sekitar 7 juta barel per hari yang mana sebelumnya hanya sekitar 5 juta barel per hari. Data lengkap dapat dilihat dalam tabel 1.1.

¹³David C. Kang, *China Rising: Peace, Power and Order in East Asia*, (New York: Columbia University Press, 2007), hal. 84-85

¹⁴Ian Taylor, *Unpacking China's Resource Diplomacy in Africa*, <http://www.cctr.us.hk/> diakses tanggal 27 Oktober 2008

¹⁵*Ibid.*

Tabel 1.1
Negara Konsumen Minyak Terbesar Dunia
(dalam ribuan barrel per hari)

Ranking Negara Konsumen Minyak tahun 2002 dan 2006

Rank	Negara	Konsumsi 2002	Negara	Konsumsi 2006
1	Amerika Serikat	19.800	Amerika Serikat	20.588
2	Jepang	5.300	China	7.274
3	China	5.200	Jepang	5.222
4	Jerman	2.700	Rusia	3.103
5	Rusia	2.600	Jerman	2.630
6	India	2.200	India	2.534
7	Korea Selatan	2.200	Kanada	2.218
8	Brazil	2.200	Brazil	2.183
9	Kanada	2.100	Korea Selatan	2.157
10	Perancis	2.000	Saudi Arab	2.068

Sumber: Situs Informasi Energi Administrasi, www.eia.doe.gov

Dalam memenuhi kebutuhan energinya, China mendapatkannya dari dalam negeri. Namun persediaan energi yang ada itu, hampir semuanya adalah bersumber dari batu bara sedangkan persediaan minyak hampir setengahnya harus didatangkan melalui import. Meskipun China adalah negara yang sangat luas wilayahnya, belum ditemukannya ladang minyak dalam skala besar yang melimpah.

Jika China ingin melipatkalilipatkan pertumbuhannya sebelum tahun 2020 maka sumber energinya yang sudah ada harus dikembangkan sedangkan sumber energi baru harus dicari dari luar negerinya. China mengikuti jejak AS dan Jepang yang persediaan energinya diimpor, khususnya minyak bumi.¹⁶

¹⁶ Henry Lee & Dan Shalmon, "Searching for Oil: China's Initiatives in The Middle East", *Environment*, Vol 49, Issue 5, Juni 2007, hal. 9

China mulai mencari cadangan minyak melalui tiga sumber, yaitu: Pertama, negara tetangga seperti Rusia dan Kazakhstan. Kedua, negara-negara produsen minyak yang kurang dilirik oleh negara Barat, seperti Yaman, Oman dan beberapa negara Afrika. Ketiga, negara minyak yang memiliki hubungan sejarah politik yang tidak baik dengan Eropa dan Amerika, seperti Sudan dan Iran. Tabel 1.2 berikut ini menunjukkan beberapa negara yang menjadi pengimpor minyak ke Cina.

Tabel 1.2
Negara Importir Minyak China
Tahun 2003-2004¹⁷

Wilayah & top three suppliers	Persentase total persediaan	
	2003	2004
TIMUR TENGAH	50.9	45.4
Saudi Arab	16.7	14.0
Oman	10.2	13.3
Iran	13.6	10.8
Sub Sabara AFRIKA	24.3	28.7
Angola	11.1	13.2
Sudan	6.9	4.7
Congo	3.7	3.9
EROPA & AMERIKA LATIN	9.6	14.3
Rusia	5.8	8.8
Norwegia	1.0	1.6
Brazil	0.1	1.3
ASIA PASIFIK	15.2	11.5
Vietnam	3.8	4.4
Indonesia	3.7	2.8
Malaysia	2.2	1.4

Sumber: Zweig & Bi Jianhai

¹⁷ David Zweig & Bi Jianhai, "China's Global Hunt for Energy", *Foreign Affairs*, Vol 84, No 5, hal.28

Dalam tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Sudan merupakan salah satu yang termasuk dalam jaringan impor energi China di wilayah Sub Sahara Afrika. Sudan menempati posisi kedua negara importir minyak ke China setelah Angola.

Sejarah hubungan antara China dan Sudan dimulai ketika pada tahun 1959 keduanya membuka hubungan diplomatik. Dalam perkembangannya, hubungan ini dipengaruhi oleh keadaan politik luar negeri Sudan di tahun 1990an, perang saudara yang terjadi di bagian Sudan Selatan dan hubungan perdagangan. Pada tahun 1989, Kelompok Depan Nasional Islam (*National Islamic Front / NIF*) menguasai kursi pemerintahan Sudan. Kelompok ini oleh Amerika Serikat dan Eropa dihubungkan dengan gerakan teroris karena diduga melakukan pemusnahan terhadap etnis Sudan non Arab, usaha pembunuhan Presiden Mesir dan mendukung Saddam Husein ketika Perang Teluk 1991 berlangsung.

Untuk mengisolasi Sudan dan mencoba untuk mengubah perilakunya, Amerika Serikat melarang segala impor, ekspor dan investasi ke negara itu. Selain itu, Amerika Serikat juga telah mencoba untuk melibatkan dukungan negara-negara Eropa, Jepang dan negara-negara lain dalam pemboikotan ini.¹⁸ Namun Cina bukan merupakan negara yang ikut dalam pemboikotan itu, justru situasi ini dimanfaatkan oleh kedua pihak yaitu China dan Sudan, untuk meningkatkan kerjasama.

Bagi Sudan, China merupakan sekutu politik yang satu-satunya saat itu dapat membantu Sudan dari krisis keuangan akibat perang yang terus terjadi di Sudan. Oleh karena itu, Sudan menawarkan investasi minyak dan sumber-sumber energi lainnya kepada China. China pun menyambut baik kerjasama ini. Meskipun situasi politik dan ekonomi Sudan yang tidak aman dan beresiko tinggi berdasarkan kalkulasi China, Sudan secara geografis, merupakan negara terbesar di Afrika yang memiliki potensi sumber daya alam yang kaya yang belum diolah dan keuntungan lain, keluarnya perusahaan-perusahaan Barat dari Sudan dikarenakan sanksi mereka terhadap Sudan, sehingga berkurangnya kompetisi

¹⁸ Peter Navarro, *The Coming China Wars*, (New Jersey: Pearson Education Inc., 2007), hal. 83-84

bisnis dari pihak Barat menjadi alasan yang kuat untuk China memperluas kerjasama dengan Sudan.

Tiga belas dari lima belas perusahaan besar asing yang beroperasi di Sudan adalah milik perusahaan asal China, terutama dalam sektor industri minyak. *China National Petroleum Corporation* (CNPC) memiliki saham sebesar 40 % di salah satu perusahaan milik Sudan yaitu *Greater Nile Petroleum Operating Company* dan dapat mengeksplorasi minyak sebanyak lebih dari 300.000 barrel per hari. Sinopec, salah satu perusahaan China lainnya, membangun jalur pipa minyak sepanjang 1500 kilometer menuju Pelabuhan Sudan di Laut Merah. Untuk penjualan ekspor minyak ke China, Sudan dapat menghasilkan \$2 milyar per tahun.¹⁹ Selain dalam sektor minyak, China juga merupakan *supplier* senjata untuk Pemerintah Sudan. Pada tahun 2005, China dilaporkan telah menjual persenjataan dan amunisi kepada Sudan dengan harga \$24 juta.²⁰

Setelah konflik Darfur meletus, China kembali menjadi sorotan dunia dan kali ini konflik Darfur telah membuat hubungan China dengan Sudan yang menjadi sorotan dunia internasional. Hal ini dikarenakan China merupakan mitra dagang terbesar bagi Sudan sehingga China dituntut untuk lebih memperhatikan tentang konflik ini dan dapat menekan Pemerintah Sudan agar lebih mempercepat proses perdamaian di Darfur dan tidak mengabaikan rakyat Darfur yang menjadi korban dalam konflik ini.

Pemerintah Sudan sendiri menolak tuduhan dari dunia internasional bahwa Pemerintah Sudan telah gagal mengatasi konflik di Darfur dan dalam penanganan rakyat Darfur sehingga diperlukannya badan Internasional dan PBB untuk turun tangan dalam penanganan konflik ini. Pemerintah Sudan justru balik memperingatkan bahwa kehadiran PBB dan badan internasional lainnya hanya akan memperkeruh keadaan di Darfur karena Pemerintah Sudan tidak akan menjamin keselamatan mereka. Selain itu, adanya kekhawatiran dari Pemerintah

¹⁹ Bates Gill & James Reilly, "The Tenuous Hold of China Inc. in Africa", *The Washington Quarterly*, Vol.30, No.3, Summer 2007, hal. 40

²⁰ Ted Dagne, *Loc. Cit.*, hal. 3

Sudan bahwa intervensi kemanusiaan yang dibawa atas nama bendera PBB hanya merupakan siasat dari Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa untuk mengganti pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh Omar Al Bashir dan mengubah sistem pemerintahan yang dianggap sebagai rezim otoriter, menjadi pemerintahan yang demokratis. Mengingat AS merupakan negara yang paling bersuara keras tentang krisis kemanusiaan yang terjadi di Darfur, bahkan AS juga menyebutkan bahwa telah terjadi pemusnahan massal terhadap suatu golongan tertentu atau genosida yang dilakukan oleh Pemerintah Sudan,²¹ dan AS yang dipimpin oleh George W. Bush pernah menghancurkan rezim seperti yang dilakukan terhadap Irak. Oleh karena itu, kekhawatiran-kekhawatiran semacam itu timbul.

Asumsi lain mengatakan bahwa kepentingan AS di Sudan berkaitan dengan membentuk kerja sama antiterorisme yang dikampanyekan oleh AS. Meskipun di masa lalu AS memasukkan Sudan sebagai salah satu negara “Poros Kejahatan” dikarenakan Sudan mendukung gerakan-gerakan teroris internasional, tidak tertutup kemungkinan AS ingin menjadikan Sudan sebagai mitra kerja sama dalam perang melawan teroris.²² Hal ini tentu menjadi polemik tersendiri baik bagi Sudan maupun kepentingan-kepentingan negara lain di Sudan dan Afrika.

1.2 Pokok Permasalahan

Mencermati perkembangan konflik Darfur yang terjadi dan semua permasalahannya, maka konflik Darfur dapat menjadi ujian penting bagi Kebijakan Luar Negeri China yang memiliki hubungan perdagangan terbesar dengan Sudan. Dampak tragedi Darfur telah menempatkan China dalam posisi dilematis. Di satu sisi, China melihat bahwa konflik Darfur merupakan urusan dalam negeri dari Sudan sehingga tidak ingin terlalu terlibat. Di sisi lain, China ingin menampilkan gambaran China yang menjalin hubungan baik dengan semua

²¹ *Profil Omar Al Bashir*, <http://www.dw-world.de/dw/article.html>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2008

²² J. Stephen Morrison, “Somalia’s and Sudan’s Race to the Fore in Africa”, *The Washington Quarterly*, Spring 2002, hal. 204

negara, termasuk Sudan dalam kerja sama perekonomian dan perdagangan, dan dengan negara-negara lain yang menuntut agar China menekan Pemerintah Sudan. Gambaran China yang menjalin hubungan dengan semua pihak menjadi semakin lebih penting, terlebih China menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan musim panas Olimpiade 2008 sehingga prestise China dipertaruhkan bagaimana China berperan dalam menangani konflik ini, dan konflik Darfur ini dapat dengan mudah membentuk opini tentang China karena diliput secara luas oleh media massa internasional.

Namun China juga tidak bisa mengenyampingkan masalah kepentingan energi dan ekonomi, dan penghargaan China terhadap kedaulatan dan prinsip *non interference*. Sehingga ada Kepentingan Nasional China yang juga dipertaruhkan.

Berdasarkan pada penjabaran diatas maka tesis ini akan mempertanyakan: **Bagaimanakah Kebijakan Luar Negeri China terhadap konflik Darfur?** Periode pengamatan yang digunakan adalah dari tahun 2004-2007.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: menjelaskan Kebijakan Luar Negeri China terhadap konflik Darfur.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini, antara lain:

1. Memberikan pemahaman mengenai Kebijakan Luar Negeri China.
2. Memberikan pemahaman tentang keamanan energi, prinsip *non interference* dan hubungan China Afrika serta pengaruhnya terhadap Kebijakan Luar Negeri China.
3. Memberikan sumbangan pemikiran atau masukan bagi pembaca atau pihak-pihak lain yang ingin meneliti tentang Kebijakan Luar Negeri China, khususnya mengenai konflik krisis kemanusiaan di luar negara China.

1.5 KERANGKA PEMIKIRAN

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan studi kepustakaan yang telah dilakukan, belum ada tulisan yang secara khusus membahas tentang kebijakan luar negeri China terhadap konflik Darfur. Pada umumnya literatur membahas tentang hubungan energi China Sudan atau konflik Darfur itu sendiri. Kalaupun membahas tentang kebijakan luar negeri China terhadap konflik Darfur lebih hanya mengambil dari satu sisi saja dan literatur yang membahas tentang kebijakan itu lebih banyak mengambil kebijakan yang pada intinya sama.

Hubungan China Sudan dapat dibedakan antara dua periode. Hal ini seperti yang ditekankan oleh Ali Abdalah Ali. Ali menjelaskan bahwa untuk memahami hubungan antara China dengan Sudan maka perlu melihat sejarah hubungan dari kedua negara itu.²³ Ali membedakan antara hubungan sebelum dan sesudah periode minyak. Dalam tulisan ini disimpulkan bahwa hubungan ekonomi antara China dengan Sudan tidak terlalu signifikan di periode sebelum minyak. Pada awal hubungan, China tidak terlalu menganggap hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Sudan penting karena hubungan itu baru sebatas pada hubungan tahap negosiasi dan perjanjian. Kalaupun ada perdagangan, sifatnya hanya pada jenis dan jumlah tertentu dan tidak ada usaha untuk meningkatkan perdagangan itu. Namun hubungan itu berubah sejak ditemukannya ladang minyak di Sudan, dan semakin menguat hubungan itu ketika perusahaan China menjadi operator pada salah satu ladang minyak di Sudan. Sejak itu hubungan kedua negara dibawa ke arah yang lebih terstruktur dan komprehensif. Namun bila ingin melihat pola kebijakan luar negeri China terhadap konflik Darfur dapat dibandingkan dengan kebijakan luar negeri China terhadap krisis nuklir Iran.

China disebutkan bahwa sengaja membangun hubungan dengan negara-negara yang memiliki hubungan tidak baik dengan Barat untuk menguasai sumber energi yang terdapat pada negara-negara itu. Diantara negara itu yang disebutkan

²³ Dikutip dari Daniel Large, *Sudan's Foreign Relations With Asia*, <http://www.cmi.no/sudan/doc/?id=937>, diakses pada tanggal 24 Juli 2008

selain Sudan, juga Iran. Sehingga ketika krisis nuklir Iran terjadi maka China juga dihadapkan pada persoalan-persoalan antara menjaga kepentingan energi China dan nonproliferasi dengan pemberian dukungan terhadap intervensi PBB ke Iran. Menurut Dingli Shen, terdapat lima hal yang menjadi pertimbangan China dalam mengeluarkan kebijakan luar negerinya dalam kasus nuklir Iran.²⁴ Pertimbangan tersebut adalah penghormatan terhadap hak Iran untuk mengembangkan program nuklir sebagai pembangkit tenaga listrik. Hal ini berdasarkan pada prinsip menghormati kedaulatan dari suatu negara. Selain itu ada juga pertimbangan pada perjanjian Traktat Non Proliferasi Nuklir, menjaga hubungan energi dan ekonomi dengan Iran, menjaga hubungan dengan AS dan menjaga *image* China di dunia internasional.

1.5.2 Kebijakan Luar Negeri

Negara merupakan unit dari sistem internasional sehingga politik internasional dapat dijelaskan sebagai situasi yang berlangsung dimana suatu negara menekankan pada kepentingan nasional. Dalam sistem internasional merupakan suatu kewajiban bagi negara untuk memberikan tanggapannya sesuai dengan kepentingan nasionalnya masing-masing, atas situasi dan berbagai tujuan nasional yang diinginkan oleh negara lain.²⁵ Kepentingan nasional merupakan keseluruhan nilai yang hendak diperjuangkan atau dipertahankan dalam forum internasional. Sering dikatakan bahwa kepentingan nasional merupakan kunci dalam politik luar negeri.

Politik luar negeri suatu negara berarti pencapaian tujuan-tujuan yang dicapai di luar batas yuridiksi nasional. Esensi dari politik luar negeri merupakan rencana dan kebijakan-kebijakan yang ditujukan kepada tujuan yang satu, yaitu perwujudan kepentingan nasional demi mempertahankan kelangsungan hidup

²⁴ Dingli Shen, "Iran's Nuclear Ambitions Test China's Wisdom", *The Washington Quarterly*, spring 2006, hal.56

²⁵ Soeprapto, *Hubungan Internasional: Sistem Interaksi dan Perilaku*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 143

negara. Sehingga kepentingan nasional sering juga dipakai sebagai alat untuk menganalisa kebijakan luar negeri.

Banyak pakar yang mendefinisikan tentang kebijakan luar negeri. Secara sederhana, kebijakan luar negeri dipandang sebagai refleksi kepentingan dalam negeri yang akan dipromosikan ke luar negeri.²⁶ Hasil dari kebijakan luar negeri biasanya merupakan tindakan atau gagasan yang dirancang untuk memecahkan masalah atau mempromosikan sesuatu.

Tindakan didefinisikan sebagai hal-hal yang dilakukan oleh suatu pemerintahan terhadap pemerintahan lainnya dalam rangka menjalankan orientasi atau peranan tertentu untuk mencapai atau mempertahankan tujuan-tujuannya.²⁷ Dalam politik internasional, tindakan mempunyai banyak bentuk, seperti diplomasi, negosiasi, janji untuk memberikan bantuan luar negeri, propaganda, penggunaan hak veto dalam Dewan Keamanan PBB dan lain-lain. Agar tindakan-tindakan itu berjalan sesuai dengan keinginan maka kemampuan untuk mempengaruhi sangat penting.

Menurut Holsti, proses politik internasional bermula ketika suatu pemerintahan berusaha mengubah atau memperpanjang tingkah laku negara-negara lainnya. Oleh karena itu, kekuasaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara untuk mengontrol tingkah laku negara lainnya.²⁸

Keputusan menentukan dan melaksanakan tindakan dalam politik luar negeri dipengaruhi oleh faktor-faktor internal/domestik dan eksternal. Menurut Lentner, faktor domestik mengacu pada kondisi di dalam negeri termasuk kondisi sumber daya, geografis, budaya dan jumlah penduduk, dan faktor eksternal mengacu pada keadaan sistem internasional dan situasi pada suatu waktu.²⁹

²⁶ Kirdi Dipoyudo, "Aspirasi Perdamaian: Garis-garis Besar Politik Luar Negeri Indonesia", *Analisis CSIS*, tahun XVIII, No. 1, Januari – Februari 1989, hal. 47

²⁷ K.J Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis*, (New Jersey: Prentice Hall Inc., 1992), hal. 116

²⁸ *Ibid.*, hal. 117

²⁹ Howard H. Lentner, *Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach*, (Ohio: Charles Meril Publishing Co., 1974), hal 105 -136

Sedangkan Holsti mengemukakan terdapat lima komponen yang termasuk dalam faktor eksternal, yaitu struktur sistem, sifat dari perekonomian dunia, tindakan dan kebijakan dari Negara lain, masalah-masalah global dan regional, dan hukum internasional dan opini dunia.³⁰ Dalam faktor domestik yang dapat dilihat adalah kebutuhan keamanan terhadap sosial ekonomi, karakteristik geografis, atribut nasional, struktur pemerintahan, opini publik dalam negeri, birokrasi dan pertimbangan etik.

Faktor-faktor yang mendasari dan menentukan rencana-rencana keputusan kebijakan luar negeri bukan hanya yang telah disebutkan saja tapi masih banyak pertimbangan-pertimbangan lain. Namun pada umumnya pokok permasalahan dalam penentuan kebijakan luar negeri dititikberatkan pada usaha untuk memecahkan berbagai persoalan yang berhubungan dengan dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam kaitannya dengan Kebijakan Luar Negeri China, maka China tidak memiliki strategi keamanan nasional jangka panjang yang dijabarkan secara eksplisit. Tapi China lebih sering membuat karakter terhadap kebijakan luar negerinya dan sasaran keamanan nasionalnya dalam bentuk prinsip-prinsip dan slogan,³¹ seperti *Harmonious World* dan *China's peaceful rise*. Namun apapun karakter dari kebijakan luar negeri itu, inti dari tujuan Kebijakan Luar Negeri China sama yaitu:

1. Mempertahankan kemerdekaan Cina, kedaulatan dan integritas wilayahnya
2. Perkembangan ekonomi
3. Prestise dan status

Tujuan itu menjadi landasan dalam China meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan modernisasi. Dikarenakan China membutuhkan lingkungan

³⁰ K.J Holsti, *Op.Cit.*, hal. 272

³¹ C. Fred Bergsten (et al.), *China: The Balance Sheet: What The world Needs To Know About The Emerging Superpower*, (New York: Public Affairs, 2006), hal. 118

internasional yang damai dan stabil untuk pertumbuhan ekonominya, maka sebisa mungkin China menghindari konflik-konflik dan ketergantungan kepada satu negara atau kawasan, dan lebih memilih kepada perluasan dan penguatan hubungan luar negeri.³²

Di satu sisi, China juga menekankan bahwa Kebijakan Luar Negeri China yang dikeluarkan tidak akan mencampuri masalah internal dan apalagi mengganggu kedaulatan suatu negara. China akan mengambil sikap *non interference* dan menghargai kedaulatan dari negara itu.

Beijing sering dilihat sebagai salah satu negara yang sering mempertahankan pemikiran tradisi kedaulatan. Konsep ini sering mengacu pada kedaulatan dalam norma-norma *Westphalia* yang mengatakan bahwa memahami prinsip *non interference* dalam urusan internal suatu negara adalah sangat penting demi terciptanya perdamaian dunia.³³

Namun setelah *Westphalia* telah terjadi pergeseran pemikiran yaitu dari kedaulatan sebuah negara menjadi fokus terhadap individu. Konsep yang baru itu lebih menekankan kepada kebebasan, keterbukaan dan masyarakat majemuk yang menjamin dapat membawa perdamaian dunia dan stabilitas dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, dunia internasional sudah seharusnya memberikan perhatian yang penuh terhadap apa yang terjadi di dalam kedaulatan suatu negara atau banyak negara dan bahkan dalam kondisi tertentu diperbolehkan untuk mengintervensi dengan kekuatan militer.³⁴ Meskipun demikian China tetap mempertahankan pemikiran kedaulatan Negara dan prinsip *non interference*. Prinsip itu sangat penting karena berpengaruh dalam China menjalankan perluasan dan penguatan hubungan luar negerinya yang dipengaruhi untuk menjalankan kepentingan nasionalnya.

³² Ingrid d'Hooghe, *Loc.Cit.*, hal. 6

³³ Stefan Staehle, *China's Participation in The United Nations Peacekeeping Regime, Thesis of the Faculty Of The Elliot School of InternationalAffairs, The George Washington University, Mei 2006*, hal. 9

³⁴ *Ibid.*

1.5.3 Keamanan Energi

Fenomena globalisasi telah menyebabkan antar negara untuk semakin mempererat hubungan dengan negara lain dalam bidang apa pun. Bagi kaum liberalis, negara-negara dapat saling bekerja sama untuk meraih keuntungan yang bersifat *positive sum game*, namun kaum realis berpandangan bahwa institusi kerjasama internasional hanya merupakan tempat bagi yang kuat untuk bermain secara terbuka demi mendapatkan keuntungan yang sifatnya *zero sum game*. Bagi kaum realis, keselamatan negara (*state survival*) bergantung pada bagaimana negara yang bersangkutan bisa mendapatkan keamanan (*security*).

Secara etimologis konsep keamanan (*security*) berasal dari bahasa Latin yang bermakna terbebas dari bahaya dan ketakutan. Dalam hubungan internasional, terdiri dari beberapa gagasan tergantung pada paradigma yang digunakan. Realisme melihat keamanan berhubungan dengan kepentingan nasional dari suatu negara. Bila kedua definisi digabungkan maka menunjukkan bahwa keamanan adalah pencarian akan kebebasan dari ancaman yang tidak terlepas dengan kaitannya kemampuan untuk bertahan. Dalam konteks keamanan energi maka upaya suatu negara untuk bebas dari ketakutan atau ancaman dari kekurangan sumber energi yang dapat mengganggu kepentingan nasional sehingga negara itu menjadi rentan. Oleh karenanya, negara itu akan mengamankan kebutuhan energinya.

Konsep keamanan energi secara sederhana dapat dipahami sebagai ketersediaan pasokan energi dalam jumlah yang cukup dengan harga yang dapat dijangkau. Namun dalam perkembangannya, pemahaman tentang konsep keamanan energi mengalami perluasan dan menjadi lebih komprehensif, yaitu tidak hanya dimengerti sebagai pasokan yang cukup dari sisi permintaan dan penawaran dengan harga yang terjangkau tapi juga dalam pengertian pasokan energi itu juga harus berkesinambungan (*sustainable*).³⁵

³⁵ Makmur Keliat, "Kebijakan Keamanan Energi", *Jurnal Global Politik Internasional*, Vol.8 hal. 37

Sudut pandang lain mengatakan bahwa pada tingkatan yang dasar, keamanan energi adalah kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan energi secepatnya dengan cara memproduksi bahan bakar dan listrik yang cukup dengan harga yang terjangkau dan mampu pula memindahkan energi itu ke negara yang memerlukannya sehingga ekonomi tetap berjalan dan rakyat dapat menjalankan aktivitasnya serta perbatasan nasional masih tetap terjaga. Keamanan energi dapat dikatakan gagal ketika momentum industrialisasi dan modernitas terhambat dan kemampuan untuk bertahan hidup menjadi lebih tidak pasti.³⁶

Sedangkan Mason Willrich memasukkan konsep keamanan energi dengan melihat dari sudut pandang negara pengimpor.³⁷ Secara sempit, keamanan energi adalah adanya jaminan tersedianya pasokan energi yang memungkinkan sebuah negara untuk tetap berfungsi pada masa perang. Sedangkan secara luas, keamanan energi adalah adanya jaminan tersedianya pasokan energi yang dapat mempertahankan ekonomi nasional pada tingkatan normal. Namun yang utama adalah keamanan energi dilihat sebagai jaminan ketersediaan energi yang cukup untuk memungkinkan ekonomi nasional berfungsi dalam sikap yang dapat diterima secara politik.

Secara umum, keamanan energi dapat ditingkatkan melalui pengaturan permintaan energi, meningkatkan persediaan energi domestik atau meningkatkan kemampuan persediaan energi impor dan domestik. Dalam kasus China, yang diterapkan adalah strategi *Go Out* yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pencarian sumber-sumber energi di luar China. Meskipun China telah mengadaptasi strategi yang dapat mendekatkan China kepada energi ini, tidak ada institusi kebijakan sentral yang mengatur secara efektif strategi *Go Out* ini. Tetapi strategi ini hanya berdasarkan pada keputusan para pemimpin China /

³⁶ Paul Roberts, *The End of Oil: On The Edge of A Perilous New World*, (New York: A Mariner Book Houghton Mifflin Company, 2005), hal. 238

³⁷ Mason Willrich, *Energy and World Politics*, (New York :The Free Press, 1978), hal. 67

pemerintah dengan perusahaan-perusahaan milik negara dan para diplomat China.³⁸

Strategi yang dapat dijalankan oleh negara pengimpor dalam menjamin keamanan energinya dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori menurut efek yang ditimbulkan, yaitu:³⁹

1. Menjalankan strategi yang dapat mengurangi kerugian dari kemungkinan terganggunya pasokan.
2. Menjalankan strategi yang dapat meningkatkan keamanan energi dengan cara memperkuat jaminan dari pasokan asing. Tindakan itu mencakup diversifikasi sumber-sumber persediaan dan meningkatkan ketergantungan melalui investasi dan pembangunan industri.
3. Menjalankan strategi dengan cara meningkatkan *self-sufficiency*.

Selain ketiga strategi tersebut, China memiliki upaya lain bagaimana mengatasi keamanan energinya secara strategis. Strategi yang dimaksud ialah suatu pendekatan yang dilakukan berbeda dengan pendekatan yang dijalankan oleh Amerika Serikat. Bila Amerika Serikat memusatkan tujuan kepada keamanan pasar minyak internasional, maka China menggunakan pendekatan perjanjian bilateral dimana negara itu berupaya untuk memastikan pasokan minyak dengan negara-negara penghasil minyak.⁴⁰

Maksud dari tindakan China itu adalah agar dapat memperoleh kendali fisik sehingga dapat mengendalikan keuangan terhadap rencana pembelian minyak itu sebelum minyak dijual di pasar. Selain itu, China juga memiliki kekhawatiran terhadap minyak yang diperdagangkan di pasar internasional. Pendekatan China yang berusaha memastikan cadangan minyak merupakan suatu

³⁸ Lieberthal & Herberg, "China's Search For Energy Security: Implications For US Policy", *NBR Analysis*, Vol. 17, No. 1, April 2006, hal. 17

³⁹ Mason Willrich, *Op.Cit.*, hal. 69

⁴⁰ Peter Navarro, *Loc. Cit.*, hal 10

strategi yang berbeda karena dirancang agar China menguasai pembelian itu yang dikenal dengan strategi *oil diplomacy*.⁴¹

1.5.4 DEFINISI KONSEP

1.5.4.1 *Non Interference*

Yang menjadi faktor penting dalam Kebijakan Luar Negeri China adalah lima prinsip hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*). Lima prinsip hidup berdampingan secara damai yaitu: *mutual respect of sovereignty and territorial integrity, mutual non aggression and mutual non interference in internal affairs, to persist in handling international disputes peacefully and to enhance mutual trust through dialogue and promote common security through cooperation, all the countries in the world enjoy equal sovereignty, to respect the national conditions of various countries and seek common ground while shelving differences, dan mutually beneficial cooperation and common development*. Salah satu dari kelima prinsip yang dijadikan sebagai landasan dalam kasus konflik kemanusiaan Darfur adalah prinsip *non interference*.

Non interference atau sering didefinisikan pula sebagai prinsip menghormati kedaulatan negara lain, menekankan bahwa tidak ada negara di dunia yang memiliki hak untuk memasuki atau menyerang negara lain, atau menjatuhkan atau menyangkal kedaulatan negara lain, dengan maksud atau alasan apapun. PBB adalah sebuah organisasi *intergovernmental* yang terdiri dari Negara-negara berdaulat dan bukan suatu badan pemerintah dunia. Urusan dalam negeri harus menjadi urusan dalam negeri itu dan diputuskan oleh rakyat negeri itu sendiri. Dan permasalahan yang terjadi dalam kawasan maka perlu diselesaikan sendiri oleh Negara-negara dalam kawasan itu melalui jalur diskusi atau dialog. Sedangkan Negara lain hanya bersifat sebagai mediator termasuk PBB hanya bisa memainkan peran yang bersifat *supplementary* dan *promotive*.⁴²

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Stefan Staehle, *Loc.Cit.*, hal.18

Dengan prinsip *peaceful coexistence* ini, China selalu menerapkannya ketika ada masalah-masalah dengan negara lain dan menjaga perdamaian dan kestabilan kawasan. Sedangkan atas berdasarkan prinsip *non interference*, China menjalin hubungan dengan negara-negara lain dan menekankan bahwa masalah politik dalam negeri dari suatu negara merupakan urusan dari negara tersebut sehingga bukan hak China untuk melakukan intervensi. Selain itu, pemberian bantuan berupa ekonomi dan teknik juga diberikan oleh China tanpa ada maksud politik dibelakangnya kepada beberapa negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Lima prinsip ini sampai sekarang terus menjadi acuan bagi China dalam menegakkan perdamaian dan perkembangan dunia.

I.5.4.2 Keamanan Energi

Berdasarkan pada penjabaran sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa keamanan energi tidak hanya dimengerti secara normatif sebagai adanya jaminan persediaan pasokan energi dalam harga yang dapat dijangkau. Tapi dewasa ini, konsep ini telah berkembang menjadi konsep yang multidimensional yang termasuk didalamnya terdapat aspek ekonomi, politik dan keamanan. Semua itu harus menjadi kombinasi yang bersinergis bila keamanan energi ingin dicapai.

Dalam aplikasinya terdapat beberapa diplomasi yang digunakan Cina, antara lain:

- **Diplomasi sumber alam**

Adalah kegiatan diplomasi yang dirancang untuk memungkinkan sebuah Negara memiliki akses pada sumber-sumber alam dan keamanan energinya. Diplomasi ini memiliki beberapa komponen yaitu: Pertama, menjaga kestabilan persediaan energi dan sumber-sumber alam lainnya. Kedua, menjaga persediaan

sumber-sumber pada tingkatan harga yang dapat dijangkau. Ketiga, mampu memindahkan sumber-sumber tersebut ke lokasi yang ditentukan⁴³

- **Diplomasi Minyak**

Adalah pembentukan lingkungan pengaruh yang memberi mereka akses khusus pada endapan minyak di daerah tertentu. Pengendalian atas endapan minyak itu secara tradisional merupakan faktor penting dalam pembagian kekuasaan dalam pengertian bahwa siapa pun yang mampu menambahkannya pada sumber bahan mentahnya yang lain, sedemikian banyak pula menambah kekuatan sumber dayanya sendiri dan menghilangkan saingannya dengan sebanding⁴⁴

Bila keamanan energi dan prinsip *non interference* menjadi faktor yang mempengaruhi dari domestik, maka respon dunia internasional tentang konflik Darfur menjadi faktor eksternal. Sudah merupakan hal yang wajar dalam segala tindakan yang dilakukan, akan menghasilkan respon dari yang lain. Dalam hubungan internasional, respon yang dikeluarkan mengenai suatu isu, dapat berupa tindakan, kebijakan pemerintah lain atau hanya sebatas pernyataan-pernyataan. Namun pilihan untuk tidak merespon juga dapat dikategorikan sebagai suatu respon tersendiri.

1.6 MODEL ANALISIS

Model Analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴³David Zweig, *Resource Diplomacy Under Hegemony*, Working Paper No.18, (Los Angeles: University of Southern California,2005), hal.2

⁴⁴Hans Morgenthau, *Politics Among Nations*, (New York: Alfred A. Knopf Inc., 1973), hal.12 3

Faktor Internal:

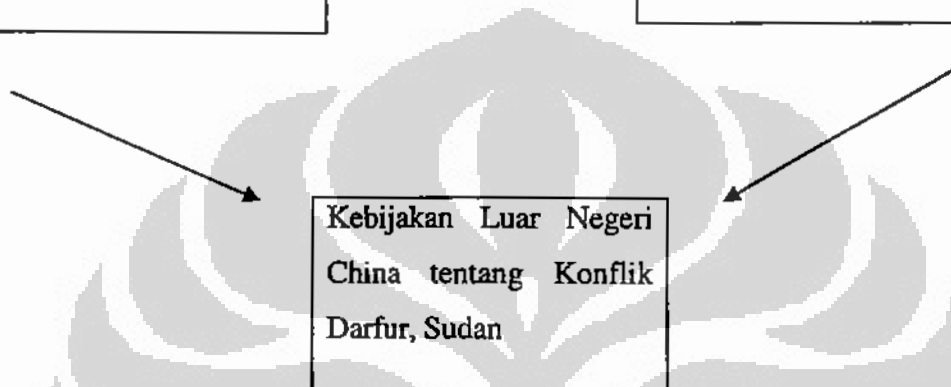
Keamanan Energi China Di Sudan ;

Prinsip *non interference*

Faktor Eksternal:

Respon media massa Internasional, AS, Uni Eropa, PBB dan Uni Afrika terhadap konflik Darfur dan China ;

Hubungan China Afrika



Berdasarkan pada permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, terlihat ada dua variabel yang dapat mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri China menyangkut Konflik di Darfur, yaitu dari faktor internal dan eksternal. Sedangkan tingkat analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pada level Negara-bangsa karena yang diteliti terkait dengan kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri.

1.7 ASUMSI

Asumsi yang dapat dirumuskan yaitu: Kepentingan Nasional merupakan faktor terpenting dalam Kebijakan Luar Negeri suatu negara sehingga China akan bertindak berdasarkan pada kepentingan nasionalnya.

I.8 HIPOTESA

Hipotesa yang dapat ditarik dalam tesis ini adalah:

1. Kebijakan Luar Negeri China dalam penyelesaian konflik Darfur dipengaruhi oleh faktor internal yaitu Keamanan Energi China di Sudan dan prinsip *non interference*.
2. Dalam menyelesaikan konflik Darfur, China mempertimbangkan juga faktor eksternal yaitu respon dari negara-negara AS, Uni Eropa, PBB, Uni Afrika dan pemberitaan di media massa internasional terhadap konflik Darfur dan China terkait Konflik Kemanusiaan Darfur, dan hubungan China Afrika.

I.9 METODOLOGI

Berdasarkan pada tujuannya, penelitian ini dapat digolongkan ke dalam kategori penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan dan mengidentifikasi proses terjadinya suatu fenomena. Deskriptif berarti memaparkan variabel-variabel yang ada dalam pembahasan yang terbagi dalam tiap bab.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian wawancara langsung dan kepustakaan (*library research*). Data-data yang akan dikumpulkan bersumber dari wawancara dengan dosen dari Foreign Affairs University of Beijing, penelitian, tulisan, buku-buku, jurnal, dan website.

Data yang didapat kemudian dianalisa secara deduktif. Metode analisa data yang dilakukan adalah pertama menganalisa data-data yang bersifat umum, kemudian baru dikategorikan ke dalam hal-hal yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini dikumpulkan data-data yang berkaitan, yaitu data mengenai konflik Darfur, prinsip *non interference*, Keamanan Energi China, respon negara AS, Uni Eropa, PBB dan Uni Afrika serta pemberitaan di media massa internasional dan Kebijakan Luar Negeri China terhadap Konflik Darfur tahun 2004-2007. Kemudian pada tahap selanjutnya data-data itu dianalisa lebih lanjut.

1.10 SISTEMATIKA PEMBABAKAN

Dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam empat bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

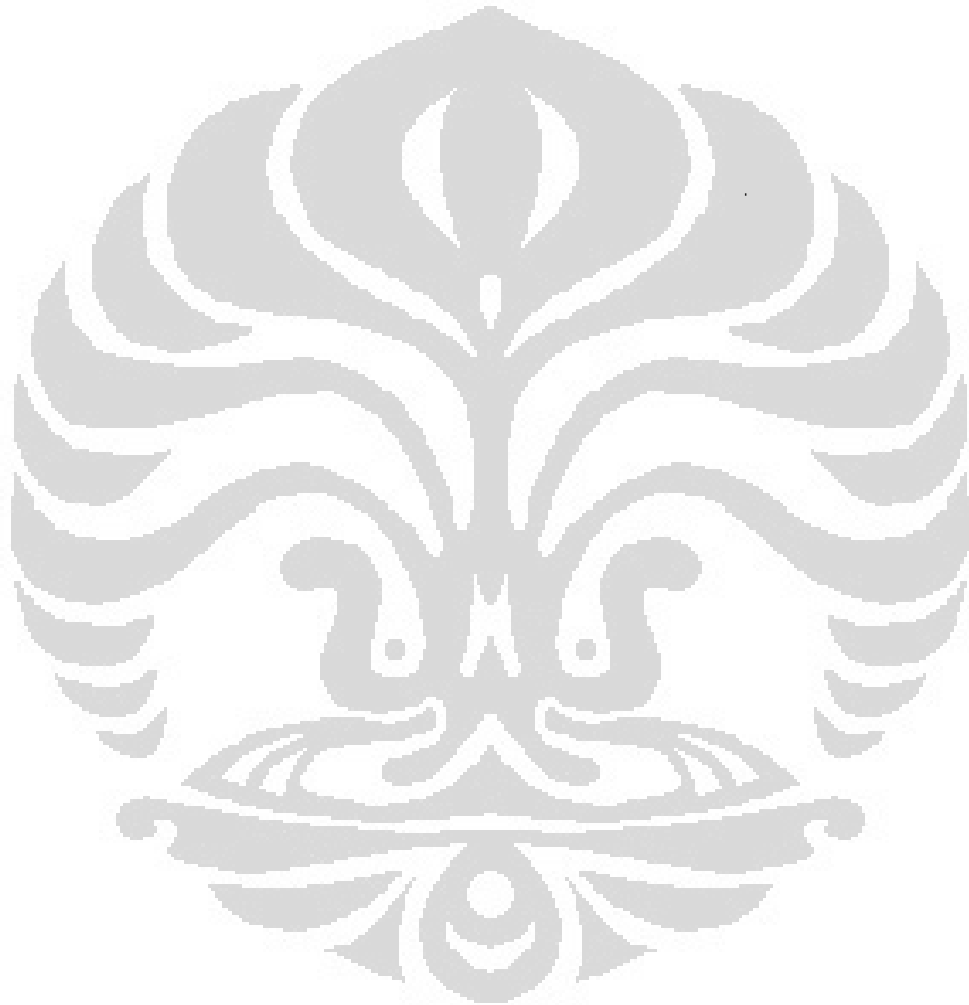
Bab 1 Pendahuluan: Bab ini terdiri dari sepuluh sub judul. Sub judul itu menggambarkan latar belakang masalah, pembatasan dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, model analisis, operasionalisasi konsep, hipotesa, metodologi dan sistematika penelitian.

Bab 2 Sudan dan Konflik Darfur: Bab ini akan menjabarkan tentang Konflik di Darfur, gambaran secara umum Sudan dan Darfur, penyebab konflik Darfur dan hubungan Sudan China, serta resolusi DK PBB tentang konflik Darfur.

Bab 3 Kerjasama China Afrika: Bab ini membahas Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai, kerjasama China Afrika dan China Sudan.

Bab 4 Kebijakan Luar Negeri China terhadap Konflik Darfur: Bab ini menjelaskan Kebijakan Luar Negeri China terhadap konflik Darfur dan signifikansi faktor internal dan eksternal dalam mempengaruhi Kebijakan luar Negeri China terhadap konflik di Darfur.

Bab 5 Penutup : Bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan uraian penjelasan dan hasil-hasil penelitian yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya.



BAB 2 SUDAN DAN KONFLIK DARFUR

2.1 Gambaran Sudan secara umum:

Republik Sudan⁴⁵ merupakan negara terluas di Afrika dengan luas wilayah sebesar 2.5km². Letak geografis Sudan berada dalam kawasan Afrika Timur Laut yang dikenal juga sebagai Tanduk Afrika (the Horn of Africa) atau masuk ke wilayah Sub Sahara Afrika. Negara ini berbatasan dengan Mesir dan Libya di sebelah Utara; Ethiopia, Eritrea dan Laut Merah di sebelah Timur; Kenya, Uganda dan Republik Demokratik Kongo di sebelah Selatan, dan Chad serta Republik Afrika Tengah di sebelah Barat. Pusat pemerintahan Sudan berada di ibukota Khartoum. Sudan terbagi atas 26 negara bagian.⁴⁶

Penduduk Sudan yang berjumlah 38 juta terdiri dari 57 kelompok-kelompok etnik. Tiap etnik memiliki bahasa dan dialeknya masing-masing namun bahasa resmi negara adalah bahasa Arab. Sudan yang merdeka dari kolonial Inggris didominasi oleh etnik Afrika dan Arab. Untuk melihat komposisi penduduk, Sudan dapat digolongkan berdasarkan agama, etnik, suku, dan aktivitas perekonomian masyarakat.⁴⁷

Berdasarkan komposisi agama 70% penduduk Sudan memeluk agama Islam. Kaum muslim terutama mendiami wilayah utara dan barat Sudan. Agama tradisional dipeluk sebesar 20-25% dan 5-10% adalah penganut agama Kristen. Kedua agama ini sebagian besar berada di Sudan Selatan. Berdasarkan etnik maka

⁴⁵ Nama Sudan diambil dari istilah seorang ahli Geografi Arab yang memberikan nama pada daerah-daerah (yang pada saat itu belum menjadi negara) yang dihuni oleh orang-orang hitam, dengan nama *Bilad as Sudan* atau Tanah Orang Hitam.

⁴⁶ Sudan terbagi atas 26 negara bagian sejak tahun 1994. Pada awalnya Sudan hanya dibagi dalam enam wilayah yaitu Sudan Selatan, Darfur, Kordofan, Sudan Timur, Sudan Tengah dan Sudan Utara.

⁴⁷ Bila berdasarkan agama maka digolongkan menjadi Muslim, penganut agama tradisional (animisme dan dinamisme) dan Kristen. Berdasarkan pada etnik maka secara umum yaitu etnik Arab atau Afrika sedangkan etnik-etnik lain dikatakan sebagai suku. Tapi pembagian yang berdasarkan etnik ini masih sering jadi perdebatan. Sedangkan pembagian berdasarkan aktivitas perekonomian yaitu seperti nomaden, menetap, dan penduduk kota. Tapi tidak tertutup kemungkinan penggolongan-penggolongan yang lain.

etnik Arab, Nubia, Beja dan Fur merupakan kelompok etnik yang mendominasi wilayah Sudan Utara dan Barat. Sedangkan etnik Afrika mendominasi wilayah Sudan Selatan. Berdasarkan aktivitas maka masyarakat di wilayah utara sebagian besar adalah masyarakat nomaden sedangkan masyarakat di Selatan adalah petani. Hal ini berkaitan dengan keadaan topografis wilayah yang terdapat perbedaan antara wilayah Sudan bagian utara dengan selatan. Wilayah utara merupakan daerah gurun dengan iklim subtropik yang kering dan curah hujan yang rendah. Sebaliknya bagian selatan memiliki curah hujan yang relatif tinggi sehingga tanahnya relatif lebih subur dan potensial untuk aktivitas pertanian. Kedua wilayah utara dan selatan memiliki sungai terpenting yang menjadi urat nadi kehidupan ekonomi masyarakat Sudan, yaitu Sungai Nil. Sungai Nil mengalir dari bagian selatan hingga utara Sudan sebelum bermuara di Mesir.

2.1.1 Ekonomi Sudan secara umum

Sejak kemerdekaan Sudan pada tahun 1956, ekonomi Sudan bergantung pada sektor pertanian. Pada tahun 1970an, Sudan melakukan reformasi ekonomi dikarenakan semakin memburuknya perekonomian Sudan. Berbagai macam program untuk menyelamatkan perekonomian Sudan telah dijalankan tapi tidak ada yang berhasil.⁴⁸ Pendapatan negara mulai meningkat sejak Sudan mulai mengeksplor minyak. Namun kemiskinan di lapisan masyarakat Sudan pada umumnya masih tinggi.

Pada tahun 1979, minyak ditemukan di Sudan Selatan. Eksplorasi minyak di Sudan sebenarnya sudah dilakukan pada tahun 1959 oleh perusahaan minyak dari Itali dan kemudian diikuti oleh beberapa perusahaan minyak lainnya. Eksplorasi minyak dilakukan di kawasan Laut Merah namun tidak ada yang berhasil.⁴⁹

⁴⁸ Karrar Abbadi & Adam Ahmed, *Brief Overview Of Sudan Economy and Future Prospect For Agricultural Development*, http://nutrition.tufts.edu/docs/pdf/famine/food_aid_forum_kit.pdf, diakses pada tanggal 26 Oktober 2008

⁴⁹ Ismail Zaliah, *Oil Industry in Sudan*, http://www.ecosonline.org/back/pdf_reports/2007/Oil/Oil_Industry_in_Sudan.pdf, diakses pada tanggal 23 Juli 2008

Setelah berakhirnya Perang Saudara pada tahun 1972, Pemerintah Sudan melakukan eksplorasi minyak di Sudan Selatan. Pada tahun 1975, perusahaan minyak asal AS, Chevron diijinkan untuk melakukan konsesi di bagian selatan dan barat selatan Sudan. Pada tahun 1979, minyak pertama kalinya ditemukan oleh Chevron di Sudan. Kesuksesan Chevron melakukan eksplorasi minyak terus berlanjut dan bahkan semakin banyak menemukan ladang-ladang minyak baru.

Pada tahun 1983, Chevron, Royal Dutch Shell, Pemerintah Sudan dan perusahaan minyak dari Saudi Arab membentuk perusahaan gabungan bernama White Nile Petroleum Company yang berencana untuk membangun jalur minyak pipa dari salah satu ladang minyak Sudan ke Pelabuhan Sudan.⁵⁰ Proyek ini direncanakan akan menghabiskan biaya sebesar US \$1 Milyar. Namun proyek ini tidak pernah terealisasi dikarenakan meletusnya kembali Perang Saudara pada tahun 1983.

Chevron menghentikan operasinya pada tahun 1984 dan memutuskan pengoperasian minyak itu setelah 17 tahun berada di Sudan. Chevron menjual konsesinya kepada perusahaan Sudan yang kemudian menjualnya kepada perusahaan minyak asal Kanada pada tahun 1992.

Pada tahun 1999, Sudan memulai untuk pertama kalinya mengekspor minyak mentah. Meningkatnya jumlah produksi minyak, tingginya harga minyak, berjalannya perindustrian minyak Sudan dan ekspor yang mulai berjalan, telah meningkatkan pertumbuhan GDP Sudan.⁵¹ Pada tahun 2007, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sudan telah meningkat 10% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan meningkatnya penghasilan dari sektor minyak.⁵²

Sebanyak 92,6% ekspor Sudan adalah minyak.⁵³ Meskipun demikian, ekonomi Sudan tetap berpegang kepada sektor pertanian. Pertanian masih

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Dossier, *Sudan Oil Industry*, www.ecosonline.org/back/pdf_reports/2008/dossier%20final%20report%20web.pdf, diakses pada tanggal 2 Agustus 2008

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

merupakan sumber utama perkembangan ekonomi Sudan, mengingat mayoritas penduduk Sudan mendapatkan penghasilan dari sektor pertanian.

Kontribusi sektor pertanian ke GDP diperkirakan sebesar 37% pada awal tahun 1980an, kemudian mengalami penurunan menjadi 28% pada pertengahan 1980an sampai awal 1990an akibat musim kering yang berkepanjangan. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga sering memberikan dampak yang negatif.⁵⁴ Pada awal tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, sektor pertanian mengalami peningkatan produksi sehingga produksi tersebut dapat juga diekspor selain minyak mentah.

2.1.2 Pemerintahan Omar Al Bashir (1989-sekarang)

Kolonel Omar Hassan Al Bashir berhasil menjadi pimpinan tertinggi di Sudan setelah melakukan kudeta militer pada tanggal 30 Juni 1989 terhadap pemerintahan Al Mahdi. Karir Bashir berawal ketika pada usia 16 tahun mendaftarkan diri untuk menjadi anggota Angkatan Udara Selatan. Bashir berasal dari keturunan keluarga Muslim yang berpengaruh di Sudan sehingga memungkinkan untuknya mengikuti pendidikan di luar negeri seperti di Mesir, Malaysia, Pakistan dan Amerika Serikat.⁵⁵

Konflik yang terjadi di berbagai fraksi politik pada tingkatan elit pemerintah, telah digunakan oleh Bashir sebagai kesempatan untuk menggulingkan Al Mahdi melalui suatu kudeta militer. Langsung setelah Al Mahdi dipenjarakan, Bashir mengangkat dirinya sebagai Panglima Besar Militer dan membentuk suatu Dewan Komando Revolusi untuk Penyelamatan Bangsa (Revolutionary Command Council for National Salvation). Dewan ini yang akan membantunya untuk memerintah Sudan. Bashir juga membekukan konstitusi, menangkap para pengikut Al Mahdi, membubarkan Majelis Nasional atau

⁵⁴ Karrar Abbadi & Adam Ahmed, *Loc. Cit.*, hal.29

⁵⁵ *Profil Omar Al Bashir, Loc. Cit.*, hal. 12

Parlemen Sudan dan melarang keberadaan partai-partai politik, kecuali satu partai politik Nationalist Islamic Front (NIF) yang dipimpin oleh Hassan Al Turabi.⁵⁶

Sebelum menjadi suatu partai politik besar, NIF adalah gerakan Ikhwanul Muslimin (Persaudaraan Ikhwan Muslim) yang berdiri pada tahun 1940an akibat pengaruh gerakan kebangkitan Islam di Mesir. Ketika gerakan ini menjadi partai politik, ideologi yang dibawa adalah Islam Fundamentalis. Artinya partai ini mendukung suatu negara yang berdasarkan pada Syariat Islam.

Pada tahun 1960 Hassan Turabi mengubah Ikhwanul Muslimin menjadi Islamic Charter Front dan kemudian menjadi NIF pada tahun 1986. Ketika Pemilu 1986, NIF hanya tergolong sebagai partai kecil karena hanya mampu mendapatkan 6% suara. Namun dari sekian partai, Bashir memilih untuk membangun aliansi dengan NIF. Hal ini dikarenakan Bashir ingin menerapkan Syariah Islam di Sudan dan partai ini memiliki landasan hal itu.

Sudan mengalami Islamisasi Arab dan Bashir menerapkan hukum Syariat di Sudan. Setelah berkuasanya Bashir, otomatis NIF tumbuh menjadi kekuatan politik yang sangat berpengaruh di Sudan. NIF menjadi pendukung utama kebijakan pemerintahan Bashir, terutama dalam penerapan Syariat Islam.⁵⁷ Hampir di semua birokrasi, institusi ekonomi, media, bahkan militer mulai didominasi oleh NIF secara perlahan-lahan. Hassan Turabi juga menjadi tokoh politik yang berpengaruh di Sudan. Hassan bahkan memegang jabatan penting lainnya, selain sebagai ketua NIF, yaitu Ketua Majelis Nasional Sudan.

Pada tahun 1993, pemerintahan militer oleh Dewan Komando Revolusi dibubarkan dan diganti dengan pemerintahan sipil dengan Bashir sebagai presiden. Hal ini sesungguhnya merupakan siasat dari Bashir agar dapat memegang kekuasaan lebih lama.⁵⁸ Pada bulan Maret 1996, diadakan pemilihan umum untuk mengisi kursi ketua Majelis Nasional. Dalam pemilihan ini, Hassan Turabi terpilih kembali sebagai ketua Majelis Nasional. Masih pada tahun yang

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Understanding Sudan*, <http://lsb.scu.edu/~mkevane/sudan/Understanding%20Sudan%20A%20Brief%20introduction.PDF>, diakses pada tanggal 15 November 2008

sama NIF berganti nama menjadi Partai Kongres Nasional (National Congress Party).

Sebagai ketua Majelis Nasional, pengaruh Hassan di Sudan semakin menonjol. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari Bashir bahwa kekuasaannya akan direbut oleh Hassan. Sehingga yang keduanya dulu membentuk aliansi, berubah menjadi oposisi dalam persaingan politik. Pada tahun 1999 friksi antara keduanya mencapai klimaks.

Friksi yang diawali dengan keinginan Hassan untuk mengamandemen konstitusi yang akan memberikan kekuasaan lebih besar kepada Majelis Nasional dan mengurangi kekuasaan presiden, menyebabkan perselisihan diantara Majelis Nasional dengan Presiden Bashir. Pada bulan Desember 1999, Majelis Nasional menyetujui rancangan undang-undang yang memuat pembatasan wewenang presiden. Bashir menganggap hal tersebut sebagai upaya Hassan untuk membatasi kekuasaan dirinya dan meningkatkan kekuasaan politiknya. Bashir bergerak lebih cepat dengan langsung bereaksi keras dengan membekukan konstitusi, memecat Hassan sebagai ketua Majelis Nasional sekaligus membubarkan Majelis Nasional, serta memberlakukan Sudan dalam keadaan darurat. Bashir akhirnya menjadi tokoh paling berkuasa di Sudan dengan tidak adanya Hassan dalam pemerintahan.

2.1.3 Perang Utara Selatan

a. Latar Belakang Perang Saudara

Sudan mendapatkan kemerdekaannya dari koloni Inggris pada tahun 1956. Sejak jaman koloni hingga negara itu berdiri sendiri, bagian wilayah selatan Sudan selalu diabaikan dalam hal pendidikan, infrastruktur, pembangunan rumah-rumah penduduk lokal dan penerimaan penduduk lokal Sudan Selatan dalam pemerintahan.⁵⁹ Ketika Sudan merdeka pada tahun 1956, penduduk etnik Arab di wilayah utara Sudan dapat mempersiapkan diri menghadapi kemerdekaan. Penduduk etnik Arab tersebut sudah berpengalaman dalam hal politik dan

⁵⁹ Dossier, *Loc. Cit.*

mengetahui cara menghadapi modernisasi dan dunia luar. Hal ini sangat berbeda dengan penduduk Sudan Selatan yang bahkan sebagian besar penduduknya masih buta huruf dan tradisional. Menjelang kemerdekaan Sudan, pasukan Sudan Selatan melakukan pemberontakan karena khawatir penduduk Sudan Selatan akan kembali lagi diabaikan dan bahkan hanya akan dieksploitasi oleh para pejabat Khartoum.⁶⁰ Pasukan Sudan Selatan ini kemudian menamakan diri mereka sebagai gerakan geriliya Anya-Nya. Kelompok ini menuntut untuk berpisah dari Sudan. Namun usaha mereka tidak berhasil.

Pemerintahan Sudan didominasi secara keseluruhan oleh etnik Arab ketika masa pemerintahan Jenderal Nimeiri pada tahun 1968. Selama kepemimpinannya tersebut, Anya-Nya tetap melakukan pemberontakan dengan menyerang pasukan militer pemerintah. Pada tahun 1971, Nimeiri berusaha untuk melakukan perdamaian dengan kelompok Anya-Nya, dan pada bulan Maret 1972 perjanjian perdamaian ditandatangani oleh kedua pihak di Addis Ababa. Dalam perjanjian ini disepakati bahwa pemerintah akan memberikan otonomi terhadap Sudan Selatan termasuk pemerintahannya sendiri, dan kelompok Anya-Nya direkrut ke pasukan militer nasional.

Namun pemerintah melanggar perjanjian Addis Ababa. Sudan Selatan bukan diberikan otonomi melainkan daerah tersebut diislamisasi karena mayoritas agama yang dianut di wilayah itu adalah tradisional dan Kristen. Selain itu, pemerintah juga berusaha mengubah haluan air di Sungai Nil agar langsung mengalir ke wilayah utara Sudan, dan pemerintah juga melakukan perubahan perbatasan antara Utara dan Selatan setelah diketemukannya ladang-ladang minyak wilayah Sudan Selatan.⁶¹

Pada tahun 1983, personel pasukan militer nasional Sudan yang berasal dari Sudan Selatan memberontak dan membentuk kelompok pemberontakan baru yang dipimpin oleh John Garang, dengan nama SPLM/A (Sudan People's Liberation Movement/Army). Presiden Nimeiri langsung membatalkan perjanjian Addis

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

Ababa pada bulan Juni 1983. Nimeiri mengumumkan bahasa nasional adalah bahasa Arab dan diberlakukannya hukum Syariah Islam sebagai landasan untuk hukum Sudan.

b. Perebutan Ladang Minyak

Penemuan minyak pada akhir tahun 1970an menyebabkan kembali konflik antara Utara dan Selatan. Untuk dapat menguasai produksi minyak, Presiden Nimeiri berusaha kembali memanipulasi perbatasan dan memindahkan penduduk yang berada di sekitar ladang minyak tersebut. Namun usahanya tersebut tidak berhasil dan usaha-usaha lain juga terus dilakukan oleh pemerintahan setelah Nimeiri untuk menguasai ladang minyak tersebut yang berada di Sudan Selatan.

Strategi lain yang dijalankan oleh pemerintahan setelah Nimeiri yang saat itu dipegang oleh Perdana Menteri Sadiq Al Mahdi, adalah kelompok milisi digunakan untuk mengusir penduduk lokal. Milisi ini dikenal sebagai Murahleen. Murahleen berhasil menguasai daerah ladang minyak tersebut dengan mudah karena penduduk lokal tidak memiliki senjata untuk melindungi mereka. Penduduk lokal yang masih selamat direkrut oleh pemerintah untuk mengabdikan diri ke pasukan nasional dan bertugas menjaga ladang minyak dari SPLM/A.

Pada tahun-tahun berikutnya peperangan yang terjadi antara pemerintah dengan SPLM/A adalah saling merebut daerah ladang minyak. SPLM/A pada tahun 1986, akhirnya berhasil menguasai hampir sebagian besar ladang minyak di Western Upper Nile. Pemerintah yang merasa masih harus menguasai ladang minyak tersebut, kemudian mengajukan perjanjian perdamaian dengan SPLM/A.

c. Perjanjian Perdamaian

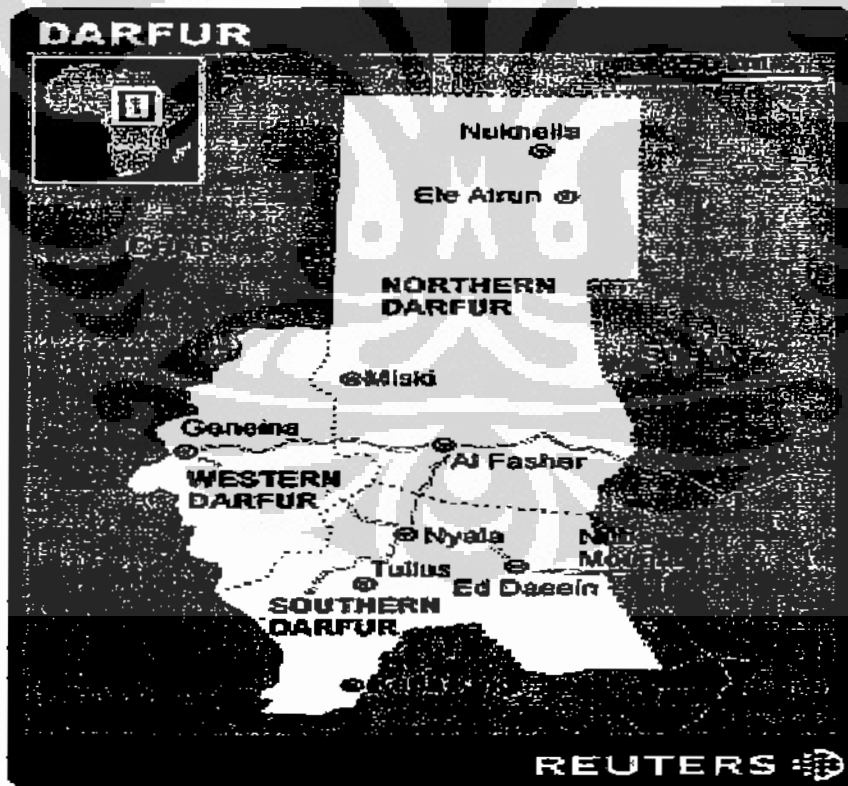
Perjanjian perdamaian antara pemerintah dan SPLM/A telah beberapa kali terjadi namun implementasi dari perjanjian tersebut selalu tidak pernah dilaksanakan sehingga konflik antara Utara dan Selatan terus berlangsung. Namun setelah 20 tahun sejak meletusnya konflik untuk pertama kali terjadi kesepakatan perdamaian antara pemerintah dengan SPLM/A yang ditandai dengan penandatanganan oleh kedua pihak pada tahun 2005. Perjanjian ini dikenal

dengan Comprehensive Peace Agreement (CPA) yang menghasilkan kesepakatan bahwa pada tahun 2011 penduduk Sudan Selatan akan melakukan referendum untuk menentukan sendiri nasib mereka.

2.2 Darfur

Darfur yang memiliki arti “tanah tinggal etnik Fur”, terletak di bagian barat Sudan yang berbatasan dengan Libya di sebelah utara; Chad di sebelah barat; Republik Afrika tengah di barat daya; wilayah Kordofan di sebelah timur dan Bahr El Gazal di wilayah selatan. Luas wilayah Darfur adalah 500 km² atau sekitar seperlima dari luas Sudan secara keseluruhan. Pada tahun 1994, wilayah Darfur dibagi menjadi tiga negara bagian⁶² yaitu Darfur utara dengan ibukota Alfasher, Darfur selatan dengan ibukota Nyala dan Darfur Barat dengan ibukota Al Genaina.

Gambar Peta Darfur



⁶² Pembagian ini merupakan bagian dari pengaturan kembali administratif yang dilakukan pemerintah, termasuk membagi negara-negara bagian Sudan yang sebelumnya 6 menjadi 26, sedangkan wilayah propinsi-propinsi yang sebelumnya 18 menjadi 72.

Darfur pada akhir abad ke 14 atau awal abad ke 15, merupakan wilayah merdeka yang memiliki pemerintahan sendiri berbentuk kesultanan. Kesultanan ini dipimpin oleh etnik Afrika namun sangat mengagungkan budaya Arab karena pengaruh Islam sehingga dalam kepemimpinan Sultan, budaya Arab Islam juga dijalankan bersamaan dengan budaya setempat. Paradoksnya etnik Afrika pada saat itu memandang rendah etnik Arab Darfur karena mereka miskin dan mereka adalah masyarakat nomaden.

Pada tahun 1822, Sudan di bawah pendudukan Turki Mesir, Darfur digabungkan dengan Sudan. Ketika penggabungan ini etnik Afrika dan Arab dan etnik-etnik lainnya di Darfur bersatu untuk melawan pendudukan Turki Mesir dan menginginkan berdiri sendiri sebagai suatu wilayah yang merdeka. Namun mereka tidak bisa menandingi pasukan Turki Mesir. Mereka kalah tapi menang karena berhasil bersatu dan tidak lagi membedakan etnik.

Darfur kembali menjadi wilayah otonom ketika terjadi gerakan yang disebut sebagai Mahdi (sang pemimpin), berhasil mengusir kekuasaan Turki Mesir dan memerintah Sudan selama periode 1885-1897. Meskipun otonom, Darfur termasuk dalam jajahan Mahdi sehingga Darfur tetap berusaha untuk merdeka. Saat Inggris dan Mesir menduduki Sudan pada tahun 1897 dan menghancurkan Mahdi, Darfur kembali menjadi bagian dari wilayah Sudan di bawah penguasaan Kondominium Mesir Inggris. Darfur kemudian menjadi satu dari enam wilayah Sudan saat negara tersebut diproklamasikan pada tahun 1956.

Sejarah Darfur sangat kompleks. Darfur bukanlah suatu negara yang eksistensinya mudah untuk diakui tapi ketika Darfur berdiri sendiri, eksistensi wilayah Darfur di masa lalu selalu dipandang oleh suku-suku lain. Namun ketika Darfur bergabung dengan Sudan, Darfur hanya menjadi salah satu dari daerah pinggiran yang terdapat di Sudan.⁶³ Akibatnya penduduk Darfur sering konflik dengan satu sama lain meskipun sama-sama merupakan penduduk Darfur, dan penyebab konflik yang terjadi bukan dikarenakan perbedaan etnik tapi karena faktor perebutan sumber daya.

⁶³ Gerard Prunier, *The Ambiguous Genocide*, (New York: Cornell University Press, 2007), hal. 23

Geografis dan iklim Darfur, seperti wilayah-wilayah sebagian besar Sudan lainnya, menentukan populasi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Curah hujan dan tanah kering telah membagi Darfur menjadi tiga area.⁶⁴ Area pertama adalah daerah utara yang ditutupi oleh padang pasir dan hanya mendapatkan curah hujan sekitar 300mm per tahunnya. Daerah ini merupakan pemukiman para nomaden yang sebagian besar adalah penduduk etnik Arab. Area kedua adalah daerah semi gurun yang terletak di Darfur Tengah dengan curah hujan sekitar 500mm per tahunnya. Aktivitas pertanian sudah bisa berjalan di daerah ini sehingga area ini merupakan pemukiman para petani yang menetap. Area ketiga adalah area yang kelembabannya paling tinggi dibandingkan kedua area yang lain dengan curah hujan antara 800 sampai 900 mm per tahunnya. Daerah ini terletak di Darfur Selatan. Aktivitas ekonomi masyarakat di daerah ini adalah bertani.

Penduduk Darfur berjumlah sekitar enam juta jiwa. Mayoritas agama yang dianut adalah agama Islam.⁶⁵ Wilayah Darfur terdiri dari bermacam-macam suku namun suku-suku di wilayah ini secara umum juga dapat dikategorikan menjadi etnik Arab dan Afrika. Etnik Fur, Zaghawa dan Masalit merupakan tiga etnik Afrika yang paling dominan. Adapun penggunaan kategorisasi Arab dan Afrika di Darfur hanya terkait dengan isu kebudayaan dan bukan pada isu rasial. Hal ini dibuktikan dengan seringnya terjadi perkawinan antar etnik sehingga perkawinan antar etnik yang sudah lazim terjadi membuat perbedaan identitas tidak lagi terlalu tampak.⁶⁶ Sehingga meskipun mayoritas penduduk menganut agama Islam, karena faktor ambiguitas identitas dari hasil perkawinan ini maka Muslim di Darfur dianggap sebagai Muslim non Arab.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 3

⁶⁵ *Conflict in Darfur*, <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/sudan-peace-process.htm>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2008

⁶⁶ Namun perlu diketahui bahwa konotasi Arab di Sudan digunakan secara berbeda-beda. Ada yang menggunakannya sebagai maksud perbedaan ras, cara berbicara, ide-ide yang sifatnya emosional atau sebagai cara hidup.

2.2.1 Arab vs Afrika

Sudan adalah sebuah negara yang kompleks. Banyak yang melihat bahwa dikotomi Utara Selatan di Sudan adalah inti dari permasalahan di Sudan.⁶⁷ Tapi sebenarnya ada permasalahan yang lebih esensial, yaitu permasalahan dalam pandangan hidup berbangsa.

Selama periode kolonial Inggris, Sudan dianggap sebagai salah satu sebuah negara Timur Tengah yang hanya saja terletak di benua Afrika. Para "Arab" Islam di Sudan juga merasakan demikian. Bagi mereka, akibat secara geografis berada di benua Afrika maka menjadi sebuah ketidakberuntungan karena negara mereka tidak bisa terintegrasi dengan Arab Islam yang sesungguhnya.⁶⁸ Selain itu, diijinkannya para misionaris Kristen untuk beroperasi di Sudan Selatan juga mempersulit kenyataan bahwa negaranya akan menjadi negara Arab yang sesungguhnya. Sedangkan para non Arab yang Muslim, bagi mereka tidak bisa dianggap sama seperti halnya Arab Muslim. Hal ini disebabkan para non Arab - Muslim berasal dari etnik yang berbeda-beda yang bukan Arab, dan karena mereka tidak memiliki "darah Arab" sehingga mereka tidak bisa dianggap sebagai satu kesatuan dengan Arab Muslim.⁶⁹

Tidak ada wilayah-wilayah di Sudan yang homogen,⁷⁰ kecuali mungkin Sudan Utara yang didominasi oleh para Arab Islam. Sudan Utara dapat dikatakan homogen karena ada faktor Islam yang berperan. Selain itu, wilayah-wilayah di Sudan Utara sama-sama di masa lalu dikuasai oleh kerajaan Turki, Mahdi, dan Inggris dan wilayah-wilayah tersebut dikembangkan ketika masa pendudukannya. Sehingga Sudan Utara lebih maju dibandingkan wilayah-wilayah lainnya.

Sedangkan untuk Sudan Selatan, kecenderungan untuk homogen sulit dilakukan karena secara umum penduduk Sudan Selatan berasal dari etnik Afrika, dan etnik-etnik Afrika memiliki tradisi untuk melakukan perkawinan antar etnik yang kemudian mereka dapat juga membangun komunitas budayanya sendiri.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Gerard Prunier, *Op. Cit.*, hal. 76

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 78

Selain itu, Sudan Selatan dipengaruhi oleh dua agama yaitu agama Kristen dan agama tradisional. Sehingga sulit homogenitas terbentuk di Sudan Selatan. Oleh karena itu, Sudan Selatan termarginalisasi akibat perbedaannya dengan Utara.

Untuk wilayah Darfur, meskipun Islam dan menjadi pendukung Utara pada awal-awal perang Utara Selatan, tidak memberikan keuntungan karena bagi Arab di utara mereka adalah kaum Muslim etnik Afrika sehingga tidak bisa dibandingkan dengan Arab. Sehingga meskipun berbeda dengan Sudan Selatan tapi tetap termarginalisasi sama seperti Sudan Selatan. Pemikiran-pemikiran yang demikian yang menyebabkan Sudan menjadi negara yang terpecah.

2.2.2 Pusat vs Pusat

Pada tanggal 12 Desember 1999, Presiden Bashir mengumumkan keadaan darurat negara. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya dugaan kudeta yang akan dilakukan terhadap dirinya oleh Hassan Al Turabi. Pada saat yang bersamaan Presiden Bashir juga menurunkan Hasan Al Turabi dari posisinya sebagai Ketua Majelis Nasional Sudan. Bahkan pada tanggal 1 Januari 2000, Majelis Nasional dibubarkan dan terjadi perombakan kabinet menteri pemerintahan.⁷¹

Merasa masih terancam oleh Hasan Al Turabi, pada bulan Mei 2000 Presiden Bashir membekukan partai Partai Kongres Nasional atau disebut juga Al Watani Nasional, pimpinan Hasan Al Turabi dan menutup kantor-kantornya yang berada di 26 negara bagian. Hassan yang merasa kesal karena semua aktivitas politiknya dihambat maka mengumumkan bahwa Hassan beserta para pengikutnya akan melakukan segala hal agar pemerintahan Bashir turun dan termasuk konfrontasi melalui militer.

Hassan membangun kembali partai politik dengan nama Al Watani Ash Shabiyi. Sejak ruang gerak politik Hassan dibatasi oleh Pemerintah Sudan, Hassan aktif mengampanyekan gerakan anti pemerintah sehingga Hassan jadi mudah

⁷¹ *Ibid.*, hal. 81

bertemu dan menawarkan aliansi dengan gerakan pemberontak. Organisasi yang dibentuk Hassan pernah mengeluarkan pamflet yang isinya bahwa ada unsur kesengajaan dari pemerintah pusat untuk menghalang-halangi orang-orang dari etnik Afrika untuk menduduki jabatan tinggi dan lebih memberikannya kepada etnik Arab terutama etnik Arab Utara yang belum bersatu dengan etnik Afrika. Hal ini dimaksudkan agar etnik Afrika tetap menjadi kelas bawah dibandingkan etnik Arab.⁷²

Hassan menyadari bahwa untuk melawan pemerintah maka Hassan memerlukan pasukan bersenjata sendiri seperti yang terjadi di Sudan Selatan. Hassan melihat bahwa wilayah Darfur merupakan yang tepat yang dapat memberikannya pasukan. Hal ini dikarenakan sejak periode Mahdi dan Kondominium Mesir Inggris sampai dengan pemerintahan sekarang, Darfur selalu merasa diasingkan dan dimarginalisasi oleh pusat sehingga hanya masalah waktu saja sampai saatnya Darfur akan memberontak.⁷³

Namun untuk mendapatkan kepercayaan dari penduduk Darfur tidak mudah, mengingat Hassan dulunya adalah bagian dari pemerintahan. Sehingga hanya sebagian penduduk Darfur dari etnik Zaghwa dan Ma'aliya yang mau jadi bagian pasukan Hassan sedangkan suku seperti Fur dan Masalit tetap tidak mempercayai Hassan dan ingin membangun gerakannya sendiri.

Langkah Hassan selanjutnya setelah membentuk pasukan adalah bekerjasama dengan gerakan yang sewaktu Hassan di masa pemerintahan, merupakan musuhnya, yaitu SPLA. Penandatanganan Memorandum Kesepakatan antara dua belah pihak pada tanggal 19 Februari 2001 dilakukan, yang inti dari kesepakatan itu adalah bersatu dan saling berkoordinasi dalam melawan pemerintah pusat. Setelah penandatanganan tersebut, Hassan bersama partainya dibantu oleh SPLA, langsung bergerak untuk mengatur persenjataan dan mentransportasikannya ke Darfur. Sementara transportasi persenjataan sedang diusahakan, SPLA mengirim pasukan ke Darfur untuk membantu pemberontakan yang akan datang. Namun sebelum pasukan mencapai Darfur, wilayah yang

⁷² "Darfur Rising: Sudan New Crisis", *ICG Africa Briefing*, *Op.Cit.* hal. 8

⁷³ Gerard Prunier, *Op. Cit.*, hal. 86

disebut dengan Bahr El Ghazal, pada bulan Juni 2001, SPLA menyerang kantor-kantor pemerintahan di Bahr El Ghazal agar dapat menyibukkan pemerintah setempat dan pusat, sementara tentara yang lainnya memasuki Darfur.

Pada bulan November 2001, pemerintah pusat mengirim milisi *Murahleen* ke Bahr El Ghazal untuk menumpas para pemberontak. Karena kekhawatiran bahwa di daerah-daerah sekitar Bahr El Ghazal akan melakukan pemberontakan juga, maka pada bulan April 2002 pemerintah pusat mengirim pasukan berkuda yang terdiri dari etnik Arab untuk melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah dan pembunuhan terhadap yang diduga akan melakukan gerakan pemberontakan. Konflik yang terjadi di Utara Darfur ini, telah menghancurkan 600 rumah penduduk, menewaskan 17 orang dan puluhan penduduk terluka serta 2000 sapi dicuri oleh milisi Arab tersebut. Sejak itu konflik-konflik antara pemerintah dengan pemberontak ataupun penduduk, meskipun dalam skala kecil, sering terjadi. Pada saat bersamaan konflik-konflik tersebut sedang berlangsung, Hassan akhirnya berhasil mengirim senjata ke Darfur.

2.2.3 Konflik Darfur

Ketika pemerintah pusat dan dunia internasional sedang berfokus pada proses perjanjian kesepakatan perdamaian antara Pemerintah Sudan dengan para delegasi Sudan Selatan, para gerakan pemberontakan di Darfur mulai melakukan penyerangan terhadap tempat-tempat pemerintah lokal. Sebenarnya pemerintah pusat sudah dapat memperkirakan bahwa akan ada aksi pemberontakan di Darfur, hanya saja saat itu Pemerintah Sudan sedang disibukkan dengan perdamaian di Sudan Selatan dan ancaman dari Amerika Serikat, sehingga mengabaikan urusan domestik yang di barat.⁷⁴ Namun sempat salah satu pejabat negara Sudan melakukan kunjungan ke Darfur pada bulan November 2002, untuk memperingatkan penduduk Darfur bahwa pemberontakan hanya akan melumpuhkan wilayah Darfur seperti yang terjadi di wilayah-wilayah Sudan

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 91

Selatan. Bahkan pejabat negara itu menambahkan dalam pidatonya bahwa pemerintah pusat akan berjanji untuk membangun jalanan yang bagus dan memperbaiki saluran-saluran air di Darfur sehingga mudah mendapatkan air bersih.⁷⁵ Meskipun demikian, tidak ada penduduk Darfur yang terkesan karena janji-janji politik seperti itu sudah sering diberikan tapi realisasinya tidak pernah terjadi.

Pada bulan Februari 2003, sebuah kelompok sebanyak 300 orang menggunakan kendaraan-kendaraan Toyota Land Cruisers menyerang hampir 200 pasukan yang ditempatkan di suatu kota kecil, bernama Golu. Pemerintah Sudan telah menduga bahwa akan ada penyerangan terhadap pasukannya yang ditempatkan untuk berjaga-jaga tapi yang tidak menjadi dugaan bagi Pemerintah Sudan bahwa yang menyerang berjumlah 300 orang dan menggunakan kendaraan bermotor. Hal ini merupakan suatu yang baru terjadi dalam konflik-konflik selama ini. Pemerintah Sudan langsung mengirim utusan ke Darfur untuk bernegosiasi dengan kelompok pemberontak Darfur Liberation Front (DLF). Dalam negosiasi dengan DLF, pemerintah masih mengharapkan bahwa dengan janji-janji untuk pembangunan jalanan sepanjang seratus kilometer di Darfur, dapat meredam konflik oleh karenanya utusan yang dikirim adalah Presiden Parlemen Komite Transportasi.

Sementara itu, Pemerintah Sudan dihadapan dunia internasional menyatakan bahwa yang terjadi di Darfur bukan dilakukan oleh gerakan pemberontak melainkan para kelompok-kelompok bandit sehingga tidak akan membahayakan proses perdamaian antara Utara Selatan.⁷⁶ Untuk mencegah konflik menjadi berkepanjangan di Darfur, maka pemerintah memberikan ultimatum terhadap DLF bahwa bila DLF tidak segera menyerahkan diri maka akan ada konsuekwensi.

DLF tidak menyerahkan diri sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Pemerintah Sudan. Justru DLF yang kemudian berubah menjadi Sudan Liberation

⁷⁵ *Ibid.*, hal.92

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 94

Movement/Army (SLM/A), bekerjasama dengan gerakan lain, yaitu Justice and Equality Movement (JEM). Kedua kelompok ini saling berkoordinasi melakukan operasi penyerangan. Operasi penyerangan berfokus pada target-target militer pemerintah di Darfur, termasuk pasukan militer.

Konflik Darfur baru berlangsung beberapa bulan tapi kondisi yang terjadi menunjukkan seperti konflik telah berlangsung bertahun-tahun. Kondisi yang memprihatinkan ini, membuat penduduk yang berasal dari Darfur tapi bertempat tinggal di Khartoum, untuk mengajukan petisi terhadap Pemerintah Sudan. Isi dari petisi itu adalah diadakannya dialog politik terbuka dengan para pemberontak, pembebasan terhadap para tawanan politikus Darfur, pemberian bantuan kemanusiaan sebelum memasuki musim hujan, dan penghentian menggunakan kelompok-kelompok militan sebagai sarana penekanan.⁷⁷

Sebagai respon terhadap petisi itu, Pemerintah Sudan mengumumkan keadaan darurat di Darfur dan memperbanyak penangkapan terhadap orang-orang yang diduga mendukung gerakan pemberontakan Darfur. Selain itu, Presiden Bashir membubarkan Komite Keamanan Darfur karena dianggap terlalu melunak terhadap kondisi yang terjadi di Darfur⁷⁸ dan membentuk komisi baru yang para anggotanya adalah orang-orang terpercaya Presiden Bashir dan telah menunjukkan kesetiaan padanya. Hasil dari pertemuan Presiden Bashir dengan komisi baru itu adalah operasi militer akan dijalankan untuk menyelesaikan krisis Darfur.

2.2.4 Operasi Militer Darfur

Operasi militer pernah dijalankan sebelum-sebelumnya di Darfur tapi operasi militer kali ini lebih represif dari yang pernah sebelumnya dijalankan.⁷⁹ Operasi diawali dengan pesawat-pesawat terbang militer mengelilingi di atas desa-desa seolah sedang menargetkan sesuatu, dan kemudian kembali lagi untuk

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 96

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 99

melepaskan bom dari atas. Serangan udara ini dilakukan dengan menggunakan pesawat transportasi buatan Rusia sedangkan bom yang dilepaskan adalah bom buatan terbuat dari bekas drum minyak yang diisi dengan bahan-bahan eksplosif dan puing-puing metal.⁸⁰

Setelah serangan bom selesai, pesawat dan helikopter-helikopter tempur datang dan menembaki target-target bangunan besar seperti sekolah atau gudang atau bangunan-bangunan lainnya yang masih berdiri.⁸¹ Ketika serangan udara selesai, maka giliran milisi Janjaweed untuk memasuki desa-desa yang telah diserang, baik datangnya bersamaan dengan pasukan militer ataupun sendiri.

Milisi Janjaweed datang dengan menggunakan kuda dan diikuti dibelakangnya dengan kendaraan-kendaraan besar seperti Toyota Land Cruiser. Tugas mereka adalah untuk memeriksa keadaan desa dan menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan seperti membunuh, merampok, memperkosa dan membakar rumah-rumah.⁸² Kadang mereka juga tidak langsung membunuh para penduduk desa tapi disiksa terlebih dahulu. Saat penyiksaan merupakan saat ketika Janjaweed mencacimaki bahwa etnik Afrika merupakan etnik yang lebih rendah dari etnik Arab dan oleh karenanya hanya sepantasnya kalau hidup sebagai budak yang melayani etnik Arab. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa pemilik tanah Sudan yang sebenarnya adalah Arab dan bukan tanah milik orang Hitam, termasuk Darfur. Bila ada penduduk yang selamat dari milisi, maka itupun disengaja agar dapat menceritakan kembali apa yang telah dilakukan milisi Janjaweed sehingga menciptakan teror bagi penduduk Darfur lainnya.

2.2.5 Kelompok-kelompok dalam konflik Darfur:

a. Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A)

SLM/A adalah gerakan pertahanan diri yang dibentuk oleh suku Fur dan Masalit yang berasal dari etnik Afrika. Gerakan yang telah tumbuh sejak akhir tahun 1980an dibentuk dibentuk untuk menghadapi serangan dari etnik Arab ke

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*, hal. 100

wilayah mereka.⁸³ Pada tahun 2001, milisi dari suku Fur, Zaghawa dan Massalit bergabung membentuk gerakan yang lebih besar. Mereka berlatih layaknya dalam suatu pelatihan militer. Dalam kelompok besar ini juga dibentuk struktur pimpinan yang telah diputuskan dalam sebuah konferensi di Jebel Marra pada tahun 2002. Hasil konferensi tersebut menyepakati bahwa komposisi pimpinan terdiri dari ketua yang berasal dari suku Fur, komandan militer dari suku Zaghawa dan wakil ketua dari suku Massalit.

Gerakan baru ini mengumumkan ke publik dengan nama Darfur Liberation Front (DLF). Aksi yang pertama kali mereka lakukan adalah serangan ke markas militer di Golo, Jabal Marra, pada pertengahan Februari 2003. Nama dari gerakan ini tidak berlangsung lama. Setelah DLF bertemu dengan pimpinan SPLM/A pada awal bulan Maret, DLF berubah menjadi Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A). Gerakan ini memiliki cita-cita bahwa suatu hari, Sudan dapat menjadi negara yang menekankan pada persatuan, demokrasi, sekularisme, dan persamaan antar semua warga negara.⁸⁴

Tujuan dari berdirinya SLM/A adalah untuk menciptakan Sudan yang bersatu dan demokratis melalui pembagian kekuasaan dan pemisahan negara dengan agama. Oleh karenanya, SLM/A mempunyai impian untuk terbentuknya Sudan Baru karena selama ini Sudan yang dipimpin oleh Presiden Bashir tidak menciptakan Sudan yang demikian tapi yang ada hanya marjinalisasi dan diskriminasi terhadap baik suku, agama maupun wilayah sehingga menimbulkan perpecahan diantara rakyat Darfur dan Sudan. Untuk terciptanya Sudan Baru, SLM/A perlu menentang pemerintah dengan mengangkat senjata. Mereka mengajak seluruh penduduk Darfur yang berasal dari semua etnik, suku dan agama untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat karena pemerintah telah dengan sengaja menciptakan permusuhan etnik antara Afrika dan Arab. SLM/A juga mengingatkan kembali bahwa di masa lalu penduduk Darfur dari segala asal etnik, suku, dan agama telah bersama-sama melawan kolonial

⁸³ "Unifying Darfur Rebels: A Prerequisite for Peace", *ICG Africa Briefing* No. 32, 6 oktober 2005, hal. 2

⁸⁴ *Ibid.*

yang telah menguasai Darfur. Mereka juga menyatakan bahwa gerakan SLM/A tidak menuntut pemisahan diri dari Sudan, melainkan hanya keadilan dan hak sebagai rakyat Darfur dan terutama sebagai manusia yang selama ini telah dilanggar haknya.

b. Justice and Equality Movement (JEM)

Justice and Equality Movement dibentuk lebih baru dibandingkan SLM/A yaitu pada awal tahun 1990an. Gerakan ini didominasi oleh suku Zaghwa. Kekuatan militer JEM lebih kecil dibandingkan SLM/A sehingga gerakan SLM/A yang lebih banyak melakukan aksi serangan militer daripada JEM.

Perbedaan lainnya antara JEM dengan SLM/A adalah politik ruang lingkup. JEM memusatkan pergerakan tidak hanya pada satu wilayah tertentu saja, seperti halnya SLM/A yang hanya memusatkan di Darfur saja, tapi pergerakan JEM seluruh Sudan. Hal ini dikarenakan ketidakadilan politik, ekonomi dan sosial bukan hanya terdapat di satu wilayah saja, namun sudah dalam skala nasional. Sehingga politik dan ideologi JEM lebih kesadaran untuk mengubah seluruh Sudan. Gerakan ini menuntut penataan ulang sistem di seluruh Sudan dengan cara kembali kepada pembagian enam wilayah dan rotasi jabatan presiden kepada enam wilayah tersebut. JEM juga menuntut suatu pemerintah federal yang bersatu berdasarkan pada keadilan, persamaan, perlindungan terhadap hak asasi manusia serta redistribusi kekuasaan yang lebih adil.

Dalam rangka membangun kesadaran gerakan perlawanan terhadap tirani pemerintah, JEM membangun juga jaringan dengan kelompok-kelompok pemberontak di wilayah timur Sudan. Untuk itu, JEM bergabung dengan Eastern Front bersama dengan Rashaida Free Lion dan Beja Congress.⁸⁵ Selain itu, JEM juga membuka jaringan di Kordofan, Northern Nile Valley dan Southern Sudan.

JEM memiliki hubungan dengan Hasan Turabi dan Al Watani Ash Shabiyyi. Pemimpin JEM, Dr. Khalil Ibrahim adalah mantan pejabat tinggi dalam

⁸⁵ *Ibid*, hal. 6

pemerintahan Sudan pada dekade 1990an yang memiliki kedekatan dengan Hassan. JEM diduga mendapatkan aliran dana untuk mobilisasi dari Hassan.

Meskipun SLM/A dan JEM bersatu melawan pemerintah, friksi antara dua kelompok itu juga sering terjadi. Friksi mulai muncul menjelang tahun 2005. Padahal setahun sebelumnya kedua kelompok masih sempat menjadi delegasi bersama dalam putaran perundingan Abuja, Nigeria pada tahun 2004. SLM/A yang dari awal tidak menyukai Hassan Turabi, mencurigai adanya hubungan JEM dengan Hassan dan partainya sehingga berawal dari kecurigaan tersebut menjadi timbul ketidakpercayaan. Sedangkan JEM menganggap SLM/A memiliki minim pengalaman politik. Friksi tersebut bahkan menjadi konflik terbuka pada akhir bulan Mei 2005.

c. Milisi Janjaweed

Sejak konflik di Darfur meletus pada tahun 2003, nama Janjaweed menjadi sering disebut. Janjaweed dan Pemerintah Sudan telah dituduh melakukan tindakan genosida terhadap penduduk Darfur oleh Pemerintah AS pada tahun 2004. Selain itu, mereka juga dituduh telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap hak asasi manusia oleh PBB dan beberapa negara lainnya.

Keberadaan dari milisi Janjaweed telah lama terbentuk. Pada pertengahan tahun 1980an, Pemerintah Sudan mulai mempersenjatai milisi Arab dengan maksud untuk mencegah warga Darfur etnis Afrika bergabung dengan kelompok pemberontak di Sudan Selatan dalam melawan pemerintah. Pada tahun 1983, SPLM/A mulai melawan secara militer Pemerintah Sudan. Dalam konflik ini, serangan sering terjadi kepada para warga Darfur etnik Afrika dan Nuban yang dilakukan oleh pemerintah.

Pada tahun 1990an, kelompok SPLM/A melakukan penyerangan ke Darfur untuk mendukung warga Darfur yang telah menjadi target dari Pemerintah Sudan dan kelompok milisi Arab yang pro pemerintah. Target dari pemerintah adalah penduduk yang berasal dari suku-suku Fur, Massalit dan Zaghawa. Lebih dari 200 desa yang diserang dan penyerangan ini dilakukan oleh milisi Arab yang pro pemerintah yang kemudian diketahui sebagai kelompok Janjaweed.

Dalam kasus Darfur, pemerintah kembali memperbantukan kelompok milisi Janjaweed untuk menghadapi pemberontak di Darfur. Bersama dengan tentara pemerintah dan pasukan militer yang disebut dengan Popular Defence Force (PDF), Janjaweed melakukan aksi penyerangan terhadap pemberontak dan juga warga sipil. Target dari Janjaweed adalah semua orang yang berada di Darfur, tanpa memperdulikan umur dan jenis kelamin karena semuanya dituduh memiliki afiliasi dengan pemberontak dan mendukung gerakan pemberontak. Janjaweed juga mengambil kesempatan dalam penyerangan ini untuk menyiksa warga sipil yang beretnis Afrika sehingga sasaran serangan milisi Janjaweed yang paling kejam adalah terhadap permukiman-permukiman yang dihuni oleh etnik Fur, Zaghawa atau Masalit.⁸⁶

Istilah Janjaweed yang secara harfiah berarti penjahat di atas kuda sebenarnya telah digunakan sejak puluhan tahun untuk menyebut kelompok bandit yang sering mencuri ternak penduduk desa dan melakukan perampokan di jalan-jalan dengan menaiki kuda.⁸⁷ Penggunaan istilah bertujuan untuk memberikan efek psikologis yang menakutkan bagi warga Afrika.

Pasukan Janjaweed merupakan orang-orang yang berasal dari keluaran pasukan nasional yang terlalu sering tidak mematuhi pimpinannya, para bandit dan penjahat-penjahat yang sedang dalam pengincaran pemerintah, pemuda-pemuda etnik Arab yang memiliki konflik dengan etnik Afrika biasanya etnik Arab ini berasal dari suku-suku kecil, narapidana yang dijanjikan akan dibebaskan bila bersedia bergabung dengan milisi, para pemuda fanatik Arab, dan pemuda-pemuda Arab yang tidak mempunyai pekerjaan. Para anggota Janjaweed ini menerima bayaran sebesar US \$ 79 per bulan untuk yang berjalan kaki. Sedangkan yang memiliki kuda dibayar US \$ 117 per bulan dan yang bisa membaca atau yang mempunyai gelar pangkat kemiliteran dibayar US \$233. Persenjataan disediakan oleh pemerintah. Anggota Janjaweed ada yang direkrut secara langsung oleh militer kemudian diberi tanda pengenal, seragam dan

⁸⁶ Ted Dagne, *Sudan: The Crisis in Darfur and Status of The North South Peace Agreement*, hal. 16-17, www.fas.org/sgp/crs/row/RL33547.pdf, diakses pada tanggal 17 September 2008

⁸⁷ *Darfur Conflict: Its history, Nature and Development*, www.sudanembassy.org, diakses pada tanggal 27 Oktober 2008

pangkat kemiliteran. Sedangkan yang tidak direkrut secara langsung, tidak mengenai seragam namun mereka memakai aksesoris-aksesoris yang menunjukkan bahwa mereka adalah anggota milisi.

Selama ini belum ditemukannya bukti yang konkrit bahwa milisi Janjaweed diorganisir oleh Pemerintah Sudan untuk melakukan penyerangan. Sehingga ketika dunia internasional menyuarakan keprihatinan dan kecamannya terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Darfur dan menuduh keterlibatan milisi Janjaweed dengan pemerintah. Khartoum menyangkal keterkaitannya dengan milisi tersebut. Menurut Khartoum, pemerintah telah membentuk kelompok pertahanannya sendiri dan tidak membutuhkan tenaga dari para bandit untuk mengatasi para pemberontak. Bahkan kelompok yang dibentuknya tersebut melakukan perlawanan dengan Janjaweed karena dianggap telah mampu membuat kekacauan di Sudan. Janjaweed diakui oleh pemerintah sebagai kelompok bandit bersenjata dan pemerintah sama sekali tidak ada hubungan dengan kelompok itu. Pemerintah justru menuduh para pemberontak melakukan serangan terhadap permukiman sipil dan menciptakan krisis kemanusiaan untuk menarik perhatian dan pengakuan internasional.

Namun di satu sisi, pemerintah pernah secara implisit mengakui keterkaitannya dengan milisi Janjaweed. Dalam sebuah pidatonya pada Desember 2003, Presiden Bashir secara tidak langsung mengakui adanya keterkaitan antara pemerintah dengan Janjaweed. Dalam kesempatan tersebut Bashir menyatakan bahwa:

"Our priority from now on is to eliminate the rebellion and any outlaw elements. They will be our target... We will use all available means, the army, the police, the Mujahedeen, the horsemen to get rid of the rebellion".⁸⁸

"Yang menjadi prioritas pemerintah mulai sekarang adalah membasmi gerakan pemberontak dan elemen-elemen yang melanggar hukum....Pemerintah akan menggunakan pasukan militer, polisi, Mujahedeen, Penunggang Kuda untuk mengatasi para kelompok pemberontak".

⁸⁸ Gerard Prunier, *Loc. Cit.*, hal. 37

Meskipun kata penunggang kuda dapat memiliki banyak pemaknaan, secara tidak langsung Pemerintah Sudan telah mengindikasikan bahwa adanya pasukan penunggang kuda yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi para pemberontak. Hubungan langsung antara pemerintah dengan kelompok milisi Janjaweed memang sulit untuk dibuktikan, mengingat anggota milisi Janjaweed bergabung juga dalam pasukan militer nasional Sudan. Hanya kesaksian dari para korban yang selamat yang dapat menunjukkan adanya kerjasama antara tentara pemerintah dan milisi Janjaweed dalam melawan pemberontak dan penyerangan terhadap penduduk sipil. Taktik yang sering digunakan adalah serangan pendahuluan oleh pasukan pemerintah dan serbuan melalui pesawat tempur, kemudian baru milisi Janjaweed masuk untuk menganiaya penduduk sipil, merampok harta dan ternak-ternak, dan akhirnya membakar permukiman tersebut.

Kelompok-kelompok hak asasi internasional, dan beberapa organisasi dari Sudan telah mendokumentasikan kejahatan yang dilakukan oleh milisi Janjaweed terhadap warga sipil Darfur, pekerja relawan kemanusiaan dan pasukan perdamaian Uni Afrika. Dalam dokumentasi tersebut tampak bahwa milisi Janjaweed dan pemerintah telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Baik milisi Janjaweed maupun pejabat pemerintah mengaku bahwa mereka sedang melawan para pemberontak, namun dalam dokumentasi terlihat bahwa warga sipil juga ikut diserang. Keterlibatan milisi Janjaweed menyebabkan konflik bertambah kompleks dan sulit untuk dikendalikan. Milisi Janjaweed seperti halnya kelompok Interhamwe di Rwanda dan kelompok Lord's Resistance Army di Uganda, merupakan kelompok-kelompok yang secara sengaja menargetkan warga sipil dan menteror mereka.

2.2.6 Darfur Peace Agreement

Darfur Peace Agreement (DPA) merupakan perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani oleh Pemerintah Sudan dan pemberontak SLM pada tanggal 5 Mei 2006. Namun perjanjian ini tidak disepakati oleh dua pemberontak lainnya

yaitu JEM dan sebuah kelompok pemberontak yang dulunya bergabung dalam SLM namun telah memisahkan diri.⁸⁹

Perjanjian DPA dibagi dalam tiga bagian.⁹⁰ Bagian pertama membahas tentang perjanjian keamanan. Dalam bagian ini disepakati untuk dilakukannya gencatan senjata antara Pemerintah Sudan dan kelompok-kelompok pemberontak. Selain itu, perjanjian ini juga meminta agar Pemerintah Sudan melucuti persenjataan milisi Janjaweed dan membubarkan kelompok milisi tersebut serta merekrut 4000 pasukan SLM sebagai bagian dari personel militer dan polisi Sudan.

Bagian kedua dari DPA membahas tentang pembagian kekuasaan. Pemerintah Sudan akan memberikan posisi kepada SLM di pemerintahan nasional dan daerah serta posisi-posisi tinggi lainnya. Selain itu, dibahas juga tentang pembentukan Transitional Darfur Regional Authority (TDRA) yang nantinya akan bertanggung jawab sementara dalam mengembangkan Darfur. Namun peran utama dari TDRA ini adalah sebagai pemerintah Darfur bayangan yang memediasi antara tiga propinsi Darfur dengan pemerintah pusat.

Bagian terakhir adalah kesepakatan untuk pemerintah pusat memberikan kesejahteraan kepada Darfur. Salah satunya adalah Pemerintah Sudan diwajibkan untuk menyediakan anggaran sebesar US \$ 300Juta untuk tahun 2007 dan US \$ 200Juta untuk tahun 2008 yang digunakan untuk rekonstruksi dan pengembangan Darfur.⁹¹

Sebagai kelanjutan dari DPA maka pada tanggal 7 Agustus 2006, pimpinan SLM, Mini Minawi, diangkat sumpah menjadi pembantu presiden. Sementara itu, Pemerintah Sudan melihat bahwa untuk mengamankan dan membangun kembali Darfur maka sebanyak 26.500 personel militer dan 7050 personel polisi dikerahkan ke Darfur untuk mencegah aksi-aksi yang dapat mengancam proses

⁸⁹ DPA telah dimulai sejak Desember 2004 di Abuja tapi baru pada tahun 2006 DPA ini terealisasi. Awalnya JEM juga merupakan salah satu pemberontak yang ikut dalam DPA namun kemudian JEM keluar.

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 179

⁹¹ Ted Dagne, *Loc. Cit.* hal. 49

perdamaian dan menjaga situasi di Darfur. PBB dan pejabat-pejabat AS mengecam tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Sudan dan menanggapi bahwa Pemerintah Sudan telah menghambat terciptanya proses perdamaian. Aksi Pemerintah Sudan yang kembali mengirim pasukan ke Darfur ditanggapi oleh kelompok-kelompok pemberontak termasuk SLM, dengan kembali menyerang pasukan militer, polisi dan institusi pemerintah lainnya.

DPA sebenarnya tidak mendapatkan dukungan dari sebagian besar penduduk Darfur, terutama dari kelompok-kelompok pemberontak yang tidak ikut dalam perjanjian tersebut. Sehingga meskipun Pemerintah Sudan tidak menambah personel pasukan militer dan polisi, aksi-aksi penyerangan tetap akan dilakukan oleh pemberontak lainnya.

Sejak penandatanganan DPA, tidak membawakan hasil yang signifikan bagi perdamaian di Darfur. Penyerangan, pererusakan dan kekerasan lainnya justru semakin meningkat sejak penandatanganan DPA. SLM dan kelompok-kelompok pemberontak dituduh oleh Pemerintah Sudan telah melanggar kesepakatan sehingga menyebabkan militer Sudan harus melakukan penyerangan terhadap SLM dan kelompok pemberontak lainnya. Sedangkan kelompok pemberontak menuduh pihak Pemerintah yang tidak komitmen dalam kesepakatan DPA.

Kegagalan DPA terjadi oleh disebabkan beberapa hal yaitu:

1. Secara teoritis, bagian pertama yang menyangkut tentang keamanan bagus. Tapi implementasi sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan kemauan Pemerintah Sudan untuk melucuti dan membubarkan milisi Janjaweed, sulit untuk dipegang. Selain itu, gencatan senjata antara pemerintah dan kelompok-kelompok pemberontak tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan, mengingat yang menandatangani hanya satu kelompok pemberontak sedangkan kelompok yang lainnya tidak.
2. Bagian kedua yang membahas tentang pembagian kekuasaan dapat diterima namun kembali lagi kepada Pemerintah Sudan akan mengangkat siapa yang akan menjadi ketua TDRA. Ketua TDRA tersebut juga

mampukah untuk mengaspirasikan keinginan dari penduduk Darfur dan tidak menjadi bonekanya pemerintah.

3. Bagian ketiga dari perjanjian dapat terealisasi bila Pemerintah Sudan tidak lagi membedakan antara etnis Arab dengan Afrika.
4. Perjanjian ini mengalami kegagalan yang utama adalah dikarenakan tidak adanya saling percaya, baik antara Pemerintah Sudan dengan kelompok pemberontak maupun antar kelompok-kelompok pemberontak.

2.2.7 Krisis Kemanusiaan

Pada akhir bulan Juli 2003, dikabarkan bahwa 6000 orang berusaha melarikan diri dari Janjaweed dan para pengungsi mulai berdatangan ke perbatasan Chad. Jumlah angka itu langsung meningkat tajam pada pertengahan September 2003, menjadi 400.000 orang sedangkan para pengungsi yang berada di Chad diperkirakan sudah mencapai 70.000 orang. UNCHR langsung meminta dana sebesar US \$ 10,3 Juta untuk para pengungsi tersebut.⁹² Tiap bulan angka korban dan pengungsi selalu bertambah. Bahkan para relawan yang membantu juga ikut kewalahan.

Kondisi para korban selamat yang berusaha untuk melarikan diri dari Janjaweed sangat memprihatinkan. Mereka tidak memiliki makanan untuk bertahan sebelum sampai pada tenda-tenda pengungsian sehingga mereka harus makan tanaman- tanaman yang ada. Air minum lebih sukar untuk didapat. Secara fisik mereka sangat lemah sehingga banyak korban yang meninggal karena sakit ataupun rentan tertular penyakit. Sedangkan secara psikologis mereka sangat traumatis. Para wanita ketakutan akan diperkosa oleh Janjaweed sedangkan para lelaki takut akan dibunuh atau disiksa.

Pada tahun 2007, krisis di Darfur tidak menunjukkan adanya peningkatan ke arah yang lebih baik, justru mengalami penurunan. Situasi kekerasan terhadap warga sipil tetap terjadi dan bahkan pasukan perdamaian Uni Afrika dan para pekerja kemanusiaan juga menjadi korban. Hal ini dikarenakan milisi Janjaweed

⁹² Gerard Prunier, *Op. Cit.*, hal. 130-131

sewaktu-waktu dapat menyerang tenda-tenda pengungsian yang terletak di Darfur. Sebanyak 400 lebih pekerja kemanusiaan harus direlokasikan karena membahayakan keselamatan mereka. Peralatan dan barang-barang milik para pekerja kemanusiaan juga dirusak dan dicuri. Kondisi ini menyebabkan beberapa kelompok relawan kemanusiaan yang berada di Darfur menyatakan ketidakmampuannya untuk tetap berada di Darfur memberikan bantuan kepada korban Darfur akibat alasan keselamatan.⁹³

Sementara itu, warga sipil sering menjadi korban dalam pertempuran antara pasukan militer Pemerintah Sudan atau milisi Janjaweed dengan para pemberontak, meskipun telah ditanda tangani Perjanjian Damai Darfur oleh kedua belah pihak. Antara bulan Mei sampai dengan Oktober 2007, sebanyak 20 ribu orang lebih yang harus melarikan diri akibat pertempuran tersebut.

Kondisi ketidakamanan di Darfur meningkat juga bukan hanya disebabkan oleh pihak-pihak yang bertikai dalam konflik Darfur, melainkan bandit-bandit juga melakukan aksi teror terhadap siapapun, baik korban-korban dalam tenda-tenda maupun para pekerja relawan kemanusiaan. Bandit-bandit yang terutama sering melakukan penyerangan terhadap para pekerja kemanusiaan dan membajak truk-truk yang membawa barang-barang untuk keperluan di tenda-tenda pengungsian, menambah kesulitan bagi para relawan kemanusiaan untuk menolong para korban. Meskipun truk-truk yang membawa bantuan kemanusiaan telah mendapatkan ijin masuk dari semua pihak yang bertikai, para bandit sering menimbulkan masalah karena mereka tidak mengenal kompromi.⁹⁴

2.3 Resolusi DK PBB tentang konflik Darfur

Dalam menyikapi konflik Darfur, Dewan Keamanan PBB dari tahun 2004-2007 telah mengeluarkan resolusi sebanyak 23. Namun dalam tesis ini hanya akan dijabarkan beberapa resolusi, yaitu:

⁹³ Ted Dagne, *Op. Cit.*, hal.4

⁹⁴ *Humanitarian Access in the Context of Increasing Fighting and Insecurity*, <http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/africa/sudan0506/4.htm>, diakses pada tanggal 27 November 2008

Resolusi DK PBB No. 1547: Resolusi ini merupakan resolusi yang pertama kali dikeluarkan oleh DK PBB mengenai konflik Darfur. Pada tanggal 11 juni 2004, PBB mengeluarkan Resolusi DKK PBB No 1547 yang mendesak kedua belah pihak untuk mengimplementasikan perjanjian gencatan senjata. Sekjen PBB, Kofi Annan dan Pemerintah Sudan menandatangani sebuah komunika bersama yang intinya bahwa Pemerintah Sudan akan melucuti persenjataan milisi Janjaweed dan memberikann akses yang lebih luas kepada kelompok-kelompok kemanusiaan di Darfur.

Resolusi DK PBB No. 1556: Pada bulan Juli 2004, PBB mengeluarkan resolusi 1556 yang mengutuk aksi kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang terjadi di Darfur, dan menekan pemerintah Sudan untuk bertanggung jawab terhadap keselamatan penduduk Darfur, menjaga ketertiban dan keamanan Darfur. Melalui resolusi 1556, PBB menindaklanjuti resolusi sebelumnya yang meminta pemerintah Sudan untuk memfasilitasi pasukan PBB dan organisasi kemanusiaan lainnya yang dapat membantu dan menginvestigasi pelanggaran hak asasi terhadap rakyat Darfur, membangun keamanan bagi warga sipil dan komunitas lain yang berusaha untuk membantu penduduk Darfur, dan melakukan perundingan perdamaian dengan pihak-pihak yang terkait. PBB juga mendukung Uni Afrika untuk mengirim pasukan Uni Afrika ke Darfur dan mendorong negara-negara anggota PBB untuk memberikan bantuan material kepada Uni Afrika. Resolusi 1556 juga meminta kepada negara-negara anggota PBB untuk mencegah berlangsungnya penjualan atau penyediaan senjata atau alat-alat militer lainnya, kepada pihak organisasi-organisasi non pemerintah dan individu-individu yang beroperasi di Sudan. Dalam resolusi ini, DK PBB menuntut komitmen dari pemerintah Sudan untuk melucuti persenjataan kelompok militan Janjaweed dan membawa pimpinan Janjaweed serta semua yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum-hukum internasional ke meja pengadilan. DK PBB memberi waktu selama 30 hari bagi Pemerintah Sudan untuk melucuti persenjataan milisi Janjaweed serta mangancam akan memberikan sanksi ekonomi dan militer jika Pemeritah Sudan tidak mengindahkannya. DK PBB juga meminta Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan agar mengunjungi Sudan untuk melihat komitmen pemerintah Sudan tentang hal ini. Namun sampai batas waktu yang

telah ditentukan terlampaui Pemerintah Sudan belum melakukan langkah signifikan untuk menghentikan aksi kejam dari milisi Janjaweed terhadap penduduk sipil.

Resolusi DK PBB No. 1564: Pada tanggal 9 September 2004, Colin Powell mengumumkan bahwa Departemen Luar Negeri AS menemukan, telah terjadi genosida di Darfur sehingga diperlukan ada secepatnya tindakan dari PBB untuk mengatasi konflik di Darfur. Pada tanggal 18 September 2004, DK PBB mengadaptasi Resolusi 1564 untuk meminta Sekretaris Jenderal Kofi Annan membentuk sebuah komisi internasional yang menginvestigasi apakah telah terjadi genosida dan mengidentifikasi kekerasan apa saja yang telah terjadi agar dapat menghukum pihak-pihak yang telah terlibat.

Berdasarkan pada Resolusi No. 1564 maka pada bulan Oktober 2004, Sekjen Kofi Annan menunjuk sebuah Komisi Internasional Untuk Darfur dan meminta laporan dalam tiga bulan terkait dengan Resolusi No. 1556 dan 1564. Pada tanggal 25 Januari 2005, Komisi Internasional melaporkan pengamatan yang terjadi dengan berdasarkan pada empat kategori yaitu, (1) apa adanya pelanggaran terhadap hukum internasional dan hak asasi di Darfur yang dilakukan oleh Pemerintah Sudan, kelompok militan dan pemberontak (2) apa tindakan genosida terjadi (3) jenis-jenis kekerasan apa saja yang terjadi (4) memberikan rekomendasi kepada DK PBB. Berdasarkan pada kategori itu maka Komisi Internasional menyimpulkan bahwa Pemerintah Sudan dan Janjaweed telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan berdasarkan pada hukum internasional maka kejahatan tersebut dikategorikan berat.

Resolusi DK PBB No 1591: Pada tanggal 29 Maret 2005, DK PBB adaptasi resolusi 1591 untuk meminta semua negara anggota membekukan semua aset, dana, aset-aset finansial dan sumber-sumber ekonomi yang telah ditentukan oleh Komite. Resolusi ini juga meminta agar semua negara anggota mencegah masuknya atau transitnya orang-orang yang telah mendapatkan larangan berpergian ke luar negeri dari Komite. Pemerintah Sudan juga diminta dalam resolusi ini untuk menghentikan aksi ofensif Pemerintah Sudan melalui serangan udara ke Darfur.

Resolusi DK PBB No. 1593: Melalui resolusi ini DK PBB mengajukan kasus Darfur kepada Prosecutor International Criminal Court (Kejaksaan Mahkamah Kriminal Internasional).

Resolusi DK PBB No. 1706: Pada tanggal 30 Agustus 2006, melalui resolusi ini DK PBB memberikan mandat kepada UNMIS untuk memonitor dan memberikan laporan mengenai pelaksanaan dari perjanjian DPA oleh kedua pihak yang telah menandatangani, menyelidiki adanya pelanggaran yang dilakukan terhadap perjanjian dan segera melaporkannya. Resolusi ini memutuskan juga bahwa UNMIS bertugas untuk menjaga keamanan di perbatasan antara Sudan dengan Chad dan Sudan dengan Republik Afrika Tengah.

Resolusi DK PBB No. 1769: Pada tanggal 31 Juli 2007, berdasarkan pada Bab VII Piagam PBB maka DK PBB mensahkan Resolusi 1769. Resolusi ini telah mensahkan terbentuknya operasi gabungan pasukan hibrid antara PBB dengan Uni Afrika (UNAMID) yang bertugas sebagai pasukan perdamaian di Darfur. PBB mengharapkan untuk dapat mengirimkan pasukan sebanyak 26 ribu personel ke Darfur sampai pada pertengahan tahun 2008. Pengiriman pasukan itu akan dilaksanakan secara bertahap.

Isi dari resolusi tersebut menjelaskan bahwa:⁹⁵

1. PBB menyatakan kembali komitmennya untuk menghentikan kekerasan di Darfur dan meminta untuk kerjasama Pemerintah Sudan dalam menghentikan kekerasan tersebut.
2. PBB meminta juga kepada Pemerintah Sudan untuk menerima pasukan operasi hibrid untuk dapat ditempatkan di Darfur sebagai penerus dari AMIS (African Union Mission in Sudan).
3. PBB mengacu kepada Perjanjian Addis Ababa bahwa pasukan hibrid akan mayoritas terdiri dari pasukan Afrika.
4. PBB menyatakan keprihatinannya terhadap serangan yang masih berlangsung terhadap warga sipil dan kekhawatiran terhadap keamanan dari para pekerja relawan kemanusiaan di Darfur.

⁹⁵ Ted Dagne, *Op. Cit.*, hal. 1-2

5. PBB menyambut baik penunjukkan Perwakilan Khusus Gabungan PBB Uni Afrika untuk Darfur, Martin Agwai.
6. PBB meminta untuk semua pihak memberikan bantuan paket baik yang sifatnya ringan maupun berat untuk pasukan AMIS yang masih berada di Sudan dan untuk persiapan pasukan UNAMID (UN African Mission in Darfur) dalam waktu 30 hari.
7. PBB menyatakan bahwa UNAMID akan membentuk sebuah markas besar pada bulan Oktober 2007.
8. PBB memutuskan bahwa pada bulan Oktober 2007, UNAMID akan mengatur semua persiapan untuk dikirimnya pasukan ke Darfur.
9. PBB memutuskan bahwa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2007, UNAMID akan menerima mandatnya dari otoritas AMIS.
10. PBB meminta semua pihak untuk bersatu demi perdamaian di Darfur dan segala hal yang berkaitan dengan pengiriman pasukan hibrid akan diawasi oleh PBB.
11. PBB meminta segera dilakukannya gencatan permusuhan di Darfur.
12. PBB memberikan otorisasi kepada UNAMID untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka melindungi para personel pasukan dan pekerja kemanusiaan serta warga sipil.

BAB 3 KERJASAMA CHINA AFRIKA

3.1 Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai

Setelah berakhirnya Perang Dunia ke II, muncul negara-negara Asia dan Afrika sebagai negara baru yang merdeka. Tugas dari negara-negara baru ini setelah merdeka adalah mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan, menolak agresi dan intervensi dari pihak luar, membina hubungan yang seimbang dengan negara lain, dan menjaga perdamaian dunia demi perkembangan perekonomian mereka.

China yang pada tahun 1949 mendeklarasikan diri dengan nama Republik Rakyat China juga merasakan euforia yang sama seperti halnya negara-negara yang baru merdeka. China mencari perdamaian dengan negara lain di seluruh dunia dan terutama berusaha bekerja keras untuk menciptakan perdamaian di sekitar China. Oleh karena itu, China membentuk perjanjian dengan India dan Myanmar untuk hidup berdampingan secara damai yang dituangkan dalam Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai.

Lima prinsip ini kemudian diikuti juga oleh negara-negara lain. Pada tahun 1955, Konferensi Asia Afrika yang diikuti oleh 20 negara mengadaptasi Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai. Namun realitanya, lima prinsip ini tidak hanya diadaptasi oleh negara-negara Asia Afrika saja, melainkan juga oleh mayoritas negara-negara lainnya karena inti dari lima prinsip ini terdapat pada sebagian besar perjanjian-perjanjian internasional.

Dalam sebuah pidato Perdana Menteri China Wen Jiabao menyatakan bahwa Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai sampai waktu kapan pun akan tetap berguna dan dapat memberikan kontribusi dalam menjaga perdamaian dan kestabilan di Asia serta dalam berhubungan bernegara secara global.⁹⁶ Hal ini dikarenakan lima prinsip ini memberikan kerangka yang jelas tentang bagaimana

⁹⁶ Pidato Perdana Menteri China Wen Jiabao, <http://www.fmprc.gov.cn/eng/topics/seminaronfiveprinciples/t140777.htm>, diakses pada tanggal 2 Juli 2008

seharusnya membangun dan mengembangkan hubungan antar negara baik dengan ideologi yang sama maupun yang berbeda. Sehingga prinsip-prinsip ini bila diterapkan maka dapat meminimalisir ketegangan antar negara. Namun yang utama bagi negara-negara berkembang berkaitan dengan prinsip ini adalah prinsip ini melindungi kepentingan-kepentingan dari negara-negara berkembang.

China bukan hanya sebagai penyokong dari prinsip ini tapi juga pelaksana agar prinsip ini menjadi pilar dalam hubungan luar negeri China.⁹⁷ Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai terdapat dalam Undang-Undang China sehingga kebijakan luar negeri China berpijak pada kebijakan luar negeri yang bebas dan damai.

Berdasarkan pada prinsip ini, China membangun dan mengembangkan hubungan diplomatik dengan 165 negara yang kemudian hubungan ini berlanjut dengan hubungan perdagangan, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan pertukaran budaya serta kerjasama-kerjasama lainnya. China mencari perdamaian melalui jalur diplomasi dan mementingkan paling utama menjaga kedamaian dan kestabilan regional.

Sedangkan dalam rangka memperkuat hubungan dengan negara-negara yang bukan dalam satu regional, China menyediakan bantuan ekonomi dan teknikal yang tidak dilatari dengan maksud politik tertentu. Hal ini dikarenakan sejak China mereformasi dan membuka perekonomian China bagi dunia, China telah mendapatkan kerjasama yang saling menguntungkan dari seluruh negara dan bangsa di dunia tanpa melihat sistem pemerintahan, ideologi dan tingkat ekonomi sehingga China ingin memberikan kontribusi kembali kepada dunia sesuai dengan lima prinsip ini.⁹⁸

Perdana Menteri Wen Jiabao menegaskan bahwa lima prinsip ini sejalan dengan tujuan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Piagam PBB. Namun prinsip ini memberi penekanan yang sangat mendalam terhadap prinsip kedaulatan.⁹⁹ Hubungan dan kerjasama antar negara dapat berjalan dengan harmonis bila memperhatikan pentingnya kedaulatan dan persamaan bagi semua

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

negara. Semua negara dan bangsa memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri sistem pemerintahannya, perekonomiannya dan lain-lain yang berkaitan dengan negaranya. Tidak ada pihak luar yang dapat memasuki bagian dari kedaulatan negaranya tersebut.

3.2 Kerjasama China-Afrika

Kerjasama China dengan negara-negara di benua Afrika berawal ketika pada tahun 1950an untuk pertama kalinya dibuka hubungan diplomatik. Setelah China dengan India dan Myanmar menyepakati Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai sebagai landasan hubungan mereka, prinsip ini juga diadaptasi oleh negara-negara Asia lainnya dan Afrika yang bergabung dalam Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. China merupakan salah satu negara yang ikut dalam konferensi itu.

Kesempatan China bergabung dalam konferensi itu, dimanfaatkan oleh China untuk mempromosikan pentingnya kedaulatan, anti imperialisme dan anti kolonialisme. Selain itu, konferensi itu digunakan juga oleh China untuk menggalang dukungan dari negara-negara Asia Afrika terhadap kebijakan Satu China yang artinya hanya ada satu China yaitu Republik Rakyat China dan Taiwan merupakan bagian dari China. Sehingga tidak ada yang namanya Satu China dan Satu Taiwan.¹⁰⁰

Setelah kematian Mao Zedong pada tahun 1976, China mengubah strategi kebijakan pemerintah dengan menempatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sebagai prioritas dari kepentingan nasional.¹⁰¹ Agar perekonomian China dapat tumbuh dan berkembang maka China membutuhkan investasi ke dalam negeri sehingga China harus menghindari konflik-konflik internasional. Hal ini berarti kepentingan nasional China harus selaras dengan kebijakan luar negeri

¹⁰⁰ *One China Policy: Time for Change*, www.pacforum.org, diakses pada tanggal 24 Oktober 2008

¹⁰¹ Patrick Franzese, *China's Non Interference Policy in Africa: Can it Survive?*, <http://www.patrickfranzese.au.edu/ACSF/Franzese/AY08.pdf>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2008

China yaitu kebijakan luar negeri China yang menekankan pada lima prinsip, oposisi terhadap hegemoni dan lebih percaya atas kemampuan sendiri.

Pada tahun 1970an hubungan China dengan Afrika dapat dikatakan merenggang. Meskipun secara politis negara-negara Afrika telah membantu China untuk mendapatkan posisi di PBB, China melihat Afrika tidak dapat membantu dalam pertumbuhan ekonominya.¹⁰² Selain karena faktor perekonomian negara-negara Afrika yang lemah, juga dikarenakan China bersaing dengan Afrika dalam hal bantuan internasional dan investasi. Selain itu, keadaan politik negara-negara Afrika yang tidak stabil sehingga mudah terpengaruh oleh AS atau Uni Soviet, menyebabkan China memandang antara China dengan Afrika tidak memiliki kepentingan yang sama lagi.

Akhir tahun 1980an, faktor perekonomian China yang mulai membaik dan bubarnya Uni Soviet, menyebabkan China kembali berfokus terhadap Afrika. Hubungan dengan Afrika lebih semakin ditingkatkan terutama setelah insiden Tiananmen pada tahun 1989. China berusaha mencari dukungan internasional dari Afrika dan negara-negara Dunia Ketiga lainnya setelah China mendapatkan isolasi dan tekanan dari Barat atas kejadian itu. Barat, khususnya AS, mengecam tindakan yang dilakukan China. Namun negara-negara Afrika tidak mengikuti jejak Barat yang mengecam China tapi juga tidak menunjukkan reaksi dukungan yang berlebihan. Para pemimpin Afrika umumnya melihat bahwa kecaman Barat terhadap China merupakan siasat untuk menghambat modernisasi perekonomian China. Dukungan ini membuat China lebih intensif dalam menjalin hubungan dengan Afrika.

Salah satu bentuk komitmen China dalam menguatkan hubungan dengan Afrika adalah bantuan yang diberikan China ke Afrika meningkat setelah kasus Tiananmen. Ketika pada tahun 1988, bantuan yang diberikan sebesar US \$60 juta; pada tahun 1989 menjadi US \$223 juta dan setelah Tiananmen menjadi US \$374 juta. Namun China menegaskan berulang kali bahwa bantuan-bantuan yang diberikan tidak ada hubungannya dengan ideologi atau syarat-syarat lainnya.

¹⁰² *Ibid.*

China tetap berpegang pada prinsip menghormati kedaulatan dan non intervensi terhadap urusan domestik negara lain. Prinsip-prinsip ini yang merupakan bagian dari lima prinsip, dipromosikan oleh China sebagai landasan dasar berhubungan internasional negara berkembang.

Pada saat yang bersamaan Barat juga sedang mempromosikan sistem demokrasi dan hak asasi manusianya. Ketika Perang Dingin berakhir, terjadi gelombang kampanye demokrasi yang dipromosikan oleh AS dan sekutunya di Afrika.¹⁰³ Kampanye-kampanye yang mempromosikan liberal, demokrasi dan hak asasi manusia menjadi ancaman bagi sebagian besar pemimpin-pemimpin negara-negara Afrika yang menganut rezim militer dan otoriter.

Para pemimpin Afrika mencurigai bahwa kampanye ini hanya alat untuk Barat menguasai negara mereka dengan mengganti sistem pemerintahan. Afrika masih mengingat bagaimana Barat menjajah Afrika sehingga timbul rasa curiga bahwa Barat akan melakukannya lagi. China mengambil kesempatan ini untuk meyakinkan negara-negara Afrika bahwa hak asasi bagi negara berkembang adalah hak untuk memiliki perekonomian yang baik sehingga dapat bertahan hidup.¹⁰⁴ Selain itu, kepentingan hak asasi tidak bisa melewati di atas kedaulatan. Pemikiran ini dapat diterima oleh pemimpin-pemimpin Afrika sampai sekarang dan berpandangan bahwa pemerintah dari satu negara tidak mempunyai hak untuk mengkritisi pemerintah dari negara lain. Sehingga promosi China tentang Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai dapat diterima oleh pemimpin-pemimpin Afrika, terutama prinsip non intervensi dalam urusan dalam negeri negara lain.

Kepentingan China dalam menjalin hubungan dengan Afrika di tahun-tahun berikutnya hingga sekarang tidak mengalami perubahan. Fokus China diantaranya memastikan agar negara-negara Afrika tidak mengakui Taiwan sebagai negara yang berdaulat.¹⁰⁵ Hal ini masih menjadi fokus dari kebijakan luar negeri China

¹⁰³ Ian Taylor, *Loc. Cit.*, hal. 6

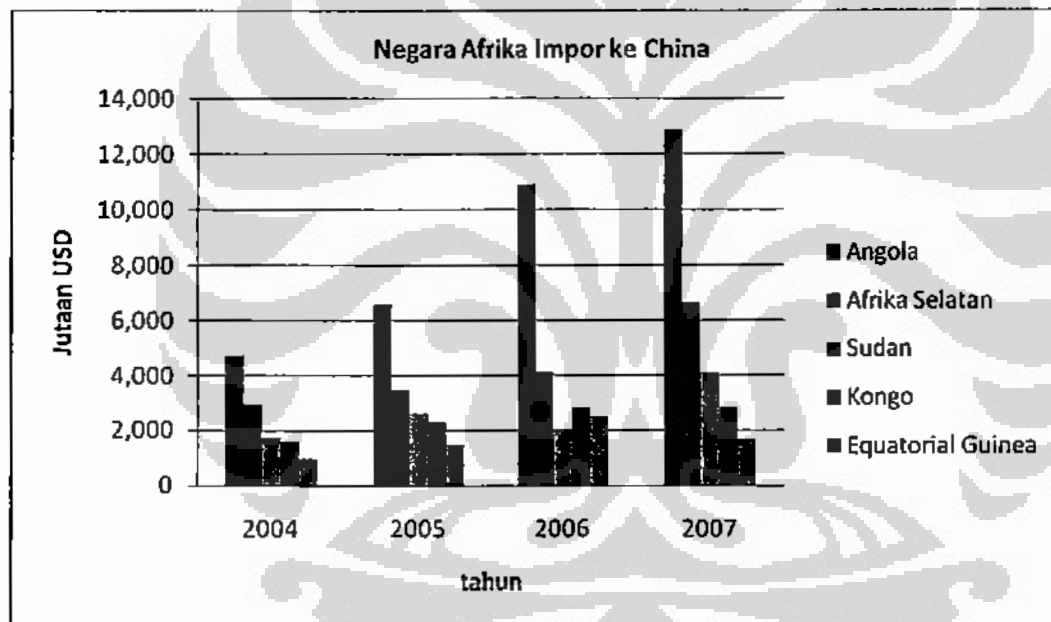
¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Patrick Franzese, *Op. Cit.*

terutama di Afrika dikarenakan saat ini masih ada negara-negara Afrika yang mengakui Taiwan sebagai negara yang merdeka.

Fokus China lainnya adalah kebutuhan China terhadap sumber-sumber daya alam dan energi serta perdagangan. Dalam hal perdagangan, impor China dari Afrika telah mengalami peningkatan yang signifikan. Secara keseluruhan, Afrika saat ini merupakan pengimpor China ke tujuh terbesar di tahun 2007. Gambar diagram berikut ini menunjukkan beberapa negara-negara Afrika pengimpor ke China.

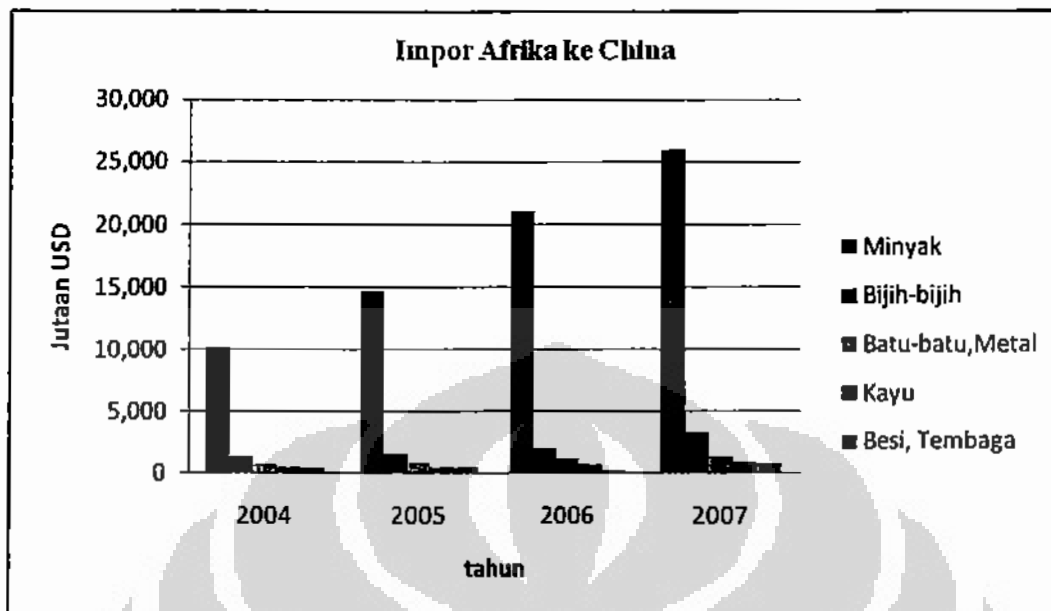
Gambar Diagram 3.1



Sumber: Laporan Kongres AS, *China's Economic Conditions*

Pencarian terhadap sumber-sumber alam dan energi menjadi semakin meningkat bersamaan dengan meningkatnya perekonomian industri China. Sumber energi minyak menjadi pusat perhatian China khususnya, tanpa menganggap sumber alam dan energi yang lainnya tidak penting, karena kebutuhan China terhadap minyak juga semakin meningkat.

Gambar Diagram 3.2



Sumber: Laporan Kongres AS, *China's Economic Conditions*

Gambar diagram diatas menunjukkan bahwa minyak merupakan sumber alam terbesar yang diimpor ke China. Oleh karena itu, eksplorasi dan produksi minyak menjadi salah satu China berinvestasi di Afrika.

Afrika memegang 9% dari persediaan cadangan minyak dunia, sangat sedikit bila dibandingkan dengan Arab Saudi dan Rusia tapi minyak-minyak di Afrika menjadi sangat penting ketika permintaan terhadap minyak sangat tinggi dan tidak ada persediaan yang mencukupi. Negara-negara Afrika yang menjadi suplier minyak ke China antara lain, yaitu Angola, Sudan, Kongo, Equatorial Guinea dan Libya. Tabel berikut ini menjelaskan berapa jumlah yang didapat oleh negara-negara Afrika impor minyak ke China pada tahun 2007.

Tabel Negara Afrika Impor Minyak ke China

Negara	Impor (Jutaan USD)
Angola	12.876
Sudan	4.086
Kongo	2.307
Equatorial Guinea	1.566
Libya	1.528
Total	25.997

Sumber: Laporan Kongres AS, *China's Economic Conditions*

Dalam hubungannya dengan Sudan, China mendapatkan kesempatan yang unik untuk dapat menguasai minyak Sudan. Hal ini dikarenakan situasi politik dan keamanan Sudan telah membuat banyak perusahaan-perusahaan AS, Kanada dan Eropa yang keluar dari Sudan.¹⁰⁶ Sehingga Sudan beralih ke China untuk menawarkan pengembangan minyak di Sudan. China menerima tawaran itu dengan tangan terbuka karena pada umumnya perusahaan-perusahaan Barat yang menguasai perminyakan di negara-negara Afrika lainnya.¹⁰⁷ Selain itu, keadaan hubungan luar negeri China tidak terjalin baik dengan negara-negara Barat dan sekutunya pasca tahun 1989 sehingga China melihat Sudan dan negara-negara Afrika lainnya sebagai sekutu politik yang penting. Selain itu, sebagai negara terbesar di benua Afrika, pertimbangannya bagi China bahwa Sudan memiliki sumber daya alam dan energi yang melimpah dan potensi pasar serta sumber-sumber energi lainnya yang bisa didapatkan oleh China karena sedikitnya saingan bisnis.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Beberapa perusahaan Eropa secara administratif, masih ada yang tidak meninggalkan Sudan tapi tidak melakukan pengeboran minyak.

¹⁰⁷ Daniel Large, *Sudan's Foreign Relations with Asia*, <http://www.cmi.no/sudan/doc/?id=937>, diakses pada tanggal 24 Juli 2008

¹⁰⁸ *Ibid.*

Sudan memiliki sumber minyak yang tidak banyak dibandingkan dengan negara-negara pengeksport minyak lainnya tapi Sudan masih baru dan masih banyak kesempatan untuk menemukan sumber-sumber ladang minyak di Sudan. Saat ini, Sudan memegang 0,4% dari persediaan jumlah minyak dunia. Tiap harinya menghasilkan 360.000 barel.¹⁰⁹

3.3 Kerjasama China-Sudan

a. Hubungan Ekonomi

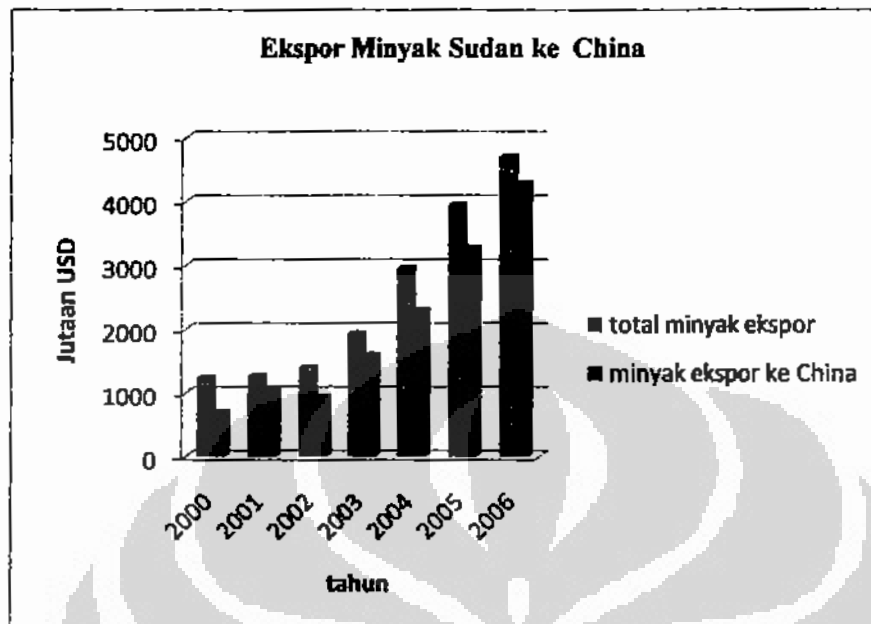
China adalah partner dagang dan investor terbesar di Sudan. Strategi investasi luar negeri China di Sudan pada umumnya berfokus pada sektor energi. Untuk mendapatkan energi, China memiliki pilihan strategi, antara langsung membelinya atau melakukan investasi. Pada tahun 2005, Sudan merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan investasi dari China dengan sebesar US \$ 352 Juta.¹¹⁰

Minyak merupakan persentase terbesar ekspor Sudan ke China. Permintaan China terhadap minyak Sudan dapat semakin meningkat terutama dipermudahkannya jalur pembelian perusahaan minyak China yang dapat meminta langsung kepemilikan terhadap minyak mentah Sudan sehingga perusahaan-perusahaan itu tidak perlu membelinya di pasar minyak internasional melainkan langsung kepada Pemerintah Sudan. Berikut ini adalah gambar diagram yang menunjukkan total minyak Sudan yang diekspor ke China.

¹⁰⁹ Cindy Hurst, "China's Oil Rush in Africa", *Energy Security Report*, Juli 2006

¹¹⁰ Wayne Morrison, *China's Economic Conditions*, www.crs.org, diakses pada tanggal 20 Oktober 2008

Gambar 3.3



Sumber: Central Bank of Sudan, www.cbos.gov.sd

Minyak menjadi faktor utama dalam hubungan ekonomi China dan Sudan dan selanjutnya juga akan masih demikian. Bersedianya China mengembangkan sektor perminyakan Sudan seperti datang harapan baru kepada Sudan setelah ditinggal oleh perusahaan-perusahaan dari Barat sehingga dapat mengembangkan industri ekspor minyaknya. Bagi Sudan, minyak mempunyai pengaruh politik.⁶⁷ Ketika perusahaan minyak AS, Chevron masih beroperasi di Sudan, minyak Sudan sudah sering dihubungkan dengan dinamika konflik yang sering terjadi di Sudan. Namun saat itu perusahaan minyak China tidak pernah bertindak sebagai *the sole oil operator* di Sudan dan ketika tidak ada lagi perusahaan minyak dari Barat, keterlibatan perusahaan minyak China, CNPC (China National Petroleum Corporation) menjadi salah satu faktor penentu bagi Sudan untuk menjadi negara pengekspor minyak.⁶⁸ Perusahaan China ini menjadi yang paling depan dalam

⁶⁷ Daniel Large, *Loc. Cit.*

⁶⁸ CNPC bersama dengan Petronas menggantikan operasi pengembangan minyak ketika ditinggal oleh perusahaan dari Kanada.

membangun strategi cara mengelola dan mengirimkan minyak yang berada di wilayah selatan Sudan ke Pelabuhan Sudan.

Pada tahun 1997, CNPC bergabung dalam konsorsium GNPOC (Greater Nile Petroleum Operating Company), CNPC mendapatkan perjanjian untuk mengelola blok 1, 2 dan 4 yang masing-masing terletak di Sudan Selatan. Konsorsium GNPOC membangun jalur minyak pipa untuk menghubungkan produksi minyak dengan pasar internasional. Pembangunan pipa tersebut terlaksana dalam dua tahun melalui bantuan tambahan dari CNPC.¹¹³

Jika kontribusi China terhadap pengembangan sektor perminyakan Sudan sangat signifikan maka Sudan juga sebaliknya telah membantu China untuk mengembangkan sektor perminyakan China di luar negeri. Keterlibatan China di Sudan telah menjadikan pengalaman yang sangat penting bagi pembangunan dan ekspansi perusahaan-perusahaan minyak nasional China di luar negeri. Tujuan dari perusahaan minyak nasional China untuk ekspansi ke luar negeri adalah agar terbentuk perusahaan-perusahaan yang mampu berkompetisi secara internasional dan memungkinkan China mengamankan persediaan energi. Oleh karena itu, Sudan berjasa dalam proses China melebarkan sektor perminyakan China di luar negeri, mengingat pengembangan sektor minyak Sudan secara teknis membawa risiko tinggi karena keamanan Sudan yang tidak kondusif.¹¹⁴

Meskipun hubungan antara China dan Sudan bermula pada sektor minyak, tidak menutup perusahaan-perusahaan China lainnya yang non minyak untuk aktif dalam berbagai sektor ekonomi Sudan lainnya, terutama dalam hal pengembangan infrastruktur. Proyek-proyek ini cukup memberikan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan China yang terlibat. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan milik negara sehingga proyek-proyek itu sebagian besar dipinjamkan dananya oleh negara.¹¹⁵

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Investing in Tragedy, Loc. Cit.*, hal. 2

Banyak proyek pengembangan infrastruktur yang telah dijalankan oleh perusahaan-perusahaan China. Namun hal ini tidak menghentikan perusahaan-perusahaan China untuk terus membangun infrastruktur Sudan yang diharapkan dapat pula memfasilitasi para pekerja China yang berada di Sudan, selain juga untuk mendapatkan keuntungan. Sementara dunia internasional sedang berfokus pada penyelesaian konflik Darfur, perusahaan-perusahaan China milik negara lebih berfokus untuk menjalankan transaksi dengan Pemerintah Sudan.¹¹⁶ Proyek-proyek yang masih dalam tahap perencanaan diantaranya adalah pembangunan jalur kereta api dari ibukota Khartoum sampai Pelabuhan Sudan, Bendungan Merowe dan Bendungan Kajbar. Ketiga proyek ini merupakan sekian dari proyek besar yang melibatkan perusahaan-perusahaan China.

Pada awal 2007, antara Pemerintah Sudan dengan salah satu perusahaan China milik negara, China Railway Engineering Group, ditandatangani perjanjian untuk dibangunnya jalur dari kereta api dari Khartoum menuju Pelabuhan Sudan. Perjanjian ini diperkirakan bernilai sampai US \$ 1,15 Milyar. Dengan demikian, perjanjian ini merupakan perjanjian investasi terbesar yang pernah dijalankan oleh antar kedua negara.¹¹⁷

Sedangkan untuk proyek Bendungan Merowe direncanakan agar dapat meningkatkan dua kali lipat kapabilitas listrik Sudan. Proyek ini merupakan proyek hidroelektrik terbesar di benua Afrika setelah pembangunan Bendungan Aswan High di Mesir pada tahun 1960an. Sebenarnya proyek ini sudah lama ada sejak tahun 1990an tapi tidak pernah terlaksanakan.

Jika proyek Bendungan Merowe jadi terselesaikan, maka biaya total yang harus dikeluarkan diperkirakan sebesar US \$ 1,9 Milyar. Namun demikian, perusahaan China tidak mengkhawatirkan angka tersebut, bahkan perusahaan China berhasil mendapatkan proyek ini karena mampu mengalahkan penawar dari perusahaan-perusahaan negara lain yaitu seperti dari perusahaan Alstom (Perancis), Lahmeyer International (Jerman) dan ABB (Swiss). Perusahaan China

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

tersebut mampu menyelesaikan proyek ini hanya dengan sebesar US \$400 juta. Hal ini dikarenakan proyek ini akan didanai dalam bentuk pinjaman Pemerintah China yang disediakan melalui Bank Expor Impor China.

Sementara itu, perusahaan China milik negara lainnya bersama dengan perusahaan Sudan, terlibat dalam proyek Bendungan Kajbar yang menghabiskan biaya sebesar US \$200 Juta. Bendungan ini diharapkan dapat menghasilkan listrik sebesar 300 megawatt. Lokasi Bendungan Kajbar berada di sepanjang Sungai Nil dekat antara perbatasan Mesir Sudan.

b. Hubungan Politik

Sejak lama China melihat bahwa hubungan diplomatik China dengan negara-negara Afrika termasuk Sudan, sebagai suatu yang penting. Hubungan politik China Sudan bermula difokuskan kepada tujuan China untuk mencegah negara-negara Afrika mengakui Taiwan sebagai negara yang berdaulat tapi melihat Taiwan sebagai bagian dari China. Sudan merupakan salah satu dari negara di Afrika yang tidak pernah mengakui kedaulatan Taiwan dan Sudan juga tidak pernah menjalin hubungan ekonomi dengan Taiwan. Selain berkaitan dengan masalah Taiwan, hubungan politik ini juga terbina sebagai solidaritas sesama negara berkembang yang menjalin hubungan perdagangan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dalam menjalin kerjasama, China tidak memperhatikan sistem politik yang diterapkan dari negara itu dan tidak mencampuri urusan dari dalam negeri dari suatu negara, dan menerapkan kebijakan non intervensi terhadap urusan domestik. Prinsip ini telah mempermudah China untuk membentuk kerjasama dengan negara-negara Afrika, tak terkecuali dengan Sudan.¹¹⁸ Sebaliknya urusan dalam negeri China juga tidak pernah menjadi persoalan bagi negara-negara Afrika. Hal ini terbukti ketika China mendapatkan kritikan dari dunia Barat pada tahun 1989 terkait dengan kasus Tiananmen. China dianggap telah melanggar hak kebebasan

¹¹⁸ *China in Sudan: Having it Both Ways*, www.savedarfur.org, diakses pada tanggal 24 Agustus 2008

demokrasi rakyatnya. Namun negara-negara Afrika yang berbeda dengan negara-negara Barat, menyatakan dukungannya terhadap China setelah kejadian itu.

Kebijakan non intervensi tidak hanya terkait dengan masalah domestik, tapi juga dalam pemberian bantuan China ke Sudan. Yang dimaksud dengan non intervensi disini adalah bahwa bantuan diberikan tanpa ada maksud politik dibelakangnya atau syarat-syarat tertentu.¹¹⁹

c. Hubungan Militer

China tetap mempertahankan hubungan pertahanan dengan Sudan, meskipun PBB mengeluarkan embargo terhadap jual beli senjata dengan Sudan yang berlaku sejak tahun 2005.¹²⁰ DK PBB mengeluarkan embargo bahwa tidak boleh adanya transaksi jual beli antara individu, organisasi dan non pemerintah di Darfur yang berlaku sejak tahun 2004. Namun embargo ini diperpanjang dan dimasukkan juga larangan transaksi jual beli senjata termasuk juga dengan pemerintah dan berlaku untuk seluruh wilayah Sudan.

¹¹⁹ Gernot Pehnelt, *The Political Economy of China's Aid Policy in Africa*, <http://www.jenecon.de>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2008

¹²⁰ "Arms, Oil and Darfur", *Sudan Issue Brief*, No.7, Juli 2007, <http://www.smallarmsurvey.org>, diakses pada tanggal 30 Juli 2008

BAB 4 KEBIJAKAN LUAR NEGERI CHINA TERHADAP KONFLIK DARFUR

4.1 Faktor Internal

Faktor Internal kebijakan luar negeri China merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam negeri China yang secara signifikan mempengaruhi kebijakan luar negeri China terhadap konflik Darfur. Dalam tesis ini akan dijelaskan dua faktor internal, yakni (1) prinsip *non interference*; (2) keamanan energi China di Sudan.

4.1.1 *Non interference*

China telah lama melihat bahwa hubungan China dengan negara-negara Afrika merupakan hubungan yang secara diplomatik sangat penting, termasuk dengan Sudan. Hubungan ini berlandaskan pada lima prinsip hidup damai secara berdampingan (*five principles of peaceful co-existence*). Lima prinsip ini memiliki pemaknaan sebagai berikut:¹²¹ (1) penghormatan terhadap kedaulatan adalah prinsip fundamental dalam hubungan internasional; (2) tidak melakukan agresi artinya tidak mengindahkan penggunaan militer sebagai ancaman ataupun melakukan agresi militer terhadap suatu negara; (3) *non interference* dalam urusan masing-masing negara bermaksud untuk memberikan jaminan bahwa tiap negara berhak mengatur urusan dalam negerinya sendiri dan tidak perlu adanya campur tangan dari pihak luar dalam bentuk intervensi apapun; (4) persamaan dan saling menguntungkan berarti bahwa adanya persamaan dalam politik dan ekonomi dan menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan; sedangkan (5) *peaceful co-existence* berarti meminta semua negara untuk menciptakan perdamaian, mengurangi perbedaan, saling menghargai, mempertahankan hubungan kerjasama dan hidup dalam harmoni meskipun berbeda dalam sistem sosial dan ideologi.

¹²¹ Robert Sutter, *Chinese Foreign Relations: Power & Policy since the Cold War*, (Maryland: Rowman & Littlefield Publishers Inc., 2008), hal. 30

Dalam hubungannya dengan negara-negara Afrika, China selalu menekankan identitasnya sebagai negara berkembang, dan membandingkan pengalaman China dengan negara-negara Afrika yang sama-sama pernah merasakan penjajahan. Hubungan luar negeri China tidak berdasarkan pada ideologi sehingga China akan menjalin kerjasama dengan negara atau tokoh politik manapun yang sesuai dengan kepentingan nasional China.¹²² Oleh karena itu, China tidak berkeinginan untuk mencampuri urusan dalam negeri dari suatu negara, dan berusaha memisahkan urusan politik dengan ekonomi. Seperti pernyataan dari Deputy Kementerian Luar Negeri, Zhou Wenzhong pada tahun 2004 ketika ditanya tentang konflik Darfur:¹²³

“Business is business. We try to separate politics from business. Secondly, I think the internal situation in the Sudan is an internal affair, and we are not in a position to impose upon them.”

“Bisnis adalah bisnis. Kami berusaha untuk memisahkan politik dari bisnis. Selain itu, situasi yang terjadi di Sudan merupakan urusan dalam negeri dan kami tidak berada dalam suatu posisi untuk memaksakan sesuatu terhadap Sudan.”

Kebijakan *non interference* China bertolak belakang dengan kebijakan Amerika Serikat yang terumus dalam *National Security Strategy of the United States of America* (NSS). Salah satu kebijakan yang terdapat dalam NSS itu adalah untuk mempromosikan demokrasi dan *good governance*. AS berkeyakinan bahwa negara-negara Afrika perlu meningkatkan sistem pemerintahannya ke arah yang lebih demokratis, jujur, bersih dan mengurangi korupsi serta mereformasi perekonomiannya.¹²⁴ Bila China berhubungan dengan negara-negara Afrika tanpa syarat apapun, maka AS dan juga sebagian besar negara Barat akan menuntut

¹²² Patrick Franzese, *Loc. Cit.*, hal. 62

¹²³ David Zweig & Bi Jianhai, *Loc. Cit.*, hal. 9

¹²⁴ *Op. Cit.*

perubahan sebelum menjalin kerjasama atau memberi dukungan terhadap negara itu.

Posisi China terhadap isu pelanggaran hak asasi manusia dalam suatu negara juga sama bahwa China akan menerapkan kebijakan *non interference*. Hal ini dikarenakan China memiliki pandangan bahwa tiap negara memiliki definisi dan pandangan yang berbeda-beda tentang hak asasi manusia sehingga tiap negara memiliki caranya masing-masing bagaimana memberikan hak asasi bagi warganya.¹²⁵ Bila negara lain tetap memaksakan penerapan sistem demokratis dan hak asasi manusia ke suatu negara maka hal itu sama juga dengan tidak menghormati kedaulatan dari negara itu.¹²⁶

4.1.2 Keamanan Energi China di Sudan

Keamanan energi China di Sudan yang menjadi sorotan publik dan dihubungkan dengan proteksi China terhadap Pemerintah Sudan adalah minyak. Oleh karenanya akan ditinjau seberapa besar keamanan energi China, dalam hal ini minyak, di Sudan.

China menjadi negara pengimpor minyak sejak mulai tahun 1993 dan konsumsi China terhadap minyak sejak saat itu meningkat tajam. Pada tahun 2004, China menjadi negara konsumen minyak kedua terbesar di dunia melewati Jepang dan dibawah AS.¹²⁷ Hal ini menyebabkan China harus mengimpor minyak untuk persediaan dalam negerinya. Pada tahun 2025, China diestimasikan akan mengimpor minyak sebanyak AS mengimpor minyak untuk saat ini.¹²⁸

¹²⁵ Wawancara langsung dengan Zhu Liqun dari Dosen Foreign Affairs University of Beijing di Universitas Indonesia, Depok

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Untuk melihat perbandingan minyak yang diimpor antara China, AS dan Jepang maka dapat melihat pada tabel 1.1

¹²⁸ Zha Daojing, "China's Energy Security and Its International Relations", *The China and Eurasia Forum Quarterly*, Vol. 3 No.3, November 2005, hal. 42

Perusahaan minyak China yang paling besar dalam sektor perminyakan di Sudan adalah CNPC.¹²⁹ CNPC merupakan suplier minyak mentah dan gas alam terbesar China dan mempunyai jaringan hampir di seluruh dunia. Perusahaan ini mampu menghasilkan lebih dari US \$ 10 Milyar pada tahun 2007.¹³⁰

Hubungan antara CNPC dan Sudan adalah hubungan simbiosis. CNPC menempatkan Sudan sebagai tujuan investasi luar negeri terbesarnya dan CNPC juga telah membantu Sudan dalam mengembangkan sektor perminyakan ketika saat itu tidak ada yang membantu. Sedangkan CNPC bagi Sudan merupakan investor terbesar dalam sektor perminyakan Sudan.

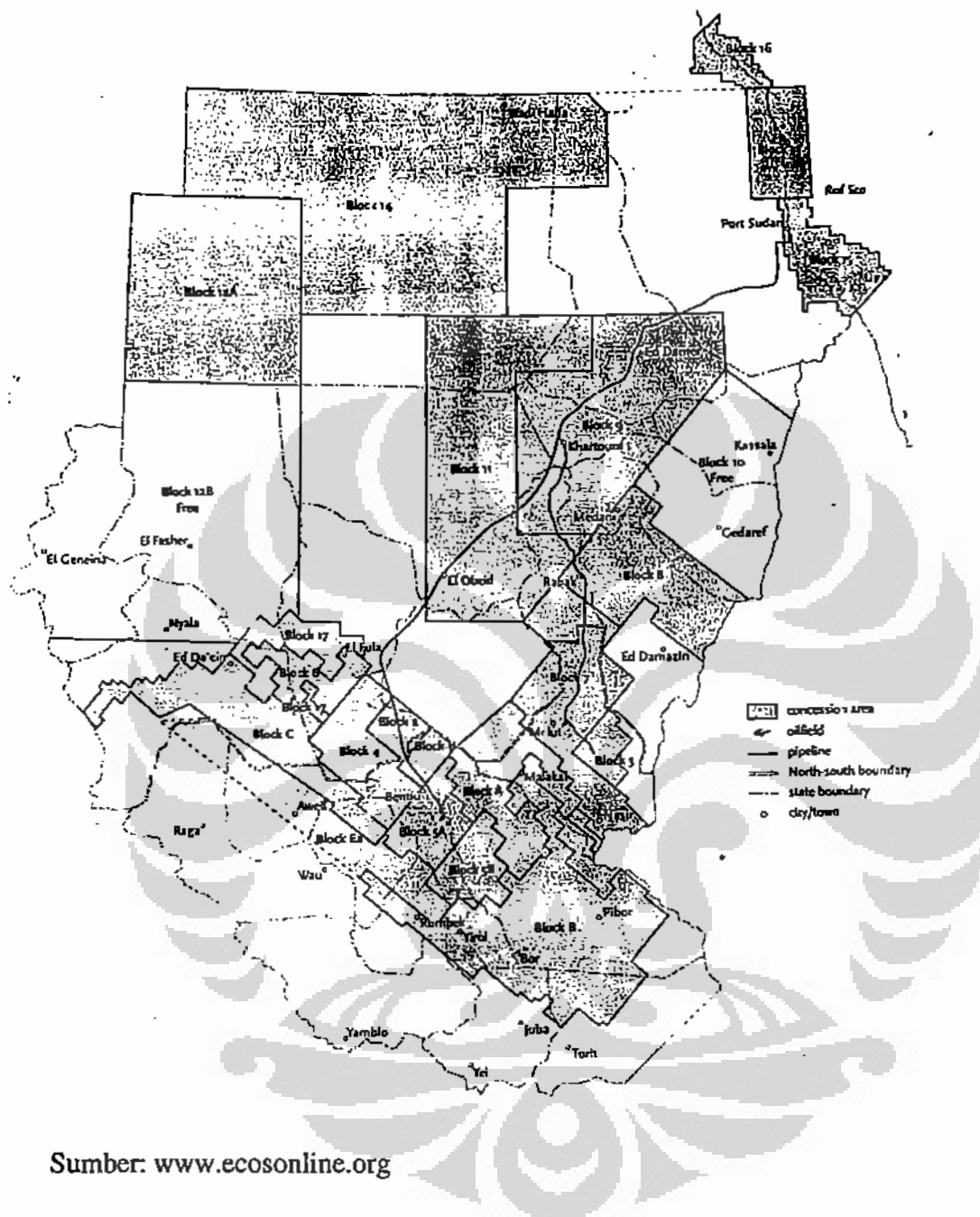
CNPC menandatangani kontrak pertama dalam mengoperasikan minyak Sudan pada tahun 1995. Dua tahun kemudian, CNPC membeli 40% saham terbesar dalam konsorsium minyak Sudan yaitu GNPOC. Dewasa ini, GNPOC terdiri dari empat perusahaan minyak dan CNPC bertindak sebagai operator dalam proyek penyulingan konsorsium. CNPC memegang blok 1,2 dan 4. Hampir seperempat dari keseluruhan minyak Sudan berada di daerah konsorsium yang dikuasai CNPC ini. Bahkan sampai pada tahun 2005, blok-blok yang dikuasai CNPC merupakan satu-satunya sumber produksi minyak Sudan. Sebagai pemilik saham terbesar di konsorsium GNPOC, CNPC diperkirakan telah menginvestasikan lebih dari US \$ 4Milyar. Selain di blok 1,2 dan 4, CNPC juga memiliki hak dalam konsesi blok 3, 6, 7, 13 dan 15. Untuk kawasan Sub Sahara Afrika, Sudan merupakan produsen minyak ketiga terbesar setelah Nigeria dan Angola¹³¹, dan produksi minyak tersebut berasal sebagian besar dari konsorsium GNPOC. Peta blok dapat dilihat di halaman berikut ini.

¹²⁹ *Investing in Tragedy, Loc. Cit.*, hal. 2

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Sudan Now Africa's Third Largest Oil Producer*, <http://www.afrol.com/articles/21889> diakses pada tanggal 2 November 2008

Gambar Peta Blok Ladang Minyak di Sudan



Sumber: www.ecosonline.org

Impor China terhadap minyak Sudan sangat sedikit bila dibandingkan dengan impor minyak China dari negara-negara lain. Minyak Sudan hanya menempati 6% dari total keseluruhan impor minyak China pada tahun 2007. Namun demikian, CNPC tetap menandatangani perjanjian kerjasama untuk produksi bersama dengan perusahaan minyak lainnya di blok 15 pada bulan

Agustus 2005 dan blok 13 pada bulan Juni 2007. Berikut tabel eksplorasi dan produksi CNPC di Sudan.

Tabel Eksplorasi dan Produksi Aset CNPC di Sudan

Blok	Tahun Mulai Kerjasama	Saham yang dimiliki CNPC
13	2007	40%
15	2005	35%
3 & 7	2004	41%
1,2 & 4	1997	40%
6	1995	95%

Sumber: CNPC, Perusahaan Minyak China milik Negara

Perusahaan minyak China dan Sudan juga telah membawa hubungan mereka dalam sektor perminyakan melebihi dari hanya sebatas penyulingan saja. Ladang-ladang minyak Sudan sebagian besar terdapat di lokasi-lokasi pedalaman Sudan yang jauh dari Pelabuhan Sudan sehingga untuk transportasi minyak dibutuhkan jalur pipa minyak yang dapat membawa minyak tersebut ke pelabuhan.

Jalur-jalur pipa minyak Sudan semuanya di bangun oleh perusahaan-perusahaan minyak China. Paling panjang adalah yang terdapat di konsorsium GNPOC, sepanjang 1500 km dari blok 1 sampai dengan Pelabuhan Sudan. Pipa ini dioperasikan oleh GNPOC dan dibangun oleh CNPC. Jalur pipa minyak yang terdapat di blok 3 yang memiliki panjang 1000 km, menuju ke Pelabuhan Sudan juga dibangun oleh perusahaan minyak China lainnya, yaitu dari Sinopec Group.

Pembangunan infrastruktur lainnya yang berhubungan dengan sektor perminyakan adalah pengembangan dua terminal pelabuhan minyak untuk mengangkut dan menyimpan lebih dari 400 ribu barel minyak yang akan

diekspor.¹³² Meskipun Pemerintah Sudan yang memiliki kedua terminal, GNOPC merupakan operator dari terminal 1 sedangkan terminal 2 dipegang oleh Petrodar.¹³³ Kedua terminal ini baru diresmikan pada bulan Juli 2007 dengan kontraktornya adalah CPECC (China Petroleum Engineering Construction Corporation) yang merupakan anak cabang dari CNPC.¹³⁴

Selain pengembangan infrastruktur, China dari awal sampai sekarang masih merupakan partner yang penting bagi pengembangan penyulingan minyak Sudan. Hal ini dikarenakan Sudan tidak memiliki kemampuan penyulingan yang cukup di dalam negeri sehingga harus mengimpor minyak yang sudah disaring. Dengan adanya perusahaan China yang bersedia investasi dalam penyulingan maka Sudan tidak perlu mengimpor dan menghasilkannya sendiri untuk kebutuhan konsumsi domestik.

4.2 Faktor eksternal

Bagi dunia, bila melihat konflik Darfur maka kemungkinan hanya dipandang sebagai salah satu dari sekian permasalahan yang terdapat di benua Afrika. Konflik-konflik yang terjadi di negara-negara Afrika sudah sering terjadi, dan banyak dari konflik-konflik tersebut yang berlangsung sudah cukup lama, belum juga ditemukan solusi yang tepat yang dapat memuaskan semua pihak yang bertikai. Sehingga bila muncul konflik baru, maka hanya akan dilihat sebagai salah satu konflik yang sering terjadi di Afrika, dan bila media massa internasional, baik elektronik maupun cetak, meliput konflik-konflik itu, maka akan mengait-kaitkannya dengan isu kemanusiaan. Respon dari negara-negara lain juga pada umumnya mengecam karena dampak yang ditimbulkan pada sisi kemanusiaan dan membantu dalam bentuk pemberian bantuan kemanusiaan. Dalam kasus Darfur, respon yang ditinjau berasal dari AS, Uni Eropa, PBB dan Uni Afrika serta media massa internasional menjadi faktor eksternal yang

¹³² *Investing in Tragedy, Op. Cit*

¹³³ Petrodar adalah konsorsium yang memiliki hak untuk mengelola blok 3 dan 7 dimana CNPC adalah pemegang saham terbesar di konsorsium itu.

¹³⁴ *Ibid.*

mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri China. Selain itu, hubungan China Afrika juga menjadi pertimbangan dalam China melihat kasus Darfur.

4.2.1.1 Media Massa Internasional

Pada awalnya, media massa internasional tidak memperhatikan bahwa telah terjadi konflik di Darfur dan menimbulkan krisis kemanusiaan yang sangat memprihatinkan.¹³⁵ Hal ini disebabkan media saat awal konflik Darfur terjadi, sedang memperhatikan Naivasha, Kenya yaitu tempat proses perdamaian Utara Selatan dalam konflik Sudan Selatan yang sedang berlangsung. Kalaupun melihat bahwa ada kekerasan yang terjadi di Darfur, dilihat sebagai hal yang tidak istimewa karena di Darfur memang sering terjadi konflik-konflik yang berskala kecil.

Kondisi di Darfur yang memburuk telah lama diketahui oleh dunia sekitar sejak tahun 1999. Kondisi yang buruk ini dilihat oleh dunia internasional sebagai suatu akibat dari pemerintahan yang buruk yang tidak memperhatikan rakyatnya sehingga konflik mudah meletus untuk segala macam hal, namun masih bisa diselesaikan secara adat sehingga tidak sampai menimbulkan konflik yang berkepanjangan hanya sering terulang kembali. Sehingga saat itu bila memasukkan konflik-konflik seperti itu dalam media internasional maka liputan tentang konflik-konflik itu dapat diartikan lain-lain oleh pihak-pihak tertentu. Konflik akan dicurigai sebagai manifestasi dari Pemerintah Sudan untuk mengalihkan dunia internasional dari proses perdamaian Utara Selatan atau dapat juga dicurigai sebagai usaha-usaha para pemberontak di Sudan Selatan untuk memperburuk citra kredibilitas Pemerintah Sudan sebagai rezim pemerintahan dengan syariat Islam sehingga semakin menimbulkan simpati dari negara-negara Barat yang mayoritas adalah non Muslim atau kecurigaan-kecurigaan lainnya.

Media Sudan sendiri baru memberikan perhatian lebih pada Darfur beberapa bulan setelah konflik tapi menyebut para pemberontak saat itu, seperti yang

¹³⁵ Gerard Prunier, *Loc. Cit.*, hal. 125

dilakukan oleh Pemerintah Sudan, dengan sebutan sebagai bandit-bandit yang telah melakukan kekerasan. Sedangkan kata Janjaweed pertama kali muncul baru pada bulan September 2003.¹³⁶ Media massa Sudan sama halnya dengan media massa internasional lebih memfokuskan terhadap perundingan Naivasha.

Media asing yang pertama kali yang dapat membuat perhatian dunia tertuju pada situasi di Darfur adalah media Perancis yang bernama *Le Monde* edisi 20 Januari 2004. Hal ini berhubungan dengan adanya kepentingan Perancis di Chad sehingga tertangkap oleh media Perancis kondisi sebenarnya di Darfur akibat berdatangnya para pengungsi dari Darfur ke perbatasan-perbatasan Chad. Sejak saat itu, media-media asing lainnya berlomba-lomba menyajikan juga liputan tentang Darfur.

Topik yang paling banyak ditampilkan oleh media massa internasional adalah bahwa di Darfur telah terjadi pembantaian terhadap warga Kulit Hitam yang dilakukan oleh etnik Arab. Topik ini sebenarnya menjadi agak lucu bila mengingat bahwa etnik Arab di Sudan juga berkulit hitam. Kemudian media mengubahnya menjadi 'Arab vs Afrika'.

Krisis kemanusiaan yang terjadi di Darfur memunculkan pula tuduhan bahwa telah terjadi aktivitas genosida yang dilakukan oleh Pemerintah Sudan. Isu genosida kemudian menjadi gencar diberitakan terutama setelah pernyataan dari Koordinator PBB Hak Asasi Manusia untuk Sudan, Mukesh Kapila, yang menyebutkan dalam satu wawancara dengan media cetak bahwa kondisi di Darfur telah berkembang menjadi salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia dan hanya beda dalam jumlah angka korban saja dengan kasus Rwanda. Tiba-tiba topik tentang agenda proses perdamaian Utara Selatan tidak lagi menjadi pusat perhatian tapi yang lebih menarik adalah yang mengenai pasukan Arab berkuda hitam yang dikirim oleh Pemerintah Sudan untuk membantai penduduk Darfur. Namun tidak semua media massa internasional yang berani untuk memasukkan istilah genosida dalam pemberitaannya, ada media lain yang cenderung berhati-hati untuk menyebutkan kategori krisis yang terjadi di darfur. Deskripsi krisis

¹³⁶ Ibid., hal. 126

Darfur yang biasa digunakan adalah dengan menyebutkan bahwa tindakan milisi Janjaweed sebagai kejahatan perang terhadap kemanusiaan atau ada juga yang mengemukakan bahwa krisis di Darfur sebagai pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar dan bencana kemanusiaan yang masif¹³⁷ sehingga perlu adanya penyelidikan terhadap tuduhan kejahatan kemanusiaan dan terjadinya genosida di Darfur serta pentingnya kerjasama internasional dalam menyelesaikan konflik ini.

Selain tentunya Sudan dan negara-negara Afrika lainnya yang menjadi perhatian media massa internasional dalam komitmen mereka menangani konflik Darfur, terdapat negara lain yang sering dihubungkan oleh media massa internasional yaitu China. Sorotan terhadap hubungan antara China dan Sudan menjadi perhatian media yang tidak luput juga untuk dihubungkan dengan konflik Darfur. Hal ini berawal ketika China sering memberikan suara abstain terkait yang berhubungan dengan resolusi DK PBB terhadap Pemerintah Sudan dan Darfur sehingga menimbulkan tanda tanya besar bagaimana komitmen keseriusan Pemerintah China ingin berperan dalam menangani konflik Darfur. China semakin menjadi sorotan setelah diadakan Forum Kerjasama antara negara-negara Afrika dan China di Beijing pada tahun 2006.¹³⁸ Sorotan itu semakin meningkat dalam satu tahun terakhir menjelang diselenggarakannya musim panas olahraga Olimpiade Beijing 2008.

Media massa internasional, terutama media Barat sangat mempersoalkan komitmen China dalam konflik Darfur. Bahkan propaganda-propaganda bahwa China telah menjadikan Sudan daerah kolonialnya juga beredar di sebagian besar media massa internasional. Slogan-slogan yang menentang China juga dapat ditemukan dengan mudah dalam situs-situs internet yang jangkauannya lebih mudah untuk dicapai. Isinya memuat hampr sama, yaitu bahwa China telah mementingkan kepentingan minyak sehingga mengorbankan penduduk Darfur, dan meminta juga agar pimpinan-pimpinan dunia untuk tidak menghadiri

¹³⁷ *Sudan, Oil and the Darfur Crisis*, www.guardian.co.uk, diakses pada tanggal 17 September 2008

¹³⁸ Forum itu juga dihadiri oleh Presiden Bashir, dan China banyak mendapat kecaman karena tidak menggunakan momentum itu untuk bersikap keras terhadap Presiden Bashir.

pembukaan Olimpiade di Beijing atau tidak mengirimkan atlet-atletnya ke Olimpiade Beijing sebagai bentuk keberatan terhadap China.

China juga mendapatkan tekanan dari Kongres AS yang mengirimkan surat kepada Presiden China, Hu Jintao. Isi dari surat itu intinya menyatakan keberatan Kongres AS terhadap minimnya usaha China untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk Darfur sehingga berkepanjangan. Kongres juga menyarankan agar Presiden Bush untuk tidak menghadiri pembukaan Olimpiade. Sedangkan dari pemerintahan Bush hanya berupa himbauan secara publik terhadap Pemerintah China agar lebih keras terhadap Sudan. Sementara itu, Uni Eropa mengancam melepas sahamnya yang terdapat di Petrochina sebagai bentuk keberatan karena China tidak memberi tekanan terhadap Pemerintah Sudan. Uni Eropa juga melakukan tekanan terhadap China di pertemuan ASEM pada bulan Mei 2007.

4.2.1.2 Amerika Serikat

Dalam melihat suatu permasalahan dalam hubungan internasional, pada umumnya suatu negara akan melihat kepentingan negaranya dalam permasalahan itu terutama negara besar seperti AS. Sebagian besar analisis politik internasional Amerika Serikat sepakat bahwa sulit untuk mengidentifikasi kepentingan AS di Sudan. Namun dikarenakan di masa lalu Sudan terbukti merupakan salah satu negara yang mensponsori dan melindungi organisasi teroris internasional maka kepentingan AS di Sudan memiliki keterkaitan dengan keamanan nasional AS yaitu kerjasama dalam perang terhadap teroris. Kepentingan AS yang lainnya terkait dengan penyebaran asas demokrasi dan hak asasi manusia. Semua kepentingan itu terdapat dalam NSS yang dikeluarkan oleh Pemerintah AS pada tahun 2002.¹³⁹ Oleh karena itu, AS dalam menanggapi konflik Darfur terdapat

¹³⁹ NSS adalah dokumen hasil laporan komprehensif mengenai strategi keamanan nasional AS yang disampaikan oleh Presiden AS kepada Kongres setiap tahunnya. Inti dari NSS 2002 disebutkan adanya transisi perubahan kebijakan luar negeri AS yang selama ini mengutamakan kerjasama global menjadi lebih terfokus kepada kepentingan domestik dan keamanan nasionalnya. Hal ini disebabkan munculnya ancaman dari negara yang didefinisikan sebagai *rogue state* yang

dua perbedaan pendapat tentang langkah apa yang harus dijalankan Presiden Bush sebagai Presiden Amerika Serikat.

Kelompok pertama berasal dari kelompok CIA (Central Intelligence Agency) dan DIA (Defence Intelligence Agency).¹⁴⁰ Kelompok ini berpendapat bahwa Sudan telah membantu AS dengan memberikan informasi penting yang berkaitan dengan terorisme. Selain itu, Sudan juga sudah mau bekerjasama dalam negosiasi perundingan damai Utara Selatan. Sehingga hal yang dapat dilakukan AS adalah dengan tidak terlalu menekan Pemerintah Sudan dan terutama tidak melakukan invasi militer ke Sudan.

Kelompok kedua adalah sebagian besar anggota Kongres AS yang anti terhadap rezim Bashir dan dari USAID yang menyalurkan dana bantuan kemanusiaan dalam jumlah yang signifikan. Kelompok ini berpendapat bahwa Pemerintah Sudan telah terbukti melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan NSS sehingga Amerika Serikat perlu berlaku keras terhadap Pemerintah Sudan. Kelompok ini juga mendapat dukungan dari organisasi-organisasi Protestan dan Yahudi dalam negeri. Organisasi-organisasi ini mendukung agar Pemerintah AS memberikan sanksi baru kepada Pemerintah Sudan.

Pada bulan Juli 2004, DPR dan Senat AS mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa krisis di Darfur sebagai genosida. Hal ini berdasarkan pada lima kriteria yang terdapat pada artikel no 2 dalam Konvensi Pencegahan dan Hukuman atas Kejahatan Genosida. Resolusi DPR AS No. 467 meminta pemerintahan Bush agar terus memimpin usaha dunia internasional untuk mencegah terjadinya genosida berkelanjutan di Darfur. Sedangkan Resolusi Senat AS No. 133 meminta pemerintahan Bush memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang telah melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan.

Pada tanggal 9 September 2004, Menteri Luar Negeri AS Colin Powell menyatakan di depan hadapan Komite Senator Hubungan Luar Negeri AS bahwa

mampu bekerjasama dengan jaringan teroris demi mencapai tujuan dan ambisinya. Hal lain yang disebutkan di dalam NSS ini adalah tentang pentingnya demokrasi dan memperhatikan hak asasi manusia.

¹⁴⁰ Gerard Prunier, *Op. Cit.*, hal. 139

berdasarkan pada penyelidikan yang dilakukan oleh komisi khusus dari Departemen Luar Negeri AS, genosida telah terjadi di Darfur. Pihak-pihak yang bertanggung jawab adalah Pemerintah Sudan dan kelompok milisi Janjaweed. Oleh karena itu, pemerintahan Bush akan mengajukan rekomendasi kepada DK PBB agar mengeluarkan resolusi yang dapat melakukan investigasi penuh tentang terjadinya genosida di Darfur.

Meskipun AS menyatakan bahwa telah terjadi genosida dalam konflik Darfur, AS tidak dapat berlaku keras, misal dengan mengirim pasukan untuk menghentikan terjadinya genosida ke Sudan. AS hanya bisa meningkatkan tekanan kepada Pemerintah Sudan dengan ancaman bahwa akan memberikan sanksi baru dan mengajak sekutu-sekutu AS di DK PBB agar mendukung pemberian sanksi multilateral kepada Pemerintah Sudan. Deputi Menlu, Robert Zoelick yang melakukan kunjungan ke Darfur, mengakui bahwa AS tidak dapat berlaku keras terhadap Pemerintah Sudan karena AS memiliki kepentingan dengan Sudan terkait dengan kerjasama intelijen kedua negara dalam memerangi teroris¹⁴¹, dan memerangi teroris merupakan langkah yang lebih penting demi keamanan nasional AS, dibandingkan menghukum pelaku kejahatan genosida.

4.2.1.3 Uni Eropa (UE)

Respon anggota negara-negara Uni Eropa berbeda-beda terhadap konflik Darfur. Pada umumnya, UE mengecam tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Darfur. Namun tiap negara menampilkan keprihatinan yang berbeda-beda. Perancis lebih memperhatikan dampak konflik Darfur bagi Chad. Inggris cenderung untuk mengikuti langkah AS yang mengirimkan bantuan kemanusiaan terbesar dibandingkan negara-negara lainnya. Negara-negara Skandinavia dan Belanda mengirimkan dana kemanusiaan dan tidak terlalu banyak memberikan komentar mengenai Sudan dan konflik Darfur. Di lain pihak, Jerman memberi kecaman terhadap Pemerintahan Sudan namun tidak terlalu

¹⁴¹ *Chronology of Failure to Stop Genocide: Bush Administration Policy on Darfur since September 9 2004*, www.africaaction.org, diakses pada tanggal 1 November 2008

memberikan aksi yang signifikan terhadap pernyataan-pernyataan yang dikeluarkannya. Sementara Itali dan Spanyol hanya bersimpati terhadap para pengungsi Darfur. Dalam hal penanganan konflik, UE lebih banyak berkordinasi dengan *Africa Union Mission in Sudan (AMIS)* untuk bantuan kemanusiaan yang mengatasnamakan UE, dan memberikan dukungan operasional bagi AMIS.

4.2.1.4 PBB

Untuk menyelesaikan konflik, PBB lebih mengandalkan Uni Afrika karena melihat masalah di Darfur harus diatasi secara regional terlebih dahulu. Namun PBB juga mendesak Pemerintah Sudan dan para kelompok pemberontak untuk menghentikan kekerasan dan agar kedua belah pihak segera melakukan gencatan senjata. Tahap awal yang dapat dilakukan oleh PBB ketika mengetahui bahwa telah terjadi konflik di Darfur sehingga menimbulkan krisis kemanusiaan yang memprihatinkan, adalah hanya lebih banyak memfokuskan pada upaya pemberian bantuan kemanusiaan terhadap warga sipil yang menjadi korban konflik. Upaya ini dilakukan antara lain melalui badan-badan PBB seperti OCHA (badan PBB yang mengoordinasi urusan kemanusiaan), UNCHR (badan PBB yang mengurus masalah pengungsi), UNICEF (badan PBB yang mengurus masalah anak-anak) dan WFP (badan PBB yang mengurus soal pangan). Namun, pemberian bantuan kemanusiaan yang dilakukan PBB tidak bisa mencapai pada korban konflik yang di Darfur dengan cepat.

Lambatnya bantuan kemanusiaan internasional ke Darfur salah satunya disebabkan oleh Pemerintah Sudan. Pemerintah Sudan melarang masuk misi kemanusiaan ke Darfur di periode awal konflik. Bantuan kemanusiaan baru diijinkan masuk ke Darfur pada bulan Mei 2004 tapi yang diijinkan untuk membawa bantuan tersebut hanya pasukan Uni Afrika. Namun pemberian bantuan kemanusiaan juga mengalami kendala karena masih buruknya situasi keamanan di banyak wilayah sehingga pemberian harus dilakukan secara bertahap dan tidak optimal.

Selain masalah bantuan kemanusiaan, PBB juga mengalami masalah lain yaitu tekanan dari beberapa pihak yang mendesak agar PBB mengumumkan bahwa telah terjadi genosida di Darfur dan meminta agar PBB melakukan tindakan yang lebih nyata selain dari hanya dialog. Namun semakin ditekan, semakin pula Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, menolak untuk langsung mengatakan bahwa memang telah terjadi genosida. Untuk menyelidiki indikasi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan memastikan apakah telah terjadi genosida di Darfur maka pada tanggal 18 September 2004, PBB membentuk suatu komisi penyelidikan internasional atau UN International Commission of Inquiry.

Hasil laporan komisi tersebut disampaikan pada tanggal 31 Januari 2005 kepada Sekretaris Jenderal PBB. Laporan tersebut menyatakan bahwa berdasarkan kategori yang telah ditentukan tidak ditemukan adanya tindakan genosida. Namun demikian, telah terjadi pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia sehingga menyebabkan terjadinya krisis kemanusiaan. Sampai saat terakhir pengamatan dilakukan, pelanggaran tersebut masih terus berlanjut. Komisi juga menemukan bahwa Pemerintah Sudan dan milisi Janjaweed telah melakukan serangan terhadap warga sipil. Pelanggaran yang dimaksud adalah tindakan kekerasan seperti pemerkosaan, penganiyaan, penculikan, pengusiran secara paksa dan penghancuran tempat-tempat permukiman penduduk. Aksi-aksi tersebut dilakukan dalam skala luas sehingga telah mengindikasikan kejahatan terhadap kemanusiaan. Komisi merekomendasikan agar para tindak kejahatan diadili di Mahkamah Kriminal Internasional dan bukan di Sudan sebagai salah satu upaya menyelesaikan konflik di Darfur.

4.2.1.5 Uni Afrika

Respon Uni Afrika terbilang lambat dalam menanggapi konflik di Darfur.¹⁴² Uni Afrika mulai terlibat dalam penanganan konflik ini ketika diadakannya perundingan gencatan senjata di Chad pada tahun 2004. Saat itu peran Uni Afrika

¹⁴² Ted Dagne, *Sudan: The Crisis in Darfur and Status of The North South Peace Agreement*, Loc. Cit., hal. 19

adalah untuk membantu Chad menjadi mediator dalam perundingan tersebut. Hal ini dikarenakan sejak awal meletusnya konflik ini, Chad merupakan negara tetangga yang paling merasakan dampak dari konflik Darfur. Chad merupakan negara tetangga Sudan yang berbatasan langsung dengan Darfur di sebelah barat. Akibat kedekatan secara geografis, Chad harus menerima dampak tularan (*spill over effect*) dari konflik Darfur berupa datangnya pengungsi warga sipil secara besar-besaran ke wilayahnya. Data pada bulan Februari 2004 menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 110.000 pengungsi dari Sudan yang menyebrangi perbatasan untuk masuk ke Chad. Jumlah angka ini semakin meningkat, mengingat tidak adanya penjagaan di perbatasan antara Chad Sudan sehingga pengungsi dengan mudah masuk. Akibatnya aliran pengungsi tersebut menimbulkan beban dan permasalahan tersendiri bagi Chad.

Bagi Presiden Chad, Idris Deby, konflik di Darfur menempatkan dirinya pada posisi yang dilematis. Posisi yang dilematis ini mempengaruhi keterlibatannya dalam konflik Darfur. Deby berasal dari suku Zaghawa dan beberapa pejabat senior dalam kemiliteran Chad juga adalah orang-orang dari suku Zaghawa. Bahkan kekuasaan yang diperolehnya melalui kudeta merupakan hasil dari dukungan suku Zaghawa. Sehingga pemerintahan Sudan menuduh pemerintahan Chad telah memberikan dukungan terhadap kelompok-kelompok pemberontak di Darfur yang sebagian besar berasal dari suku Zaghawa.¹⁴³ Tuduhan ini semakin diperkuat dengan adanya laporan bahwa kelompok SLA mendapatkan dukungan dari luar terutama dari orang-orang suku Zaghawa yang berada di Chad. Namun konflik ini telah membuat situasi di desa-desa dekat perbatasan Chad Sudan yang masuk dalam wilayah Chad, menjadi tidak aman bagi penduduk Chad sehingga Deby juga tidak bisa berdiam diri terhadap para pemberontak di Dafur dikarenakan yang masuk ke Chad bukan hanya para warga sipil Darfur yang mengungsi tapi juga kelompok pemberontak yang melarikan diri, masuk ke Chad. Oleh karena itu, ketika konflik terjadi sempat Deby melakukan kerjasama militer dengan Presiden Bashir untuk menghadapi para pemberontak. Chad mengirimkan 500 personel pasukannya untuk ikut ambil

¹⁴³ *Ibid.*, hal. 11

bagian dalam operasi militer Khartoum ke Darfur. Akan tetapi tekanan yang kuat datang dari dalam negeri Chad sehingga tidak lagi membantu Sudan secara militer. Namun Chad memfokuskan untuk menjadi mediator proses perundingan antara Pemerintah Sudan dengan kelompok pemberontak.

Pada periode awal Chad memegang peranan dalam mengupayakan gencatan senjata antara kedua belah pihak. Namun peranan itu kemudian dialihkan kepada Uni Afrika yang merupakan organisasi regional dan dianggap tidak memiliki keberpihakan terhadap salah satu pihak dibandingkan dengan Chad. Setelah perjanjian gencatan senjata tanggal 8 April 2004 Uni Afrika mendapat mandat untuk membentuk suatu komisi yang memimpin upaya gencatan senjata. Fungsi utama dari komisi itu adalah memonitor dan melaporkan proses gencatan senjata, dan menjadi mediator dalam upaya mencari penyelesaian politik yang komprehensif melalui perundingan. Untuk menjalankan mandat tersebut Uni Afrika membentuk African Union Mission in Sudan (AMIS).

Meskipun gencatan senjata telah disepakati, intensitas konflik tidak menjadi berkurang. Peperangan antara pihak-pihak yang bertikai masih terjadi sehingga perjanjian gencatan senjata menjadi tidak berarti. Penduduk sipil juga masih menjadi sasaran dari serangan milisi Janjaweed, bahkan tidak jarang milisi juga mengarahkan serangan kepada aktivitas dari para pekerja relawan kemanusiaan. AMIS yang bukan merupakan pasukan penjaga perdamaian, tidak dapat berbuat banyak untuk menghentikan kekerasan yang terjadi. AMIS bahkan juga tidak luput dari serangan. Oleh karena itu, pada tanggal 27 Juli 2004 DK PBB dan Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika (Peace and Security Council/PSC) meminta Presiden Uni Afrika untuk mempersiapkan kemungkinan transformasi AMIS menjadi misi pasukan penjaga perdamaian dibawah koordinasi pasukan PBB.¹⁴⁴ Namun rencana itu ditentang oleh Pemerintah Sudan yang tidak menghendaki adanya pasukan dari PBB.

PSC kemudian memutuskan untuk memperluas dan memperkuat mandat AMIS dari yang sebelumnya, dan menambah banyak jumlah pasukan AMIS.

¹⁴⁴ *Ibid.*, hal. 20

Perluasan mandat, dari yang sebelumnya hanya memonitor dan melaporkan, menjadi memastikan gencatan senjata berjalan secara efektif, perlucutan dan netralisasi milisi Janjaweed, perlindungan terhadap penduduk sipil dan terhadap misi kemanusiaan. Namun kembali lagi Pemerintah Sudan menolak keputusan PSC tersebut. Pemerintah Sudan menganggap bahwa keputusan PSC tersebut hanya usaha ingin menekan Pemerintah Sudan karena mandat AMIS dari awal hanya mengawas dan melaporkan proses gencatan senjata.¹⁴⁵ Sedangkan untuk penambahan personel pasukan AMIS meskipun telah disetujui oleh PSC, pada akhirnya penambahan pasukan tersebut bersama dengan perluasan mandat, terancam gagal terwujud karena penambahan pasukan juga mendapatkan penolakan dari Pemerintah Sudan.

Uni Afrika menyadari di satu sisi bahwa segala keputusan PSC bersifat mengikat untuk anggota-anggotanya namun tidak dapat menekan Pemerintah Sudan karena disadari bahwa diperlukannya persetujuan dari Pemerintah Sudan agar AMIS dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Oleh karena itu, PSC dan Uni Afrika tidak dapat berbuat banyak terhadap mandat AMIS.

Namun di sisi lain, disadari juga bahwa pentingnya dengan segera Uni Afrika memperluas dan memperkuat mandat AMIS agar dapat berfungsi dengan efektif. Sehingga AMIS dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan terutama dalam menghadapi setiap serangan atau ancaman terhadap penduduk sipil dan pekerja kemanusiaan. Mandat yang terbatas berarti juga bahwa Uni Afrika tidak memiliki kapabilitas untuk melucuti persenjataan milisi Janjaweed seperti yang diamanatkan dalam Resolusi DK PBB No 1556 dan disepakati dalam komunike bersama antara Pemerintah Sudan dengan Sekjen PBB Kofi Annan pada tanggal 30 Juli 2004. Selain itu, di luar kapabilitas dari Uni Afrika juga bahwa Pemerintah Sudan akan mengadili milisi Janjaweed seperti yang diminta dalam Resolusi DK PBB No 1556 yang mengharuskan Sudan mengadili milisi Janjaweed yang telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap warga sipil Darfur.

¹⁴⁵ www.guardian.co.uk/sudan/story/0,14658,1257420,00.html, diakses pada tanggal 27 Agustus 2008

Sementara itu, situasi di Darfur yang semakin memburuk menyebabkan Uni Afrika mendapatkan tekanan dari dunia internasional karena pengiriman pasukan AMIS berjalan lambat. Kendala yang dihadapi oleh Uni Afrika adalah ketiadaan personel yang dapat menjadi pasukan AMIS oleh negara-negara anggota Uni Afrika. Selain itu, dalam akomodasi pemberangkatan, serta lemahnya kemampuan dan pengalaman Uni Afrika dalam mempersiapkan dan mengelola misi pendukung perdamaian juga menjadi persoalan sehingga pengiriman pasukan secara keseluruhan memakan waktu sampai hampir setahun. Pengiriman itu belum termasuk dengan pengiriman penambahan personel pasukan yang telah disetujui oleh PSC, mengingat konflik Darfur yang terus berkepanjangan sedangkan jumlah pasukan yang ada tidak sebanding dengan luas wilayah Darfur yang membutuhkan kekuatan personel yang lebih besar untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Penambahan ini diagendakan terpenuhi dimulai pada akhir bulan September 2005 sampai tahun 2006.

Namun seperti halnya dengan pengiriman pasukan inti, penambahan pasukan bukan hal yang mudah bagi Uni Afrika. Pengiriman penambahan pasukan ke Darfur juga berjalan lambat. Tidak ada persiapan secara struktur dan standar prosedur tentang pengerahan pasukan tambahan bergabung dengan pasukan inti, memperlambat proses pengiriman pasukan. Selain itu, meskipun negara-negara Afrika bersedia mengirimkan pasukannya untuk memperkuat AMIS, masih belum ada koordinasi yang satu. Hal ini dikarenakan pasukan ini dibentuk secara tiba-tiba dan belum adanya pengalaman sebelumnya kecuali pasukan Nigeria dan Rwanda sehingga koordinasi pasukan yang terbentuk masih belum terorganisir dengan baik. Selama ini bila terjadi konflik, pada umumnya lebih cenderung untuk dilakukan perundingan-perundingan.

Kendala lain yang dihadapi oleh AMIS adalah keterbatasan dana untuk membiayai misi operasionalnya di Sudan, termasuk pembayaran gaji pasukan yang dikirim ke Darfur.¹⁴⁶ Dana yang jumlahnya tidak sedikit itu tidak akan diperoleh dengan hanya mengharapkan kontribusi dari negara-negara anggota,

¹⁴⁶*African Union Short of Funds for Darfur Mission*, www.sudantribune.com/article.php?id_article=1175 diakses pada tanggal 2 November 2008

mengingat keadaan perekonomian negara-negara anggota juga sedang dalam kesulitan. Uni Afrika sangat besar mengharapkan bantuan dari AS, Uni Eropa, PBB dan sumbangan dari komunitas internasional. Tanpa bantuan dana itu, AMIS sudah menghadapi kendala-kendala lainnya seperti keterbatasan sarana dan perlengkapan pendukung operasi. Oleh karena itu, menimbang semua kendala yang dihadapi oleh AMIS sejak awal terbentuk maka Uni Afrika memutuskan untuk mengajukan transformasi AMIS ke pasukan PBB, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip Uni Afrika hal tersebut diperbolehkan.

Hal yang perlu ditekankan bahwa Uni Afrika tidak pernah melihat dalam konflik Darfur telah terjadi tindakan genosida seperti yang selalu ditekankan oleh AS. Uni Afrika merasa perlu ikut terlibat dalam masalah internal negara anggotanya dikarenakan dalam konflik ini telah terjadi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, Uni Afrika dapat terlibat dalam penanganan konflik Darfur sesuai dengan konstitusi yang terdapat di Uni Afrika¹⁴⁷ dan Uni Afrika sebagai organisasi regional tidak dapat meminta China atau pihak-pihak lain untuk menekan Pemerintah Sudan.

4.2.2 Hubungan China Afrika

Selain faktor eksternal yang telah disebutkan, hubungan China Afrika secara umum juga menjadi faktor eksternal yang menjadi pertimbangan dalam Kebijakan Luar Negeri China terhadap konflik Darfur. Fokus China untuk menghormati pemikiran kedaulatan dan *equality* diantara negara-negara, tetap merupakan landasan dalam China berhubungan dengan negara-negara Afrika. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman China di masa lalu ketika kedaulatan China telah dilanggar oleh negara-negara adikuasa pada saat itu dan masalah dalam negeri China sering mendapatkan intervensi dari negara lain. Pengalaman di masa lalu

¹⁴⁷ Lihat Rodolfo Severino yang membahas tentang perbedaan prinsip *non interference* dalam Uni Afrika dan ASEAN dalam *Southeast Asia in Search of an ASEAN Community*, (Singapura: ISEAS, 2006), hal. 87-88

membuat China menerapkan prinsip *non interference* dalam kebijakan luar negerinya bila menyangkut masalah-masalah politik dalam negeri suatu negara.

Prinsip *non interference* ini telah melindungi kedaulatan China dari segala bentuk intervensi. Misalkan dalam hak asasi manusia. Barat berkeyakinan bahwa tiap negara memiliki hak untuk melindungi hak asasi dari warga negara lain bila negara itu telah mengabaikan dan melakukan kejahatan terhadap hak asasi dari warganya tersebut. Tetapi negara-negara berkembang termasuk China dan negara-negara Afrika, berpandangan bahwa kedaulatan dari suatu negara adalah hal yang paling tertinggi dan penting sedangkan melindungi hak asasi manusia adalah bagian dari mekanisme dalam suatu negara. Prinsip *non interference* menegaskan bahwa hak asasi manusia bukan menjadi alasan untuk satu negara mengintervensi urusan dari negara lain. Dengan memegang pada prinsip ini maka China dapat menjamin kedaulatannya dan mendapatkan kepercayaan dari negara Afrika lainnya.¹⁴⁸ Selama sepuluh tahun, isu tentang pelanggaran hak asasi manusia terhadap China telah berhasil ditolak selama 11 kali di PBB, dan tanpa dukungan dari negara-negara Afrika maka China tidak dapat berhasil lepas dari isu itu. Tapi tidak hanya China yang mendapat dukungan tentang masalah itu, China juga memberi dukungan kepada negara-negara Afrika yang kedaulatannya dilanggar oleh Barat, seperti pada kasus Zimbabwe tahun 2005 dan Darfur.

Tapi prinsip *non interference* bukan berarti hal yang absolut bagi Uni Afrika. Semua anggota Uni Afrika berkewajiban untuk mengakhiri konflik antar negara-negara Afrika.¹⁴⁹ Di Sierra Leone dan Liberia, Uni Afrika ikut campur dalam konflik tersebut untuk mencegah krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Di Togo dan Mauritania, Uni Afrika juga melakukan intervensi demi mendukung terjadinya demokrasi. China menghormati prinsip yang dipegang oleh Uni Afrika dan tujuan untuk mengakhiri konflik tapi China tidak memiliki hak untuk mengintervensi masalah domestik yang terjadi di negara-negara tersebut dan lebih menyerahkan kepada Uni Afrika sebagai organisasi regional. Kebijakan China

¹⁴⁸ Li Anshan, "China and Africa: Policy and Challenges", *China Security*, Vol 3 No 3, Summer 2007, hal. 75

¹⁴⁹ *Ibid.*, hal. 76

tentang *non interference* bukan berarti mengabaikan krisis kemanusiaan yang terjadi tapi kepada menghormati kedaulatan dan mengetahui batasan sebagai negara luar dalam menangani isu tersebut.

Prinsip *non interference* China ini juga berlaku dalam hal pemberian bantuan dalam bidang ekonomi atau pengembangan infrastruktur kepada negara-negara Afrika. China telah mengirimkan ribuan tenaga medis untuk membantu dalam pengembangan rumah sakit dan klinik serta mengobati pasien. Selain itu, China juga membantu mengembangkan sektor pertanian dan pendidikan. Warga Afrika banyak juga yang pergi ke China untuk belajar membangun infrastruktur dan bagaimana bekerja sebagai dokter, guru dan lain-lain. Tiap tahunnya China menyediakan hampir sebanyak 1500 beasiswa kepada warga Afrika.¹⁵⁰

Bantuan yang diberikan oleh China tidak seperti bantuan yang berasal dari Barat, tidak digunakan sebagai alat politik. China tidak memberikan syarat politik untuk memberikan bantuan tersebut kecuali syarat bahwa negara itu hanya akan mengambil kebijakan Satu China. Sedangkan negara-negara Barat memberikan syarat dalam bantuan itu untuk menerima persyaratan dari IMF atau Bank Dunia. Selain itu, AS juga terlibat dalam mempengaruhi politik negara-negara Afrika. Misalkan melalui program *multi million dollar* yang dapat mendukung pemerintahan atau justru menjatuhkan pemerintahan seperti pemerintahan Angola, Burundi, Sudan dan Zimbabwe.¹⁵¹ Sedangkan China lebih sering memberikan bantuan yang sifatnya teknis dan teknologi dibandingkan bantuan finansial. Hal ini dimaksudkan agar bantuan itu bersifat jangka panjang dalam hubungan China Afrika.¹⁵²

Perbedaan lainnya antara bantuan dari China dan Barat yaitu dalam hal yang menentukan bantuan akan diberikan ke proyek dalam bidang apa. Bila bantuan dari China merupakan hasil kesepakatan antara China dengan negara

¹⁵⁰ Barry Sautman, *Friends and Interests: China's Distinctive Links With Africa*, Working Paper No.12, <http://www.cctr.ust.hk/>, diakses pada tanggal 18 Desember 2008

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² Faycal El Alami, *Chinese Policy In Africa: Stakes, Strategy and Implications*, www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA480145&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf, diakses pada tanggal 18 Desember 2008

yang dibantu maka bantuan dari Barat ditentukan oleh pihak Barat. Hal ini dikarenakan bantuan itu dimaksudkan tidak hanya menjadi keuntungan bagi negara yang penerima tapi juga bagi yang memberi.

Selain pemberian bantuan, pada tahun 2006 di Forum Kerjasama China Afrika, China membuat perjanjian dengan Afrika untuk berkomitmen dalam delapan hal yaitu: pemberian bantuan akan meningkat dua kali lipat pada tahun 2009 dibandingkan pada tahun 2006; pemberian pinjaman sebesar US \$ 5Milyar untuk tiga tahun ke depan; menyediakan US \$ 5milyar untuk mendukung perusahaan-perusahaan China yang berinvestasi di Afrika; pembangunan gedung konferensi untuk Uni Afrika; pembatalan sejumlah utang untuk negara-negara miskin; peningkatan ekspor ke China; peningkatan perdagangan China Afrika dan pengiriman tenaga-tenaga ahli China ke Afrika.¹⁵³ Komitmen ini bertujuan agar semakin mempererat hubungan China dengan Afrika demi kepentingan ekonomi dan juga politik luar negeri China dikarenakan China menyadari bahwa dewasa ini pengaruh Barat masih mendominasi kuat di sejumlah negara Afrika sehingga diperlukan langkah-langkah konkrit yang dapat menjadi penyeimbang dengan kekuatan Barat di Afrika.

4.3 Kebijakan Luar Negeri China tentang Darfur

a. Bersikap Abstain

Pada awal tahun 2004, ketika kekerasan terus meningkat di Darfur, Dewan Keamanan PBB mulai memikirkan solusi untuk menghentikan konflik agar segera berhenti di Darfur. Langkah awal yang dapat dilakukan oleh DK PBB adalah menyetujui resolusi 1556 yang isinya tentang pemberian sanksi ekonomi kepada Sudan jika pemerintah Sudan tidak melucuti persenjataan kelompok Janjaweed dan mengadili kelompok tersebut atas kekerasan dan pembunuhan terhadap penduduk Darfur. China menyatakan keberatannya terhadap resolusi itu yang

¹⁵³ He Wenping, "The Balancing Act of China's Africa Policy", *China Security*, Vol 3 No 3, Summer 2007, hal. 25

memasukkan unsur sanksi. China menilai bahwa sanksi hanya akan memperburuk situasi yang terjadi di Darfur. Oleh karena itu, China menyatakan abstain dari resolusi itu.

Pada akhir tahun 2004, diadakan kembali *voting* terhadap resolusi lain yaitu resolusi 1564 yang isinya tentang diperlukannya komisi khusus yang datang langsung ke Darfur untuk menginvestigasi pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan apa saja yang terjadi di Darfur. Dalam resolusi ini, China kembali menyatakan abstain. Hal ini dikarenakan pemerintah Sudan dinilai oleh China telah menunjukkan sikap proaktif untuk menyelesaikan krisis Darfur. Selain resolusi 1564, China juga menolak resolusi 1574 yang ingin memasukkan krisis Darfur ke dalam proses perdamaian Utara Selatan. China mengajukan penolakkannya karena dari awal Darfur bukan termasuk dalam proses perdamaian itu dan harus diselesaikan secara tersendiri.

China kembali melakukan abstain pada bulan Maret 2005 terhadap resolusi 1591 dan 1593. Pada tanggal 31 maret 2005, DK PBB menunjuk tim jaksa dari Mahkamah Kriminal Internasional untuk melakukan penyelidikan terhadap kejahatan yang terjadi di Darfur. Resolusi 1593 ini memberikan wewenang kepada tim jaksa untuk dapat melakukan penyelidikan tersebut dan secara hukum tim jaksa itu terikat dengan PBB. Setelah dua puluh bulan dilakukan investigasi ditemukannya bukti bahwa terdapt dua tersangka kuat yang telah melakukan kejahatan perang dan terhadap kemanusiaan. Kedua resolusi ini menuntut agar pihak-pihak yang bertanggung jawab melakukan kekerasan di Darfur dan yang menghalangi atau mempersulit proses perdamaian untuk diadili di Mahkamah Kriminal Internasional. Namun China abstain dari resolusi tersebut dengan alasan bahwa keadilan seharusnya didapatkan melalui pengadilan di Sudan. Selain itu, China tidak turut andil dalam Statuta Roma yang membentuk Mahkamah Kriminal Internasional.

Lebih lanjut pada bulan April 2006, China abstain terhadap resolusi 1672 yang memberikan sanksi terhadap empat individu pejabat pemerintah Sudan. Menurut Duta Besar China untuk PBB, hal ini dikarenakan pemberian sanksi berupa larangan berpergian ke luar negeri atau membekukan aset-aset para pejabat

tersebut, bukan merupakan langkah yang tepat dikarenakan sedang berlangsungnya proses pembicaraan damai antara pemerintah Sudan dengan salah satu kelompok pemberontak di Darfur.

China juga abstain terhadap resolusi 1706 yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2006. Isi dari resolusi ini adalah agar mandat UNMIS (UN Mission in Sudan) yang sedang menjalankan tugasnya di wilayah-wilayah Utara dan Selatan Sudan, memasukkan wilayah Darfur. Tapi China berpendapat bahwa dalam resolusi seharusnya dimasukkan kalimat yang menyatakan bahwa mandat UNMIS akan bertugas di wilayah Darfur atas ijin Pemerintah Sudan. Oleh karena itu, selama dalam resolusi itu tidak dicantumkan ada ijin dari Pemerintah Sudan maka China akan abstain.

b. Komitmen China Menangani Konflik Darfur

Posisi China terhadap penanganan Darfur dapat dikatakan berubah-ubah. Bila di awal konflik China bersikap abstain dan tidak menunjukkan komitmen yang jelas pada penyelesaian konflik Darfur maka di akhir tahun 2006 dan tahun 2007 sikap lebih positif yang ingin ditunjukkan ke publik dan dunia internasional.

Perubahan mulai tampak pada akhir tahun 2006, China lebih asertif dalam pertemuan di Addis Ababa yang membahas tentang pengiriman pasukan PBB ke Darfur dan dukungan itu dibuktikan pada tahun 2007. Pada tanggal 31 Juli 2007, DK PBB, di bawah kepemimpinan China, mengeluarkan Resolusi 1769 yang isinya tentang membentuk pasukan hibrid antara pasukan perdamaian Uni Afrika dan PBB di Darfur. Resolusi ini mempresentasikan sebuah babak baru dalam usaha dunia internasional merespon terhadap konflik di Darfur, terutama dukungan China yang tidak memberi abstain terhadap resolusi ini. China juga menjadi mediasi antara dunia internasional dengan Sudan agar Sudan mau menerima pasukan perdamaian hibrid.

Presiden China Hu Jintao, mengangkat isu tentang pasukan perdamaian Uni Afrika PBB dengan Presiden Omar Bashir pada bulan November 2006 di Forum Kerjasama China Afrika dan dalam keterangan konferensi pers diberitahukan bahwa Presiden Hu Jintao meminta kepada Presiden Bashir untuk segera

menemukan solusi dalam menyelesaikan konflik dan meningkatkan situasi kemanusiaan di Darfur.¹⁵⁴ Kemudian menindaklanjuti pembicaraan di Forum Kerjasama China Afrika, pada kunjungan ke Sudan bulan Februari 2007, Presiden Hu menekan Presiden Bashir untuk menerima pasukan perdamaian Uni Afrika dan PBB. Selain itu, Presiden Hu Jintao meyakinkan Bashir bahwa akan tetap mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah Sudan sehingga pasukan tersebut masuk ke Sudan hanya bertugas sebagai membawa bantuan kemanusiaan dan menjaga gencatan senjata.¹⁵⁵

Diplomasi China menjadi tampak menyatu dengan negara-negara lain dalam menangani konflik ini. Pejabat-pejabat pemerintahan China menjadi lebih sering melakukan kunjungan ke Sudan dan Darfur. Dalam kunjungan ke Darfur, para pejabat juga melakukan kunjungan ke tenda-tenda pengungsian. Pemerintah China juga mulai meyakinkan publik bahwa China akan memainkan peran yang lebih konstruktif terhadap penyelesaian Darfur dan menyediakan lebih banyak bantuan kemanusiaan serta membantu membangun kembali infrastruktur yang telah hancur dan rusak.

Sebagai bentuk dukungan China terhadap pasukan hibrid perdamaian Uni Afrika dan PBB, China menjadi aktif mempromosikan agar dunia internasional dapat mendukung terus terciptanya perdamaian dengan memediasi perundingan perdamaian antara pihak yang bersengketa, dan membantu meningkatkan situasi kondusif bagi para pengungsi dan penduduk Darfur. China akhirnya sepaham mengenai pentingnya perundingan perdamaian terutama setelah gagalnya Perjanjian Damai Darfur yang dibentuk pada tahun 2006.

Komitmen China yang ingin lebih aktif dalam penanganan konflik Darfur ditunjukkan dengan seringnya China berpartisipasi dalam forum-forum multilateral yang membahas tentang penanganan Darfur. China juga hadir sebagai pengamat dalam negosiasi antara Pemerintah Sudan dengan delegasi pemberontak

¹⁵⁴ *Chinese President Urges to Maintain Stability in Darfur*, www.xinhuanet.com/english, diakses pada tanggal 2 Agustus 2008

¹⁵⁵ *China told Sudan to Adopt UN's Darfur Plan Envoy*, <http://www.sudantribune.com/spip.php?Article20137>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2008

yang diadakan di Libya. Pemerintah China bahkan mengumumkan secara publik bahwa China menyadari kewajiban untuk mencegah senjata dari China masuk ke Darfur.

c. Bantuan kemanusiaan ke Darfur

Konflik yang terjadi di Darfur dilihat oleh dunia internasional sebagai salah satu krisis kemanusiaan terparah yang pernah terjadi. Pemerintah Sudan dianggap telah melanggar hak asasi manusia sehingga akibatnya Pemerintah Sudan banyak mendapat kecaman dari berbagai pihak. Sementara itu, China yang memiliki hubungan sangat baik dengan Sudan dalam hal ekonomi, politik dan militer, dilihat mempunyai pengaruh besar terhadap Pemerintah Sudan dan diharapkan dapat memainkan pengaruhnya terhadap Pemerintah Sudan dalam penyelesaian konflik sehingga krisis kemanusiaan tidak menjadi berkepanjangan.

China dari awal tidak terlalu memperhatikan situasi Darfur sebagai permasalahan isu yang melanggar hak asasi manusia.¹⁵⁶ China melihat bahwa masalah Darfur adalah masalah yang berkaitan dengan isu kemiskinan dan ketidaktahuan ekonomi dalam suatu wilayah. Hal ini diperburuk dengan situasi iklim di Darfur yang tidak mendukung untuk terjadinya kemajuan ekonomi. Oleh karena itu, China memberikan bantuan ekonomi kepada Pemerintah Sudan dan menjalin kerjasama ekonomi yang diharapkan dapat membantu situasi di Darfur.¹⁵⁷

Namun situasi di Darfur tidak juga mengalami perubahan yang lebih baik justru memburuk sehingga China mempertimbangkan kembali bantuan ekonominya dan pada tahun 2007 Pemerintah China langsung mengirimkan bantuan kemanusiaan seperti peralatan medis dan material bangunan untuk rekonstruksi Darfur.¹⁵⁸ Bantuan kemanusiaan yang lain berasal dari perusahaan-perusahaan China. Perusahaan-perusahaan China yang berada di Sudan telah

¹⁵⁶Zhou Qi, *China's Foreign Aids and Human Rights Concern*, [http://www.humanrights.cn/en/Messages/Focus/Focus007/06/\(20080715_359342.htm](http://www.humanrights.cn/en/Messages/Focus/Focus007/06/(20080715_359342.htm), diakses pada tanggal 2 November 2008

¹⁵⁷*Ibid.*

¹⁵⁸*China's Humanitarian Aid to Darfur*, http://www.chinadaily.com.cn/china/200708/26/content_6056535.htm, diakses pada tanggal 24 Agustus 2008

membangun sumur-sumur dan pembangkit tenaga listrik untuk warga Darfur. Selain itu, juga dibangun sekolah-sekolah yang telah hancur dan rusak.

China juga berkomitmen untuk mendukung pasukan perdamaian di Darfur dan meningkatkan program bantuan kemanusiaannya. Komitmen ini ditunjukkan dengan China menggelar latihan terbuka untuk para teknisi militer yang akan dikirim ke Darfur pada bulan September 2007. Latihan terbuka itu mencakup membangun rumah, jalanan dan unit medis. Bantuan kemanusiaan juga tidak hanya diberikan kepada Sudan dan Darfur, China juga mengirimkan untuk AMIS melalui Uni Afrika.

d. Solusi China untuk Darfur

Penyelesaian konflik Darfur telah berlangsung cukup lama bagi sebagian melihat bahwa tidak adanya kemajuan dalam penyelesaian konflik ini. Namun China melihat bahwa diplomasi dan mediasi-mediasi yang selama ini telah dijalankan oleh semua pihak telah membawa kemajuan yang signifikan untuk penyelesaian konflik Darfur. China mengakui bahwa isu Darfur adalah isu yang terlalu kompleks dan sensitif sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk penyelesaiannya. Oleh karena itu China menawarkan solusi agar proses perdamaian dapat segera terwujud, yaitu:¹⁵⁹

1. Dialog dan konsultasi oleh semua pihak harus tetap dilanjutkan agar penyelesaian konflik dapat segera tercapai. Tekanan dan sanksi tidak akan membawa hasil. Sedangkan dialog dan konsultasi bermanfaat untuk menciptakan hubungan saling percaya antara pihak-pihak yang terkait dalam konflik ini.
2. Negosiasi antara PBB, Uni Afrika dan Pemerintah Sudan harus juga berjalan. PBB dan Uni Afrika harus terus mendorong Pemerintah Sudan untuk mau bekerjasama dengan PBB dan Uni Afrika serta organisasi internasional lainnya karena yang terpenting adalah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Sudan. Komunitas internasional juga harus mendukung misi pasukan perdamaian di Sudan dan Darfur.

¹⁵⁹ Sambutan Pidato Duta Besar China Khusus Darfur di London, lihat www.chathamhouse.org.uk

3. Negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap kelompok-kelompok oposisi di Darfur harus terus mendorong semua kelompok-kelompok oposisi agar mau berdialog dengan Pemerintah Sudan, dan mencapai perjanjian perdamaian yang komprehensif.
4. Bantuan kemanusiaan ke Darfur harus juga berkaitan dengan rekonstruksi dan pengembangan Darfur. Solusi untuk penyelesaian konflik Darfur yang hakiki adalah pengembangan ekonomi lokal dan meningkatkan taraf kesejahteraan dari penduduk Darfur.

4.4 Signifikansi Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal dalam Kebijakan Luar Negeri China terhadap Konflik Darfur

Keterlibatan Pemerintah China dalam isu Konflik Darfur menunjukkan bahwa China tidak memiliki strategi yang konkrit dalam menangani masalah ini. Diplomasi yang dijalankan cenderung mengikuti keadaan yang dihadapi oleh China sehingga diplomasi yang ditunjukkan lebih didasarkan kepada diplomasi yang berusaha untuk melindungi kepentingan nasional China yaitu kepentingan ekonomi dan politik. Hal itu semakin terlihat pada tahun 2006 dan 2007. Keadaan yang dimaksud antara lain adalah tergantung kepada bagaimana resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB. Jika resolusi yang dikeluarkan mengarah kepada intervensi ke Sudan maka China berusaha mencegahnya dengan alasan harus dengan persetujuan Pemerintah Sudan. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan ekonomi dan politik China di Sudan. Selain itu, faktor AS menjadi pertimbangan juga bahwa AS akan mendesak agar PBB mendukung intervensi ke Sudan, mengingat AS mengampanyekan pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia.

China mengatasi masalah konflik Darfur didorong karena ingin melindungi kepentingan ekonomi dan politik China yang telah selama bertahun-tahun dibangun di Sudan. Faktor kepentingan politik China adalah yang berkaitan dengan pentingnya integritas, persatuan dan kedaulatan. Hal ini memiliki hubungan dengan kebijakan yang selalu diterapkan oleh China yaitu *non interference*.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab 3 menyangkut Kebijakan Luar Negeri China bahwa China selalu menekankan bahwa pasukan PBB harus masuk ke Sudan dengan persetujuan Pemerintah Sudan. Bila pasukan PBB tetap masuk tanpa persetujuan Sudan maka hal ini dapat merusak hubungan China, tidak hanya dengan Sudan tapi juga dengan seluruh negara di Afrika. Salah satu faktor ekspansi China berhasil di Afrika dikarenakan kebijakan *non interference* yang selalu menjadi pilar kebijakan Luar Negeri China terhadap Afrika. Penyimpangan terhadap kebijakan *non interference* ini dapat merusak komitmen China terhadap negara Afrika dan terhadap konteks China sendiri yang selalu mempertahankan prinsip *non interference*. China tidak ingin kasus ini menjadi bumerang yang akan berbalik kepada China dan dipersoalkan tentang hak asasi manusia di negaranya sehingga negara lain jadi dapat melakukan intervensi tanpa persetujuan China.

Dalam kasus Darfur yang mana kasus ini memiliki konflik antara kepentingan China dengan kepentingan dunia internasional, China berusaha untuk menampilkan agar tidak berada dalam posisi untuk memilih antara harus mengutamakan kepentingan China atau kepentingan internasional. China tidak ingin berada pada posisi "sendirian". Oleh karena itu, China akan mengambil sikap abstain daripada harus memveto dalam resolusi-resolusi DK PBB. Dengan demikian, China tetap dapat mempertahankan kepentingan politik China dan menjaga hubungannya dengan Sudan yang telah berusaha agar segala intervensi yang masuk wilayah Sudan harus dengan permohonan dari Pemerintah Sudan. Namun di sisi lain, China juga tetap menjaga hubungan dengan negara anggota DK PBB lainnya karena dengan mengambil suara abstain berarti tetap membiarkan resolusi itu tetap berjalan.

Faktor kepentingan ekonomi China melatarbelakangi juga dalam sikap China mengambil suara abstain dalam resolusi DK PBB. Kepentingan ekonomi disini salah satunya adalah keamanan energi China di Sudan. Namun tidak menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri yang dikeluarkan selalu dikarenakan adanya kepentingan untuk mengamankan energi. Impor minyak Sudan ke China tergolong sedikit dari keseluruhan jumlah minyak impor China dan dapat dikatakan bahwa investasi China di Sudan lebih menunjukkan kepentingan China

yang lebih besar, namun menurut Mason Wilrich mengembangkan dan meningkatkan ketergantungan melalui investasi dan pembangunan industri adalah strategi yang dijalankan oleh negara pengimpor dalam menjamin keamanan energinya. Selain itu, China juga memastikan tidak adanya kerugian dari kemungkinan terganggunya pasokan dengan menekankan bahwa segala bentuk intervensi harus dengan persetujuan Pemerintah Sudan.

Selain strategi-strategi diatas, strategi yang digunakan China adalah diplomasi minyak. Diplomasi ini seperti yang telah dijelaskan dalam kerangka pemikiran, telah memungkinkan China untuk mendapatkan akses khusus pada ladang-ladang minyak Sudan dengan China berinvestasi. Para pejabat China mempercayai bahwa memegang kontrol terhadap akses produksi minyak maka dapat juga mengamankan persediaan minyak¹⁶⁰ dan selama China memandang bahwa jaminan produksi minyak di luar negeri adalah penting bagi keamanan minyak China maka perusahaan-perusahaan minyak China milik negara terus mengembangkan investasi-investasi di luar negeri. Hal ini dibuktikan dengan China menandatangani perjanjian baru untuk blok 13 dan 15 pada tahun 2007 dan 2005.

Namun perlu dijelaskan bahwa produksi minyak dari CNPC di Sudan tidak selalu menggambarkan untuk kepentingan nasional China. Hal ini dikarenakan berdasarkan pada konsep keamanan energi bahwa dikatakan untuk keamanan energi bila produksi sumber energi dikirim untuk dipergunakan kembali ke negaranya, dalam hal ini adalah China. Namun pada kasus CNPC tidak selalu demikian. Misalkan pada tahun 2006 dan 2007, ketika harga minyak sedang tinggi maka menjadi keuntungan bagi CNPC untuk menjual hasil produksi minyak Sudan ke pasar minyak internasional daripada dikirim ke China.¹⁶¹ Meskipun demikian tetap penting bagi China untuk memastikan bahwa kepentingan ekonomi China tetap terlindungi dari intervensi negara lain, seperti AS.

¹⁶⁰ Lieberthal & Herberg, *Loc. Cit.*, hal. 20

¹⁶¹ Erica Downs, "The Fact and Fiction of Sino African Energy Relations", *China Security*, Vol.3 No.3, Summer 2007, hal. 47

Pengalaman AS yang telah melakukan intervensi di beberapa negara bukan hanya mengkhawatirkan Sudan saja tapi juga China. Pertama, bila AS berhasil mengubah rezim pemerintahan di Sudan berarti China dapat dikatakan harus memulai dari awal diplomasi minyak China karena belum tentu pemerintahan yang baru dapat bekerjasama dengan China seperti yang sebelumnya. Kedua, bila intervensi terjadi maka investasi-investasi China di Sudan dapat terganggu dan bahkan terancam. Oleh karena itu, prinsip *non interference* menjadi hal yang mutlak juga bagi kepentingan ekonomi China.

Investasi CNPC yang tergolong sukses dalam sektor minyak Sudan telah membuat banyak pihak yang berasumsi bahwa faktor itu yang membuat China tidak dapat menekan Pemerintah Sudan dalam mencegah terjadinya krisis di Darfur. Namun tidak dapat disangkal bahwa pemberitaan-pemberitaan media massa internasional juga memberikan pengaruh terhadap kebijakan luar negeri China. Hal ini dikarenakan China ingin menampilkan *image* China yang bertanggung jawab seperti moto yang selalu dipromosikan China, terutama *image* itu menjadi penting menjelang China menjadi tuan rumah Olimpiade 2008. Sehingga beberapa tahun terakhir, China sedang menjaga reputasi China di dunia internasional, dan dalam isu ini, disadari bahwa China tidak dapat menghindari tekanan dari Barat yang menginginkan agar China berperan lebih aktif dalam menemukan solusi untuk krisis di Darfur. Oleh karena itu, China melakukan beberapa adaptasi dalam kebijakan luar negerinya.

Bisnis CNPC di Sudan memiliki kebanggaan tersendiri di China dikarenakan CNPC dinilai telah berhasil menjadi perusahaan minyak China milik negara yang mampu mengembangkan investasi di luar negeri. Perusahaan itu mengambil kesempatan dari minimnya kompetisi dari perusahaan Barat dan mengelola konsorsium minyak terbesar yang memproduksi minyak Sudan dan sekaligus sebagai investor terbesar. CNPC memompa minyak di Sudan dalam jumlah yang banyak daripada di negara-negara lain, kecuali di Kazakhstan. Aset perusahaan CNPC di Sudan dinilai telah mencapai perkiraan US \$ 7Milyar.

Kepentingan minyak CNPC di Sudan dan keinginan China untuk mempertahankan prinsip *non interference* merupakan latar belakang China tidak

menekan Sudan. China berulang kali mencegah, DK PBB mengancam Pemerintah Sudan dengan sanksi ekonomi berkaitan dengan isu Darfur. Namun demikian China menyadari bahwa tidak mudah memisahkan antara bisnis dengan politik seperti yang dikatakan oleh Zhou Wenzhong.

Operasi perusahaan minyak China berada di negara lain sehingga segala yang berkaitan dengan *host country* terutama bila itu menyangkut dengan politik maka akan berhubungan juga dengan perusahaan itu dan pemerintah dari perusahaan itu berasal (*home country*). CNPC ingin sepenuhnya tidak berhubungan dengan politik dan hanya fokus kepada bisnis tapi baik CNPC maupun Pemerintah China akhirnya menyadari bahwa tidak bisa mengabaikan krisis yang terjadi di Darfur. Hal ini dikarenakan persepsi dari dunia internasional bahwa aktivitas CNPC di Sudan adalah untuk memfasilitasi rezim Pemerintah Sudan dalam pemusnahan etnis. Sedangkan Pemerintah China sendiri dituduh sebagai pelindung Pemerintah Sudan sehingga Pemerintah China banyak mendapatkan kritikan dari dunia internasional, dan akhirnya merusak *image* China. China membutuhkan waktu tiga dekade untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah negara lain, dan momentum China menjadi penyelenggara tuan rumah Olimpiade 2008 merupakan saat yang tepat untuk menonjolkan kehebatan China di hadapan dunia. Oleh karena itu, China tidak dapat menutup "mata dan telinga" terhadap kritikan-kritikan yang dapat merusak *image* China padahal seharusnya momentum ini digunakan untuk menunjukkan China yang sebaliknya. Sehingga China harus mengubah kebijakannya terhadap konflik Darfur.

Selain faktor ingin mengubah persepsi dunia internasional, faktor lain China mengubah kebijakan luar negerinya adalah China menyadari bahwa dunia internasional berusaha untuk menyelesaikan kasus Darfur. Sehingga Pemerintah China memutuskan untuk lebih baik berada di pihak yang sama daripada berada di pihak yang bersebrangan. Selain dapat menjaga kepentingan ekonomi China di Sudan juga dapat mengurangi kritikan dari dunia internasional.

Pada akhir tahun 2006 dan selama tahun 2007, China telah menunjukkan sikap yang lebih aktif dalam menangani konflik Darfur. China lebih sering ikut berpartisipasi dalam perundingan internasional dan bahkan China melobi

Pemerintah Sudan agar mau menerima pasukan hibrid gabungan Uni Afrika dan PBB. Padahal selama ini, Sudan tidak mau bila ada pasukan PBB yang masuk ke negaranya.

China juga mendapatkan situasi tentang Darfur dari diskusi dengan negara-negara Uni Afrika.¹⁶² Banyak pemimpin-pemimpin negara-negara Sub Sahara Afrika yang menilai bahwa Pemerintah Sudan telah bertindak ofensif terhadap penduduk Darfur dan oleh karenanya, dibutuhkan dukungan dari luar Sudan yang dapat membawa stabilitas dan perdamaian bagi penduduk Darfur, dan organisasi Uni Afrika tidak lagi mempunyai kapabilitas untuk mengatasi krisis di Darfur. Hal ini yang membuat China berkeinginan melakukan diplomasi dengan Pemerintah Sudan tentang pasukan hibrid.

China menilai bahwa sudah saatnya China juga berperan dalam penanganan konflik Darfur selain karena faktor kepentingan nasionalnya, tapi juga China melihat bahwa peran yang dilakukan China saat ini tidak akan menyalahi prinsip *non interference* yang dipegang oleh China karena organisasi regional sudah dirasakan gagal dalam menangani krisis ini sehingga China setuju untuk mendukung intervensi melalui PBB¹⁶³ namun tetap harus mendapatkan persetujuan dari Sudan.

Kebijakan China untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan tidak hanya kepada Sudan dan Darfur tapi juga ke Uni Afrika. Hal ini dilakukan karena China menyadari bahwa China perlu ikut membantu memperkuat Uni Afrika sehingga Uni Afrika yang akan dengan segera mengatasi permasalahan ini dan bukannya pihak lain. Selain itu, pemberian bantuan ke Uni Afrika diharapkan juga dapat memperkuat hubungan dengan Afrika, mengingat Afrika mempunyai arti penting bagi China.

¹⁶² Bates Gill, Huang & Stephen Morrison, "Assessing China's Growing Influence in Africa", *China Security*, Vol. 3 No.3, Summer 2007, hal. 13

¹⁶³ Yitzhak Shichor, "China's Darfur Policy", *China Brief*, <http://www.asianresearch.org/articles/3039.html>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2008

BAB 5 PENUTUP

Konflik di Darfur sesungguhnya bukan suatu hal yang terjadi dengan tiba-tiba dan baru. Konflik-konflik dalam skala kecil sering berlangsung di Darfur. Konflik bermula dikarenakan perebutan lahan pertanian dan sumber air. Perbedaan kondisi geografis Sudan dimana di wilayah utara mengalami kekeringan sedangkan di wilayah yang lain yaitu tengah dan selatan, tanah dalam keadaan subur, menyebabkan penduduk Darfur yang berada di wilayah utara bergerak ke wilayah tengah dan selatan untuk mencari lahan pertanian dan sumber air. Kondisi yang demikian menimbulkan perselisihan diantara penduduk pendatang dan penempat. Sebagian besar penduduk pendatang adalah etnis Arab sedangkan penduduk yang sudah menetap adalah etnis Afrika. Sehingga meskipun konflik yang terjadi dilakukan antara penduduk etnis Arab dan Afrika, perselisihan ini tidak dikaitkan dengan konflik antar etnis melainkan karena perebutan sumber daya. Konflik-konflik tradisional tersebut berkembang menjadi konflik berdimensi etnik dengan skala dan intensitas yang lebih besar dikarenakan adanya perbedaan perlakuan yang diberikan oleh Pemerintah Sudan terhadap penduduk etnik Arab dengan etnik Afrika. Sehingga timbul kelompok-kelompok etnik Afrika yang menentang Pemerintah Sudan dan dalam menghadapi kelompok-kelompok tersebut pemerintah mempersenjatai milisi-milisi dari etnik Arab untuk membantu dalam menghadapi kelompok-kelompok itu.

Selama terjadi konflik-konflik kecil, Pemerintah Sudan tidak pernah melakukan upaya yang memadai untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Konflik-konflik di Darfur akhirnya semakin sering dan berkepanjangan. Kekecewaan penduduk Darfur terhadap pemerintah yang tidak dapat membantu dalam mengatasi konflik, semakin membesar ketika Pemerintah Sudan melakukan marginalisasi ekonomi dan politik terhadap penduduk Darfur. Pemerintah dinilai mengabaikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Begitu juga dengan partisipasi dan hak-hak politik Darfur tidak diakomodasi. Oleh karena itu, timbul kelompok-kelompok etnis Afrika yang melakukan gerakan anti

pemerintah. Namun tindakan Pemerintah Sudan yang mempersenjatai milisi Arab memunculkan persepsi bahwa pemerintah mempunyai maksud secara sengaja memberikan dukungan kepada milisi Arab untuk memerangi etnis Afrika. Hal ini yang kemudian mendorong terjadinya pergeseran konflik yaitu dari konflik tradisional menjadi konflik etnik. Perbedaan ini semakin menonjol ketika konflik berkembang dengan mengeksploitasi perbedaan identitas etnik. Pihak-pihak yang bermusuhan mengidentifikasi diri sebagai etnik Arab atau Afrika.

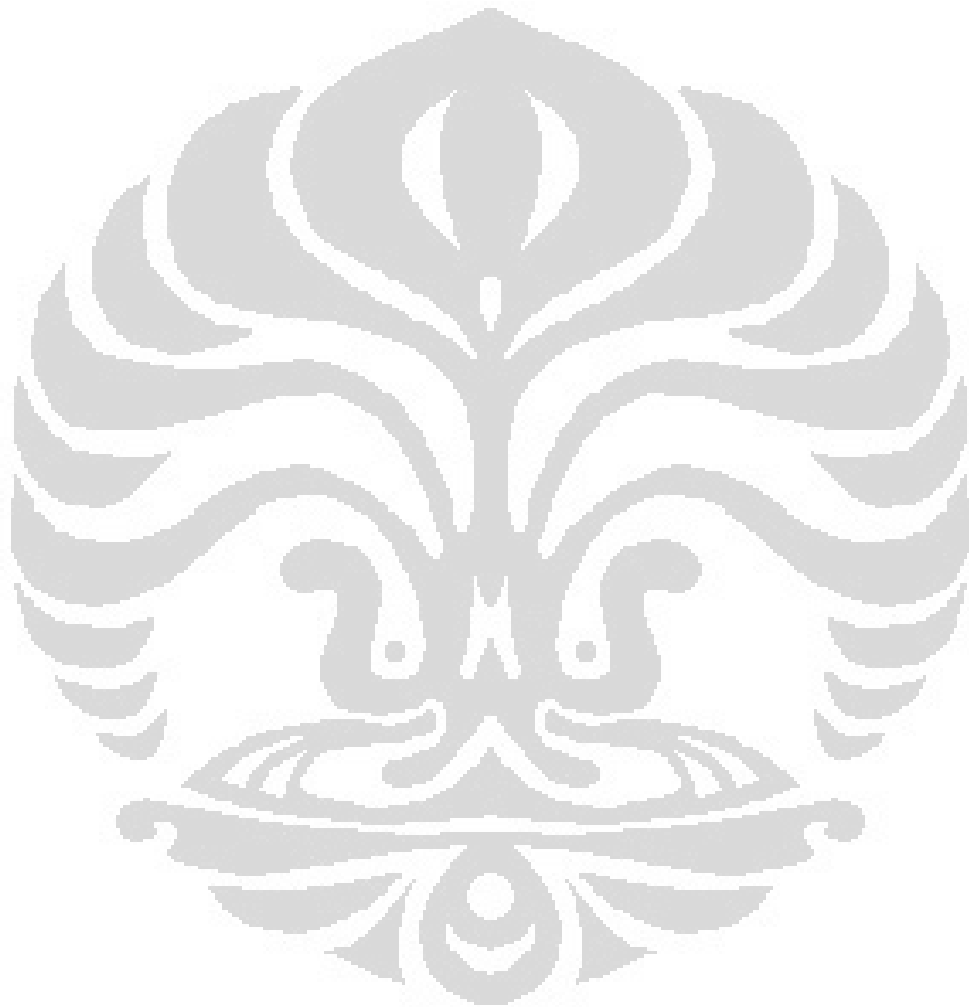
Konflik Darfur pada tahun 2003, masih disebabkan juga oleh kekecewaan dari penduduk Darfur yang diabaikan oleh pemerintah. Konflik ini akhirnya menjadi berkepanjangan karena pemerintah tetap mempersenjatai para milisi Arab yaitu Janjaweed dalam menghadapi kelompok-kelompok etnik Afrika, dan kelompok Janjaweed ini mempunyai kebebasan untuk bergerak dan menyerang para pemberontak dan warga sipil Darfur. Namun pada akhirnya hanya menimbulkan korban besar di kalangan warga sipil Darfur. Krisis Kemanusiaan telah melanda para warga sipil yang berada di posisi tengah-tengah peperangan antara pemerintah dan pemberontak. Banyak korban yang meninggal dari warga sipil dan korban dari warga sipil juga yang kehilangan tempat tinggal. Keadaan semakin diperburuk dengan kelompok militan yang menyiksa mereka.

Dunia internasional mengecam aksi kekerasan yang terjadi di Darfur namun demikian mereka bergerak tergolong lambat dalam menolong para korban, termasuk PBB dan Uni Afrika. Sehingga korban yang berjatuhan semakin tinggi jumlahnya.

Perundingan damai juga sulit untuk tercapai karena tiap pihak memiliki kepentingannya masing-masing yang sulit untuk disatukan dan walaupun sudah ada penandatanganan perjanjian, implementasi dari perjanjian tersebut sulit untuk dilaksanakan seperti pada DPA. Keadaan ini membuat dunia internasional untuk terus mendorong agar perdamaian terwujud. Oleh karena itu, dibutuhkan pihak-pihak yang dapat memberikan pengaruh kepada pihak-pihak yang bertikai memainkan perannya lebih aktif, salah satu yang dituntut demikian oleh dunia internasional adalah China.

China merupakan investor Sudan terbesar, terutama dalam sektor perminyakan. Hal ini berawal dari tidak adanya pesaing-pesaing untuk perusahaan China yang berasal dari AS, Eropa dan Kanada. Sehingga China menguasai pengembangan sektor minyak di Sudan. Hal ini menempatkan China kemudahan dalam mendapatkan izin untuk akses perminyakan Sudan. Berawal dari keberhasilan China di Sudan maka China juga dituntut untuk berperan aktif dalam mengatasi konflik Darfur.

Namun China melihat konflik Darfur sebagai urusan internal Sudan dan tidak ingin intervensi dalam hal itu karena sesuai dengan pilar kebijakan luar negeri China dalam Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai. Sehingga China akan memberikan suara abstain dalam pemungutan suara resolusi bila resolusi itu tidak menghargai kedaulatan Sudan. Faktor ini dan faktor kepentingan ekonomi China dalam mengamankan minyak Sudan menjadi faktor-faktor internal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri China terhadap konflik Darfur. Sedangkan faktor lain yang juga menjadi pertimbangan bagi China adalah respon dari media massa internasional dan negara-negara lain terhadap konflik Darfur dan China nya sendiri serta faktor pertimbangan hubungan China Afrika.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bergstein, Fred (et al.). (2006). *China: The Balance Sheet: What The World Needs To Know About The Emerging Superpower*. New York: Public Affairs.
- Creswell, John. (1994). *Research Design Quantitative & Qualitative Approach*. California: Sage Publication Inc.
- Fishman, Ted. (2006). *China Inc.: Bagaimana Kedigdayaan China Menantang Amerika dan Dunia* (Alih Bahasa: Marianto). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Holsti, K.J. (1992). *International Politics: A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Huntington, Samuel. (1996). *The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order*. New York: Simon&Schuster
- Irawan, Prasetya. (2006). *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Depok: DIA FISIP UI
- Kang, David C. (2007). *China Rising: Peace, Power and Order in East Asia*. New York: Columbia University Press
- Lentner, Howard. (1974). *Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach*. Ohio: Charles Meril Publishing Co.
- Morgenthau, Hans. (1973). *Politics Among Nations*. New York: Alfred A. Knopf Inc.
- Navarro, Peter. (2007). *The Coming China Wars*. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Prunier, Gerard. (2007). *The Ambiguous Genocide*, New York: Cornell University Press.
- Roberts, Paul. (2005). *The End of Oil; On The Edge of A Perilous New World*. New York: A Mariner Book Houghton Mifflin Company.
- Severino, Rodolfo. (2006). *Southeast Asia in Search of an ASEAN Community*. Singapura: ISEAS.
- Soeprapto. (1997). *Hubungan Internasional: Sistem Interaksi dan Perilaku*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Starr, John Bryan. (2001). *Understanding China: Guide to China's Economy, History and Political Structure*. New York: Hill and Wang.

Sutter, Robert. (2008). *Chinese Foreign Relations: Power & Policy Since the Cold War*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers Inc.

Wilrich, Mason. (1978). *Energy and World Politics*. New York: The Free Press.

Jurnal:

Anshan, Li. (2007). China and Africa: Policy and Challenges. *China Security*, Vol 3 No 3.

Daojing, Zha. (2005). China's Energy Security and Its International Relations. *The China and Eurasia Forum Quaterly*, Vol. 3 No.3.

Dipoyudo, Kirdi. (1989). Aspirasi Perdamaian: Garis-garis Besar Politik Luar Negeri Indonesia. *Analisis CSIS*, tahun XVIII

Downs, Erica. (2007). The Fact and Fiction of Sino African Energy Relations. *China Security*, Vol.3 No.3.

Gill, Bates & Reilly, James. (2007). The Tenous Hold of China Inc. in Africa. *Washington Quaterly*, Vol 30.

Gill, Bates, Huang & Morrison, Stephen. (2007). Assessing China's Growing Influence in Africa. *China Security*, Vol. 3 No.3.

Keliat, Makmur. (2006). Kebijakan Keamanan Energi. *Jurnal Global Politik Internasional*, Vol 8.

Morrison, Stephen. (2002). Somalia's and Sudan's Race to The Fore in Africa. *Washington Quaterly*.

Lee, Henry & Shalmon, Dan. (2007). Searching for Oil: China's Initiatives in The Middle East. *Environment*, Vol 49.

Lieberthal & Herberg. (2006). China's Search For Energy Security: Implications for US Policy. *NBR Analysis*, Vol 17

Shen, Dingli. (2006). Iran's Nuclear Ambitions Test China's Wisdom. *The Washington Quaterly*,

Strauss, Scott. (2005). Darfur and The Genocide Debate. *Forreign Affairs*, Vol 8.

Wenping, He. (2007). *The Balancing Act of China's Africa Policy*, *China Security*, Vol 3 No 3.

Zweig, David & Jianhai, Bi. (2005). *China's Global Hunt for Energy*. *Foreign Affairs*, Vol 84.

Darfur in Flames: Atrocities in Western Sudan.(2004). *Human Right Watch*. No. 5

Darfur Rising: Sudan's New Crisis. (2004). *ICG Africa Report*, No 76.

Unifying Darfur Rebels: A Prerequisite for Peace. (2005). *ICG Africa Briefing*, No. 32

Publikasi Elektronik:

Abbadi, Karrar & Ahmed, Adam. (n.d). 26 Oktober 2008. *Brief Overview Of Sudan Economy and Future Prospect For Agricultural Development*, http://nutrition.tufts.edu/docs/pdf/famine/food_aid_forum_kit.pdf

D'Hooghe, Ingrid. (2007). *The Rise of China's Public Diplomacy*. 28 Agustus 2008. http://www.clingendael.nl/publications/2007/20070700_cdsp_paper_hooghe.pdf

Dagne, Ted. (2004). *Sudan: Humanitarian Crisis, Peace Talks, Terrorism, and US Policy*. 18 November 2008. <http://www.fas.org/man/crs/IB98043.pdf>

----- (2008). *Sudan: The Crisis in Darfur and Status of The North South Peace Agreement*. 17 September 2008. www.fas.org/sgp/crs/row/RL33547.pdf

Dossier. (2008). *Sudan Oil Industry*. 2 Agustus 2008. www.ecosonline.org/back/pdf_reports/2008/dossier%20final%20groot%20web.pdf

El Alami, Faycal. (2008). *Chinese Policy In Africa: Stakes, Strategy and Implications*, US Army War College. 18 Desember 2008. www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA480145&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf.

Franzese, Patrick. (2008). *China's Non Interference Policy in Africa: Can it Survive?*. 8 Oktober 2008 <http://www.patrickfranzese.au.edu/ACSF/Franzese/AY08.pdf>

Large, Daniel. (2007). *Sudan's Foreign Relations with Asia*. 24 Juli 2008. <http://www.cmi.no/sudan/doc/?id=937>

Pehnelt, Gernot. (2007). *The Political Economy of China's Aid Policy in Africa*. 6 Agustus 2008. <http://www.jenecon.de>

Sautman, Barry. (n.d). *Friends and Interests:China's Distinctive Links With Africa*, Working Paper No.12, The Hong Kong University of Science and Technology. 18 Desember 2008. <http://www.cctr.ust.hk/>

Shichor, Yitzhak. (2005, 13 Oktober). *Sudan: China's Outpost in Africa*. 2 Juli 2008. <http://www.asianresearch.org/articles/2754.html>

Shichor, Yitzhak . (n.d). *China's Darfur Policy*. 2 Juli 2008. *China Brief*. <http://www.asianresearch.org/articles/3039.html>

Taylor, Ian. (n.d). *Unpacking China's Resource Diplomacy in Africa*. The Hong Kong University of Science and Technology. 27 Oktober 2008. <http://www.cctr.ust.hk/>

Zaliah, Ismail. (2007). 23 Juli 2008. *Oil Industry in Sudan*, http://www.ecosonline.org/back/pdf_reports/2007/Oil/Oil_Industry_in_Sudan.pdf

Zhou Qi. *China's Foreign Aids and Human Rights Concern*. (2008). 2 November 2008. http://www.humanrights.cn/en/Messages/Focus/Focus007/06/t20080715_359342.htm

Zweig, David. (2005). *Resource Diplomacy Under Hegemony*. The Hong Kong University of Science and Technology. 27 Oktober 2008. <http://www.cctr.ust.hk/>

African Union Short of Fundsfor DarfurMission. (n.d). 2 November 2008. www.sudantribune.com/article.php?id_article=1175

Arms, Oil and Darfur. (2007, Juli). *Sudan Issue Brief*, No.7. 30 Juli 2008. <http://www.smallarmsurvey.org>

China's Humanitarian Aid to Darfur. (2007). 24 Agustus 2008. http://www.chinadaily.com.cn/china/200708/26/content_6056535.htm

China in Sudan:Having it Both Ways. (n.d). 24 Agustus 2008. www.savedarfur.org

China told Sudan to Adopt UN's Darfur Plan Envoy. (2007). 24 Agustus 2008. <http://www.sudantribune.com/spip.php?Article20137>

Chinese President Urges to Maintain Stability in Darfur. (2006). 2 Agustus 2008. www.xinhuanet.com/english.

Chronology of Failure to Stop Genocide: Bush Administration Policy on Darfur since September 9 2004. (n.d). 1 November 2008. www.africaaction.org

Conflict in Darfur. (n.d). 27 Oktober 2008. <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/sudan-peace-process.htm>

Darfur Conflict: Its History, Nature and Development. (n.d). 27 oktober 2008.
www.sudanembassy.org

Humanitarian Access in the Context of Increasing Fighting and Insecurity. (n.d).
27 November 2008 <http://www.hrw.org/legacy/background/africa/sudan0506/4.htm>

Investing in Tragedy: China's Money, Arms, and Political in Sudan. (2008, 3
Maret). 9 Juli 2008.
<http://www.humanrightsfirst.info/pdf/080311-cah-investing-in-tragedy-report.pdf>

One China Policy: Time for Change. (2007). 24 Oktober 2008. www.pacforum.org

Profil Omar Al Bashir. (n.d). 27 Oktober 2008. [http:// www.dw-world.de/dw/article.html](http://www.dw-world.de/dw/article.html)

Sudan Darfur in Flames: Atrocities in Western Sudan. (n.d). 29 Juli 2008.
<http://www.hrw.org>

Sudan Now Africa's Third Largest Oil Producer. (n.d). 2 November 2008.
<http://www.afrol.com/articles/21889>

Sudan, Oil and the Darfur Crisis, (n.d). 17 September 2008. www.guardian.co.uk,

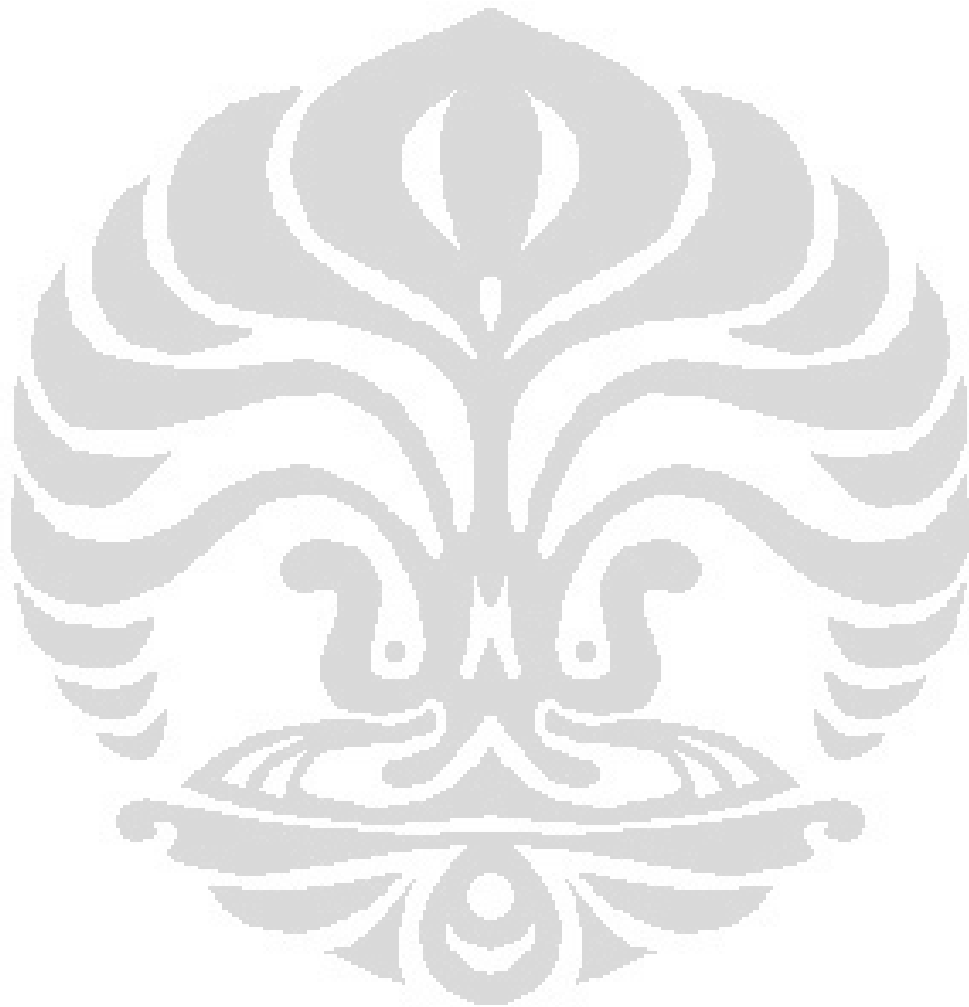
Understanding Sudan, (n.d). 15 November 2008. <http://lsb.scu.edu/~mkevane/sudan/Understanding%20Sudan%20A%20Brief%20introduction.PDF>

<http://www.fmprc.gov.cn/eng/topics/seminaronfiveprinciples/t140777.htm>

www.chathamhouse.org.uk

Wawancara :

Zhu Liqun, Dosen Foreign Affairs University of Beijing





CHATHAM HOUSE

Chatham House, 10 St James's Square, London SW1Y 4LE
Tel: +44 (0)20 7597 5700. E: contact@chathamhouse.org
Fax: +44 (0)20 7597 5710. www.chathamhouse.org
Charity Registration Number: 208228

Category of paper: Transcript

Darfur and Sino- African Relations

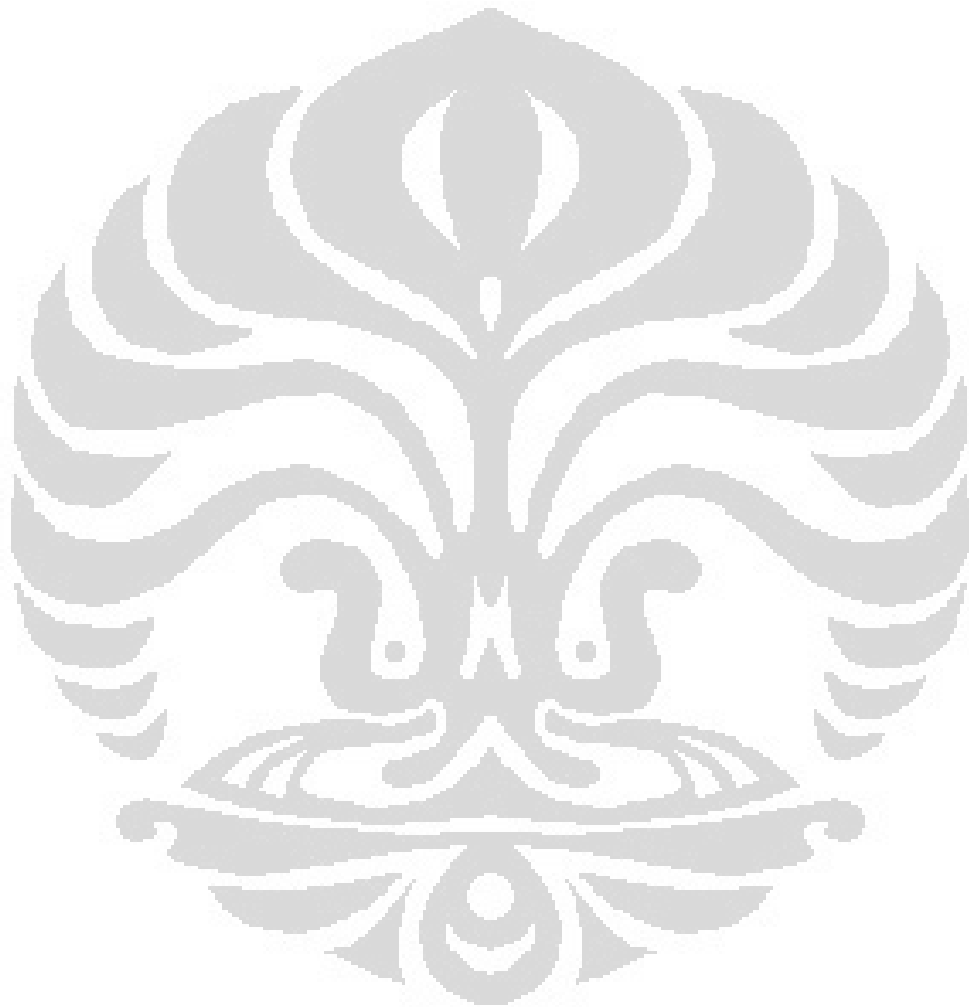
Ambassador Liu Guijin, Chinese Government Special
Representative on Darfur

Chair: Ann Grant, Standard Chartered Bank

Friday 22 February 2008

Chatham House is independent and owes no allegiance to government or to any political body. It does not hold opinions of its own; the views expressed in this text are the responsibility of the speaker. This document is issued on the understanding that if any extract is used, the speaker and Chatham House should be credited, preferably with the date of the event. This text was provided by the speaker and is not an exact transcript of the speech as delivered.

www.chathamhouse.org.uk



China's historic engagement in Africa has strengthened in recent years and with that the complexity of its relations with African nations has increased. From a focus on Darfur, Ambassador Liu expanded to speak about China's role in Africa. Ambassador Liu presented on China's perspective on Africa, how it views its own position vis-à-vis Africa, and its policy priorities.

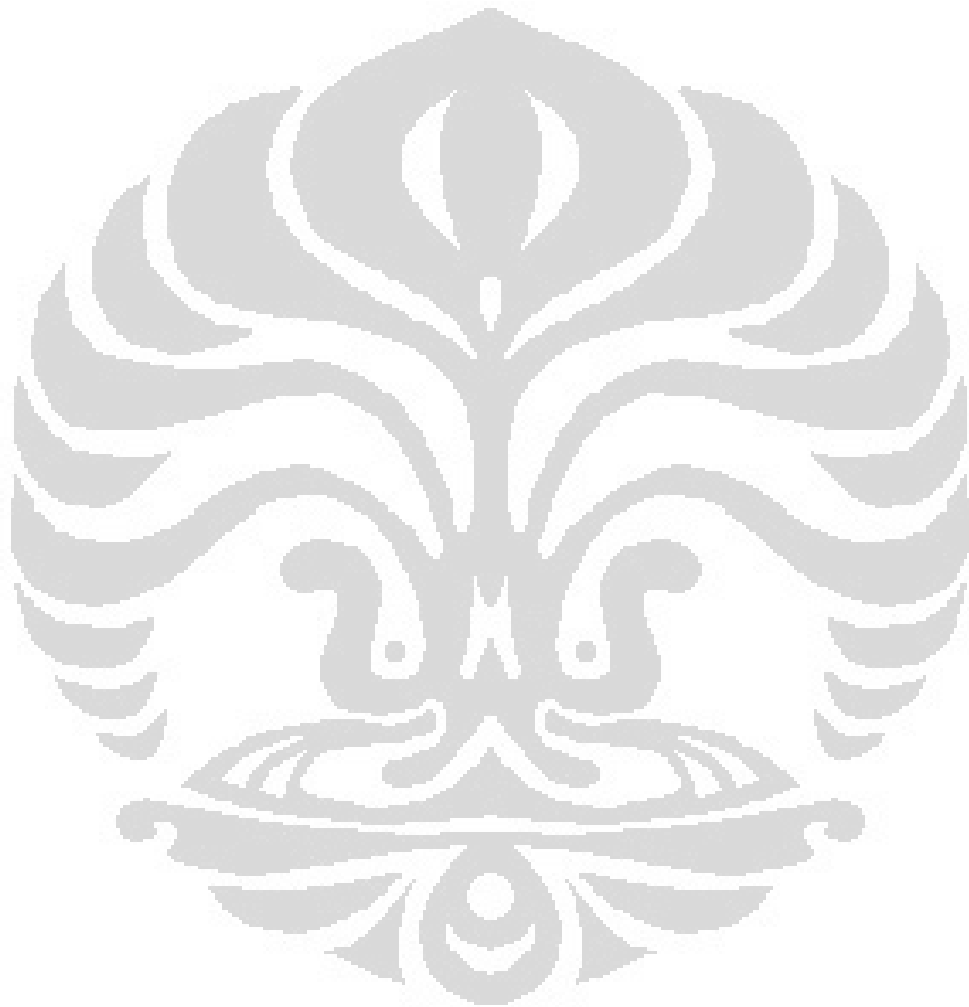
Ambassador Liu Guijin

I wish to begin by thanking Chatham House for their gracious invitation, which accords me the honour and opportunity of sharing with you at this prestigious institution my views on Darfur, China's relations with Africa and other issues of interest.

The Darfur issue, one of the most flaring regional hotspot issues in recent years, has been the focus of international attention and the source of divergence over the root of the conflict and the way to settle it.

The Darfur issue has existed for a long time, owing to complicated factors involving both the past and the present. The region suffers from poor natural conditions, scarcity of water resources and desertification that has worsened through the past five decades. Its social and economic development has long been neglected. Dozens of local nomadic tribes often fight over water and grassland. The security and humanitarian situation in the region plunged deeper into trouble in 2003 when large-scale armed conflict broke out between the government and rebel forces. Therefore we believe that like with many other hotspots in Africa, the unrest in Darfur stems from poverty, backwardness and underdevelopment.

The Chinese government and people are deeply concerned about the Darfur issue and highly sympathetic toward the suffering local people. We believe that the Darfur issue is complicated because it involves problems left over from history, natural conditions, distribution of resources and tribal relations. It concerns Sudan's sovereignty and unity as well as peace and stability in that part of Africa. It calls for peaceful political settlement through the concerned efforts of the Sudanese government, opposition groups, countries in the region, and also the United Nations and the African Union, and requires a

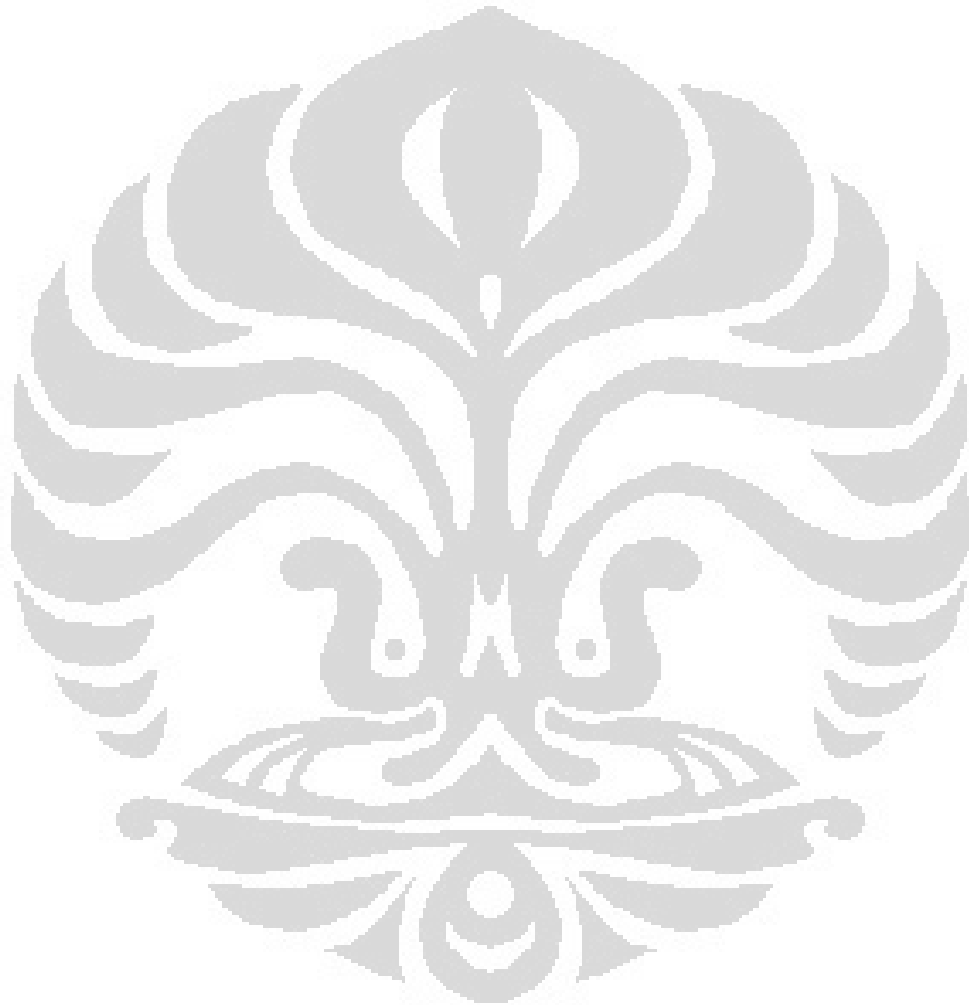


holistic approach that addresses the political, security, humanitarian, local economic and social development dimensions.

Since 2007 when the Darfur issue began to heat up, Chinese President Hu Jintao and other leaders have used the Beijing Summit of the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC), mutual visits and other opportunities to talk to President Bashir and other Sudanese leaders and urge Sudan to actively collaborate with the rest of the international community for a proper settlement of the issue. The Chinese Government has sent a special envoy to Sudan for several visits to urge the Sudanese side to be flexible. I myself have visited Sudan three times. In addition, China has maintained close dialogue with other parties concerned through meetings, consultations and during multilateral occasions, as well as by telephone conversations, correspondence and other means, in order to increase trust, reduce misgivings and expand common understanding.

Thanks to China's vigorous mediation, and the efforts of other parties, the Sudanese government agreed to engage in dialogue and consultation with the United Nations and the African Union, leading to the agreement on the deployment of the hybrid mission in Darfur. The international community has also come to recognize the tripartite negotiation mechanism among the UN, the AU and the Sudanese government as the main channel to address the Darfur issue.

I visited some internally displaced persons (IDP) camps in Darfur last summer and was struck by the hardships people had to endure and their yearning for peace. To help people in Darfur out of their current difficulty, China has provided humanitarian relief on five occasions. To improve living conditions of the local people, Chinese companies have undertaken many water supply and transmission projects in Darfur on top of building 20 power generation plants and 46 wells. Also, to prepare the people of Darfur for the reconstruction of their homeland, Chinese companies have made donations for multiple local training centres and contributed a large amount of equipment to local schools.

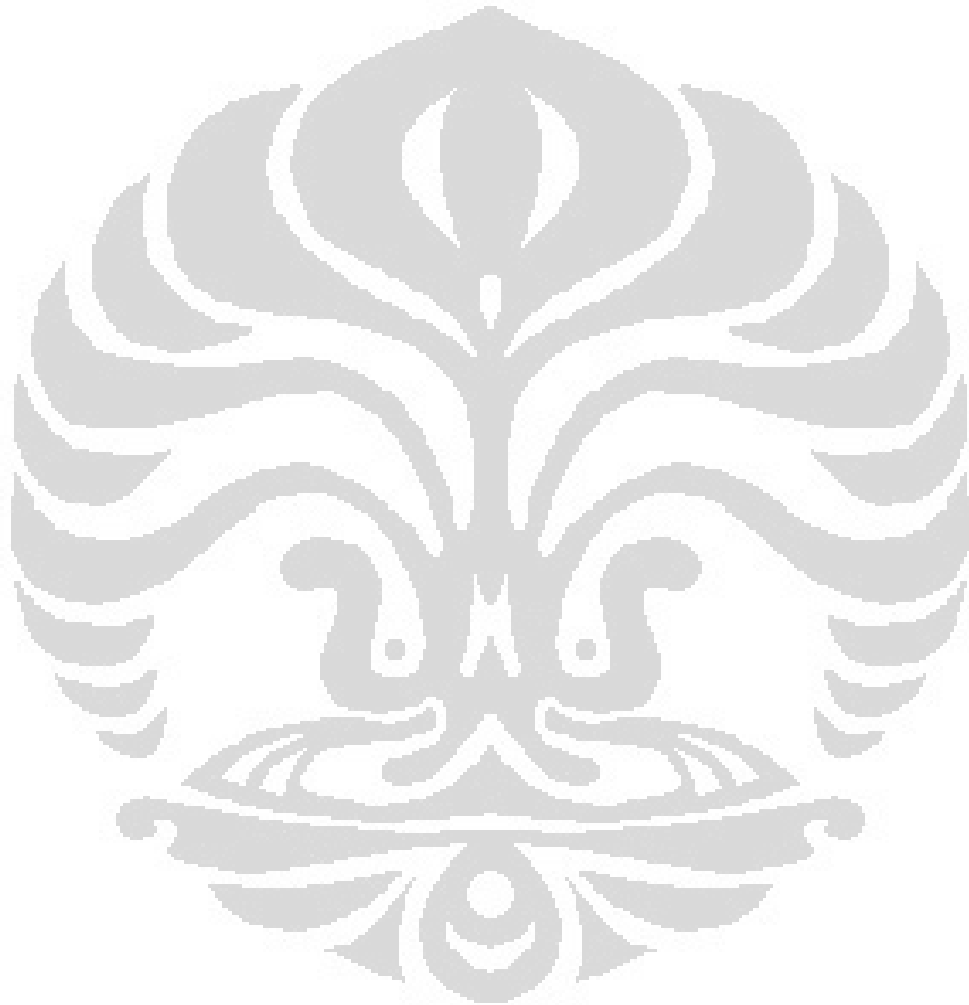


Thanks to the joint efforts of the international community and parties concerned, encouraging progress has been made on the Darfur issue. The UN-AU hybrid mission took over the peacekeeping operation in Darfur as planned on 31 December last year and China's multifunctional engineer unit, the first non-African international peacekeepers, was deployed last November. Furthermore, parties concerned are making great efforts to advance the political process in Darfur, exemplified by the active mediation efforts of the special envoys of the UN and the AU. Humanitarian conditions in Darfur have improved to a certain degree. However, the Darfur issue is too complicated and sensitive to be solved overnight. The current difficulties need to be overcome through solid efforts of the international community and all parties concerned.

First, dialogue and consultation on an equal footing should continue in order to bring a solution to the issue. It has been proven time and again that for any international or regional issue, pressure and sanction alone can hardly bring about a thorough resolution. Instead, enhanced dialogue and consultation should be pursued to build and strengthen mutual trust so that differences can be addressed and issues solved through political means. This is the only viable solution.

Second, the tripartite negotiation mechanism among the UN, the AU and the Sudanese government should continue to function as the main channel of the diplomatic process. Efforts should be made to encourage the Sudanese government to work closely with the international community and at the same time, urge the UN and the AU to step up dialogue and consultation with the Sudanese government, looking towards an agreement on relevant issues at an early date. The international community should work together for the smooth deployment of the peacekeeping mission.

Third, vigorous efforts should be made to advance the political process. The international community should continue to support mediation by the UN and the AU special envoys for Darfur. Countries with influence on the opposition groups in Darfur should continue to play their unique roles and urge all the groups that have not joined the political process to hold peace talks with the Sudanese government and reach a comprehensive peace agreement as soon as possible.



Fourth, assistance should be provided to Darfur for reconstruction and economic development. The key to a lasting settlement of the Darfur issue is to promote local economic growth and improve people's lives. The international community should continue to offer generous financial assistance and provide more humanitarian and development aid to Darfur.

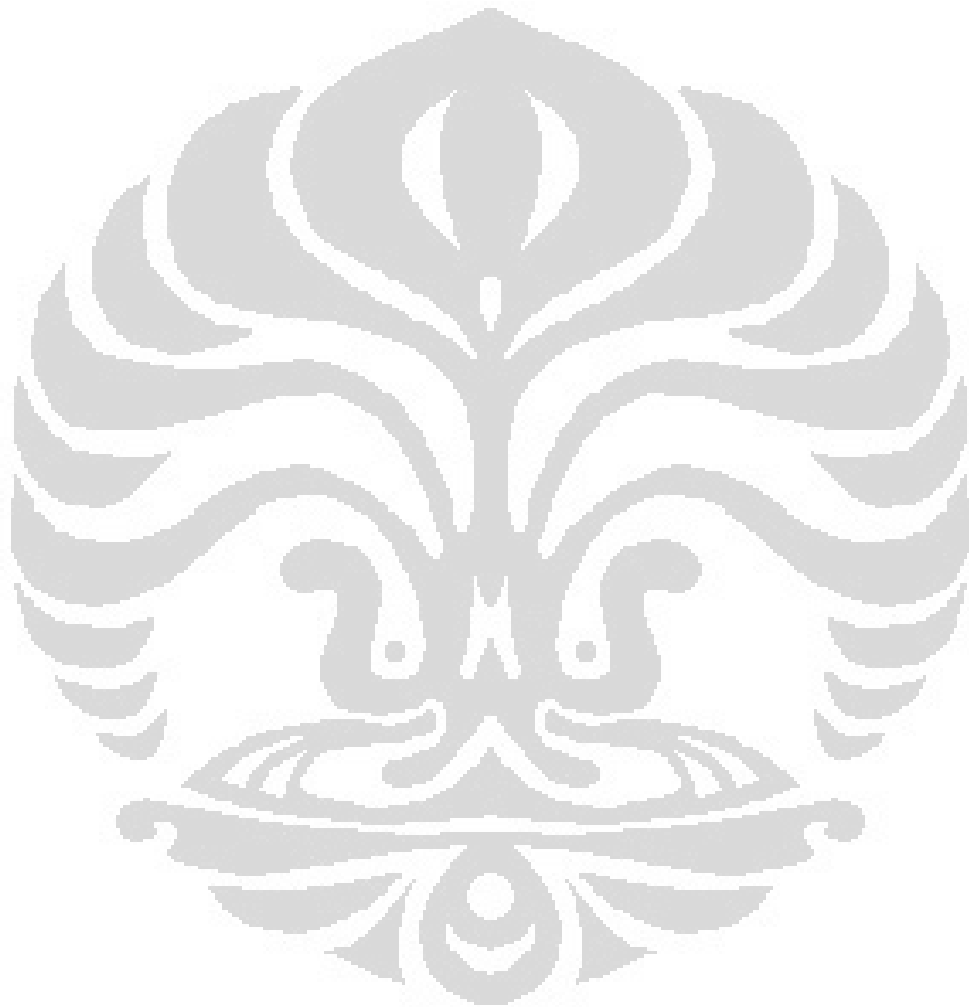
During his recent visit to China, Prime Minister Gordon Brown had extensive exchanges with Chinese leaders on the Darfur issue. We appreciate the UK's concern over Darfur. We are ready to work with the UK and the rest of the international community and contribute to the resolution of the Darfur issue.

Although China and Africa are oceans apart, our friendship is time-honoured. China and African countries established diplomatic relations more than 50 years ago and since then the friendship and the cooperation between the two sides has grown in a sound and smooth way.

I am often asked, "What is China's secret to ensuring a long-lasting and ever-growing relationship with Africa in a changing world?" My answer is simple. It is because China follows two principles: treating others as equals and pursuing win-win cooperation.

For more than half a century, China has provided the African people with large amounts of assistance. Many infrastructure and social development projects built by China have brought tangible benefits to African people. As a Chinese diplomat, I have worked for China-Africa relations and friendship for nearly three decades. I was posted to four African countries for a total of 17 years, where I witnessed the thriving win-win cooperation between China and Africa and experienced the profound friendship cherished by the African people to China.

The FOCAC was established in 2000 on the joint initiative of China and African countries. At the time I was Director General of the department of African Affairs in the Foreign Ministry and got involved in the preparation of the Forum. Since then, FOCAC has served as an important channel for China



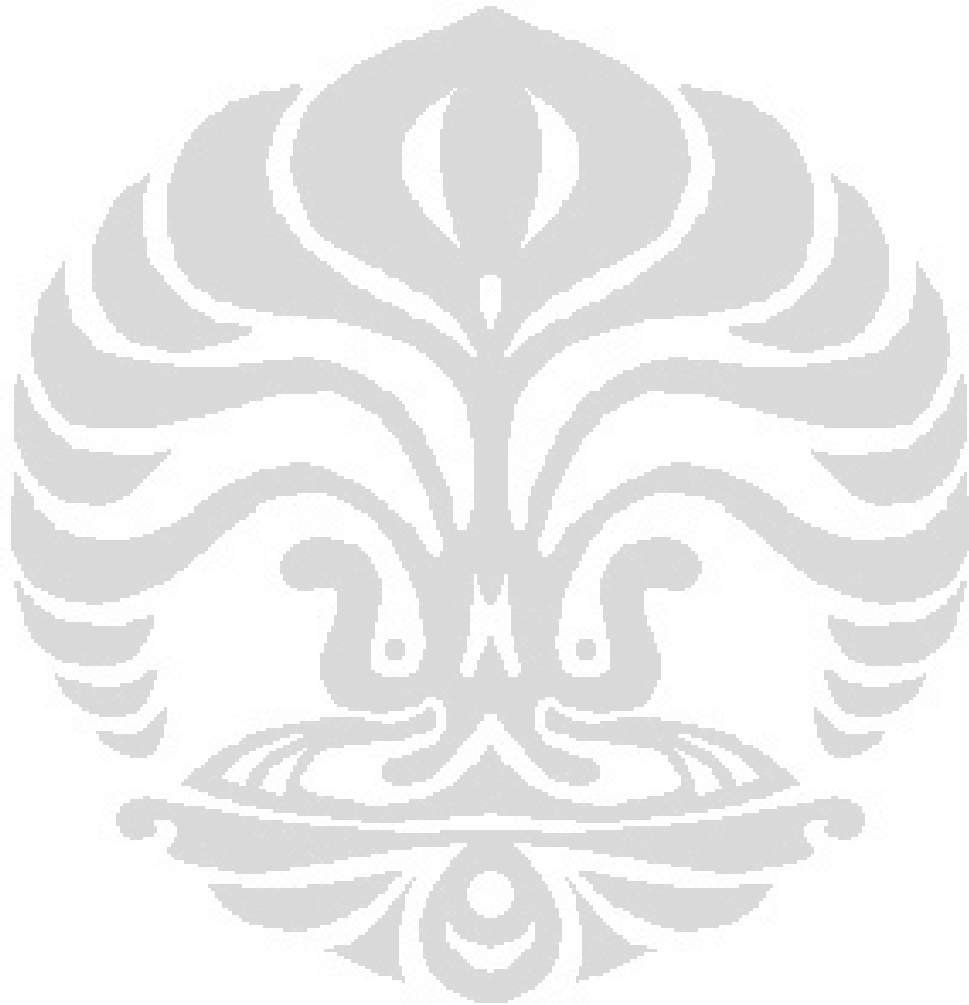
and African countries to strengthen mutually beneficial cooperation and conduct consultations on an equal footing under new circumstances. At the FOCAC Beijing Summit in 2006, President Hu Jintao announced eight policy measures to strengthen China-Africa result-oriented cooperation and support Africa's development. Chinese leaders visited 13 African countries in 2007 to promote the implementation of these policy measures.

Over the past year, China has provided new assistance to 47 African countries in support of their development. By 2009, China's assistance to Africa will double that of 2006. To help African countries address the lack of development funds, China has cancelled debts from government interest-free loans due by the end of 2005 for all heavily indebted poor countries, and those least developed countries in Africa that have diplomatic relations with China. To support the national industrial development of African countries, we have further opened our market and given zero-tariff treatment to 440 African export items to China. The China-Africa Development Fund, which my country set up to encourage and facilitate Chinese companies' investment in Africa, has started operation and will gradually raise US\$5 billion. In 2007 alone, China provided Africa with a total of 2,700 scholarships to help African students and subsequently their countries enhance their capability for sustainable development and get better prepared to handle the challenges of globalisation. In the next two years, China will also train 15,000 professionals and build three to five economic and trade cooperation zones for Africa.

Ladies and gentlemen,

China's close cooperation with Africa has not only brought tangible benefits to both the Chinese and African peoples, but it has also drawn greater international attention and support to Africa. I wish to stress that China and Africa's friendship and cooperation is not an exclusive relationship, but one that is open and transparent. China will work with the UK and all other countries that care about peace and the development of Africa, to help the continent achieve social and economic development, shake off poverty and put an end to wars and conflicts.

Thank you for your time.



11 September 2007

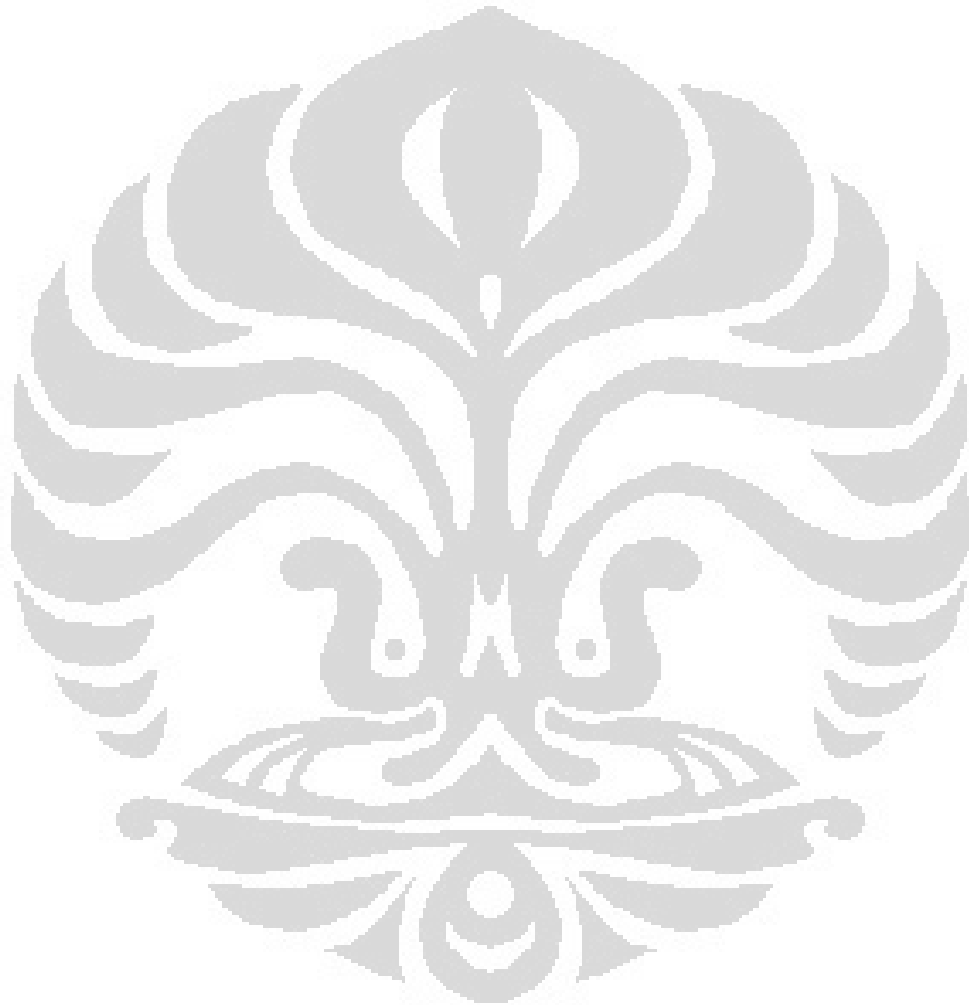
**Press Conference****Department of Public Information • News and Media Division • New York****PRESS CONFERENCE ON DARFUR BY CHINA**

Resolving the Darfur issue would not be accomplished by the exertion of pressure, sanctions and military power, Liu Guijin, Special Representative of the Chinese Government on Darfur and African issues told correspondents at a Headquarters press conference today.

Describing China's efforts to resolve the Darfur issue, he stressed that the Sudanese Government was a sovereign Government. Whether one liked the Government or not, without its cooperation, it would not be possible to carry out a successful peacekeeping operation, he added. China's efforts to bring a settlement to the Darfur issue had been recognized by many world Governments, including the Governments of many developed countries, as well as by the United Nations and the African Union.

Mr. Guijin, who was in the middle of a visit to the United States and the United Nations, said it had been his first trip to the United States since his appointment as Special Representative by the Chinese Government in May 2007. During his visit to Washington, D.C., he had met with senior United States State Department officials, leaders of the Congress and House of Representatives, as well as non-governmental organization representatives.

In New York, he had met with the Under-Secretary-General for Political Affairs, and the Assistant Secretary-General for Peacekeeping Operations, as the Under-Secretary-General was travelling in Africa and Europe, he said. During the two meetings, he had exchanged ideas with senior United Nations officials on the issue of Darfur and related African issues. The purpose of his visit to the United Nations was to discuss cooperation in implementing Security Council resolution 1769 (2007). [Adopted by the 15-member Security Council on 31 July 2007, the resolution authorized the deployment of a 26,000-strong joint United Nations-African Union force.]



Asked whether Western news reports on China's investment and involvement in Africa, particularly the Sudan, were fair, Mr. Liu noted that the reports by the Western media were mixed. Some were objective, while others were not. The relationship between China and the Sudan was similar to its relations with other African countries. It was nothing special, as China maintained friendly and cooperative relations with all the other African countries.

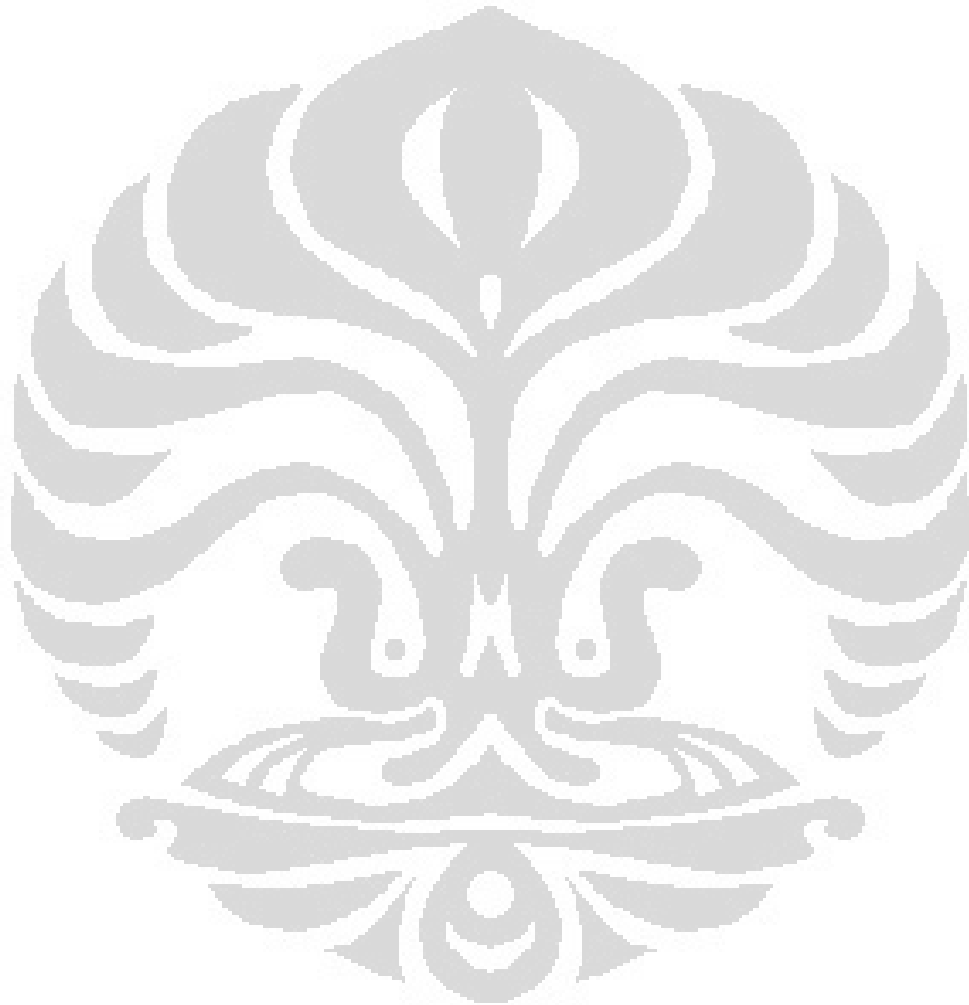
While a focus of Western media reports was China's oil exploration in the Sudan, China was not the only country carrying out oil exploration in the Sudan, he added. Other Asian countries were as well, and it was unfair to criticize China alone. That did not mean that China's Asian partners should also be criticized. It also did not mean that Western companies were not interested in oil exploration in the Sudan. As far as he knew, United States and French companies had gained the right to oil exploration in the Sudan as early as 1996 -- years before Chinese companies had started their work -- but had left the area due to worry that there was not enough oil under surface and because of the regional situation.

During his visit to the Sudan last May, he had read a headline in a Sudanese newspaper explaining that the French company Total had gained the right to oil exploration in southern Sudan before 1996. While it had paid a large sum of money to the Sudanese Government, it had not actually carried out exploration. When the Comprehensive Peace Agreement had been signed in 2005, the United Kingdom company White Nile had received the right to oil exploration from the southern Sudanese Government. The two companies, therefore, had to go to a United Kingdom court to compete with each other over the right to oil exploration.

He was not sure if the media would report on companies from the United Kingdom and United States carrying out oil exploration and extraction in the Sudan, he added. China held 40 per cent of the total shares in the Great Nile Company, the company which was carrying out oil exploration and extraction in the Sudan. Some 30 per cent was held by an Indian company, 25 per cent by a Malaysian company and another 5 per cent by the Sudanese Government.

Because of the Sudan's discovery of oil and the preliminary establishment of an oil industry in that country, the Sudanese economy had, despite the conflict, grown at an annual rate of some 9 per cent in recent years, he noted. Oil cooperation between China and the Sudan was transparent, mutually beneficial and non exclusive. To say that China's oil exploration in the Sudan meant China supported the killing of people in the Sudan was unacceptable and not justified.

Responding to questions on China's peacekeeping role in Africa, he noted that China currently participated in peacekeeping operations in seven African countries, with total troops numbering about 1,400. Some 415 Chinese peacekeepers were carrying out duties in southern Sudan. Regarding the hybrid peacekeeping operation in Darfur, he noted that China's Permanent Representative to the United Nations had actively promoted the process. To show support in the second phase of the United Nations plan,



namely the “heavy support” package, China’s Government had pledged 313 multifunctional engineering units to the Darfur region, to pave the way for the hybrid peacekeeping operation.

Those troops should have already been on the ground, but there had been technical delays by the Department of Peacekeeping Operations, he added. Having received clarification from that Department on those difficulties, the troops would be deployed in early October. The Assistant Secretary-General for Peacekeeping Operations had informed him that it would be the first unit of the hybrid operation to the Darfur region.

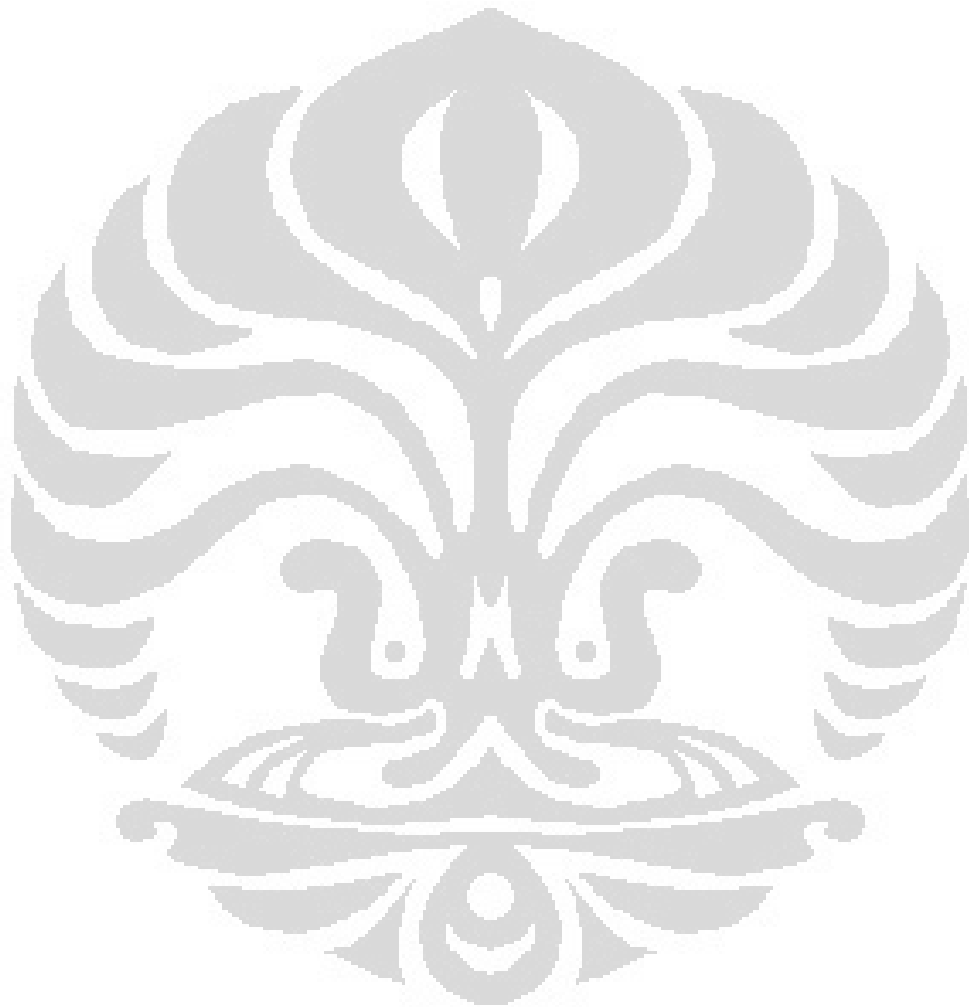
Many activists felt that the Chinese Government had a lot of clout and economic power over the Sudanese Government, said a correspondent. With some 200,000 people dead in Darfur, why had China not used its weight, power and might to intervene and try to save lives?

Responding, he said there were some different numbers as to how many people had been killed in the Darfur region. Regardless of the figures, the Chinese Government and people were sorry about the loss of life and property there. China had made a concrete contribution to the resolution of the issue, for example, by providing humanitarian assistance to the region. Some assistance had already been shipped to the region and more was on the way. China would continue to provide even more humanitarian and development assistance to the region. China was also providing development aid to Darfur. In other words, China had provided tangible and practical assistance for the region.

China had also made a huge effort in terms of the hybrid force and the political process, he continued. China had used all types of channels, talking to the Sudanese Government and persuading them as equal partners to accept former Secretary-General Annan’s three-step plan, especially the hybrid peacekeeping operation. While China did not always publicize its efforts, it had played a constructive and unique role.

Asked several questions about the 2008 Beijing Olympic Games, including the participation by Heads of State and Government, he said he did not have a specific figure on the number of Heads of State attending the Games. He did know, however, that not a single Head of State had refused to participate in the Games.

Regarding China’s provision of foreign assistance without political conditions, he noted that, as a developing nation, China’s assistance to other developing countries was in the range of South-South cooperation, or a type of cooperation between friends. The road to development and a country’s ideology should be decided by a Government and its people. Using economic assistance as leverage to accept a certain ideology or decide on a road to development, was not fair. Attaching political strings to assistance and using it as a tool to intervene in other countries’ internal affairs would not be helpful. China’s policy reflected the Confucian concept of not doing to others what you would not want them to do to you.



What would China do to ensure the success of the upcoming peace talks in Libya announced by the Secretary-General during his trip to the Sudan and Darfur? a correspondent asked.

Responding, he said the Chinese Government had supported the political process since the outset. Without the participation of all parties in the peace agreement, there would be no peace in Darfur and peacekeeping would be just vain talk. The political process and peacekeeping were equally important. The Secretary-General had facilitated the acceptance by opposition groups of resuming negotiations in Libya. That was positive progress. The fragmentation of the opposition groups was a concern at the moment, as the largest faction of the opposition group refused to participate in the negotiation. While China did not have direct contact with any opposition group, it supported the resumption of negotiations for peace between the Sudanese Government and opposition groups. It also supported the efforts of the African Union and the United Nations.

Commenting on his recent visit to Washington, D.C., he noted that China's Foreign Ministry and the United States State Department shared almost the same stance on the Darfur issue. The United States Government appreciated the positive efforts by China's Government on the settlement of the Darfur issue. It was only on some specific issues that the two had different perspectives. The two Governments, however, had good cooperation and communication. His exchange of views with United States congressmen and senators had revealed some misunderstandings regarding China's policy and efforts. They recognized, however, China's unique role in the Darfur issue and expressed the hope that China could do even more. Such candid dialogue advanced mutual understanding.

Regarding non-governmental organizations, such as the "Save Darfur" coalition, he said they also did not question China's role, but recognized that the so-called genocide had not been caused by China. They hoped the Chinese Government could exert even more pressure on the Sudanese Government. Non-governmental organizations had also clarified that they were not boycotting the Beijing Olympics, but wanted to use the event to exert more pressure on the Chinese. He had told them that there was no connection between the Olympic Games and the Darfur issue. One of the basic principles of the Games was non-politicization. While the Olympics were being hosted by China, it was a great event for people around the world. "We staunchly oppose the linkage between the Olympic Games the Darfur issue," he said.

With the adoption of Security Council resolution 1769 (2007), the settlement of the Darfur issue was on the right track, he said in response to other questions. The settlement of the issue needed to be worked out on four wheels -- namely the hybrid peacekeeping operation, the political process, an improvement of the humanitarian situation, and development and reconstruction. Moving together on these four wheels, it would be possible to find a long-term solution to the issue.

